



Kemendikdasmen
Balai Bahasa Provinsi Aceh

LAPORAN KINERJA

2025



BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Jalan T. Panglima Nyak Makam Nomor 21, Kota
Baru, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 23125



082274487449



balaibahasaaceh@kemdikdasmen.go.id



bbaceh.kemdikdasmen.go.id






LAPORAN KINERJA 2025



Jalan T. Panglima Nyak Makam Nomor 21, Kota
Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23125

 082274487449

 balaibahasaaceh@kemdikdasmen.go.id

 bbaceh.kemdikdasmen.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Balai Bahasa Provinsi Aceh berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen kami dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh mengacu pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berbagai regulasi terkait lainnya. Laporan ini menyajikan informasi lengkap tentang capaian kinerja, analisis atas keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi, serta langkah strategis yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun mendatang.

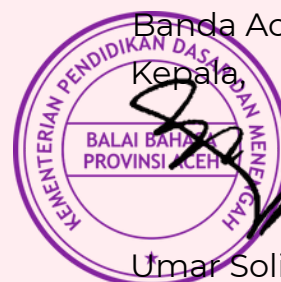
Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Balai Bahasa Provinsi Aceh tahun 2025. Apresiasi yang tinggi secara khusus kami berikan kepada tim penyusun laporan kinerja ini yang telah bersungguh-sungguh dan cekatan dalam menyelesaikan laporan ini secara berkualitas dan tepat waktu.



Harapan kami, Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif tentang kinerja organisasi Balai Bahasa Provinsi Aceh serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan demi peningkatan layanan dan tata kelola pada tahun-tahun berikutnya.



Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh



Banda Aceh, 30 Januari 2026

Kepala,

Umar Solikhan

IKHTISAR Eksekutif

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 sehingga menjadi fondasi penting bagi penguatan tata kelola organisasi yang akan mendukung percepatan pencapaian Tujuan Strategis. Berdasarkan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Aceh periode 2025–2029, Balai Bahasa Provinsi Aceh memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Menguatnya Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan dengan indikator: Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional Literasi Membaca mencapai 76,62 pada tahun akhir periode Renstra.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan dengan indikator: (1) Indeks Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan sebesar 55,01; dan (2) Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia sebesar 55,87 pada tahun akhir periode Renstra.

Rumusan tujuan ini berfungsi sebagai panduan yang akan mengarahkan pengelolaan segenap sumber daya yang dimiliki untuk meraih hasil (outcome) yang diharapkan secara optimal, selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan, serta mampu menjawab kebutuhan pemangku kepentingan kebahasaan, baik pada tingkat mikro (daerah) maupun pada tingkat makro (nasional).

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Balai Bahasa Provinsi Aceh menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator sebagai berikut:

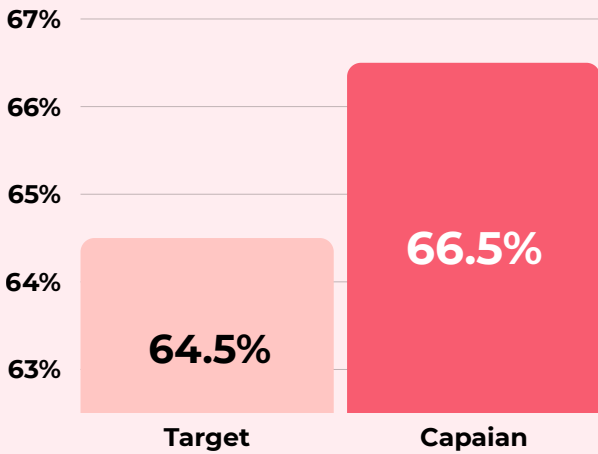
- SK 1 Meningkatkan Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik
- SK 2 Meningkatkan Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia
- SK 3 Meningkatkan Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan
- SK 4 Meningkatkan Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra
- SK 5 Meningkatkan Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra
- SK 6 Meningkatkan Fasilitasi terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA
- SK 7 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Balai Bahasa Provinsi Aceh

Sepanjang tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Aceh telah mengarahkan seluruh program, kegiatan, dan sumber daya untuk mendukung prioritas nasional, prioritas Kementerian, serta agenda transformasi pendidikan dasar dan menengah.

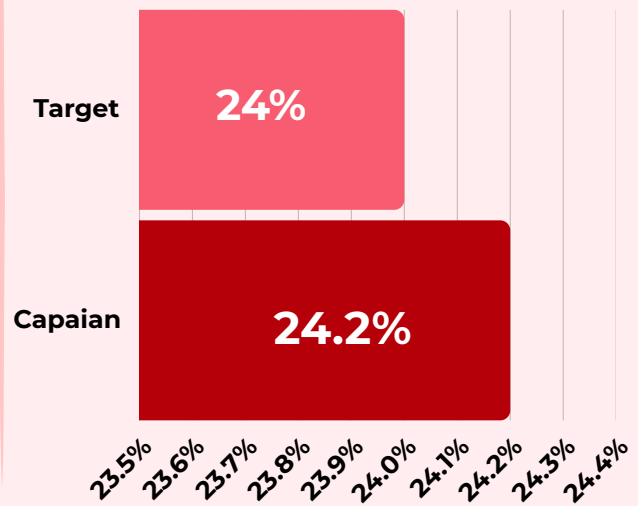
Secara umum, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan tren positif. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel realisasi capaian kinerja berikut:

Grafik 1
Target dan Capaian Per IKK Renstra 2025

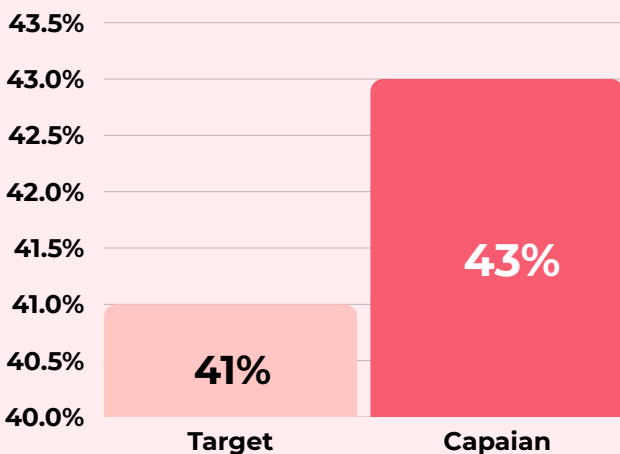
Capaian [IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca



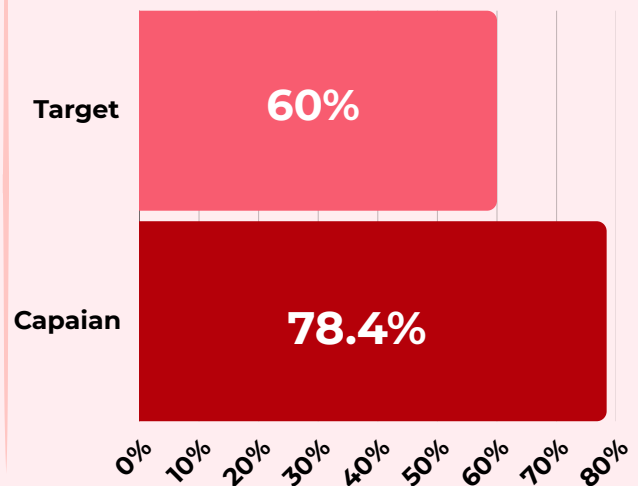
Capaian [IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik



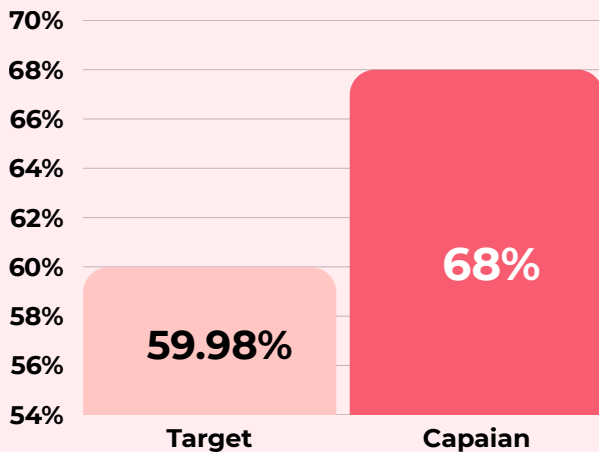
Capaian [IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya



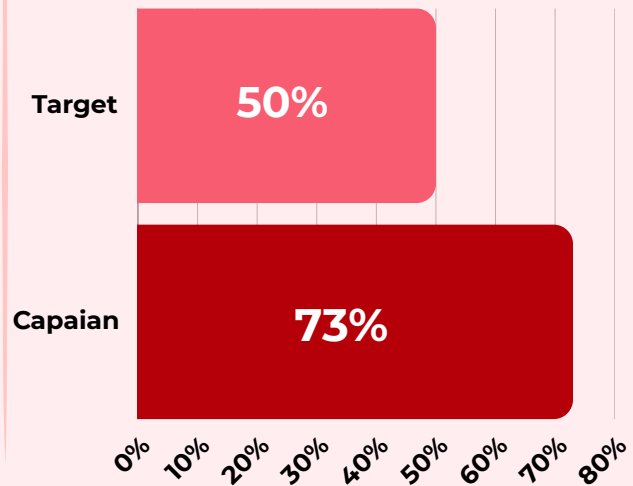
Capaian [IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya



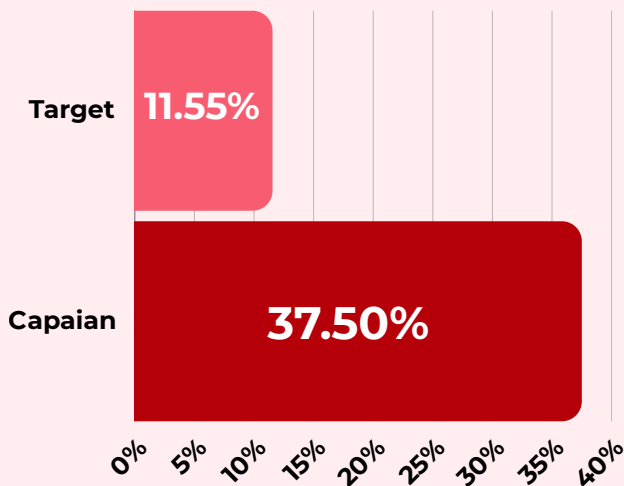
Capaian [IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya



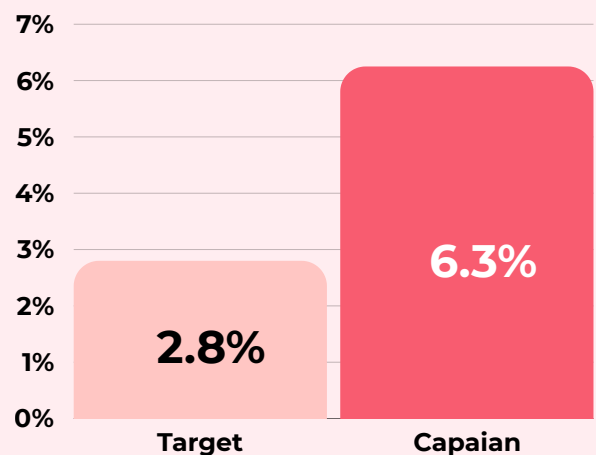
[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya



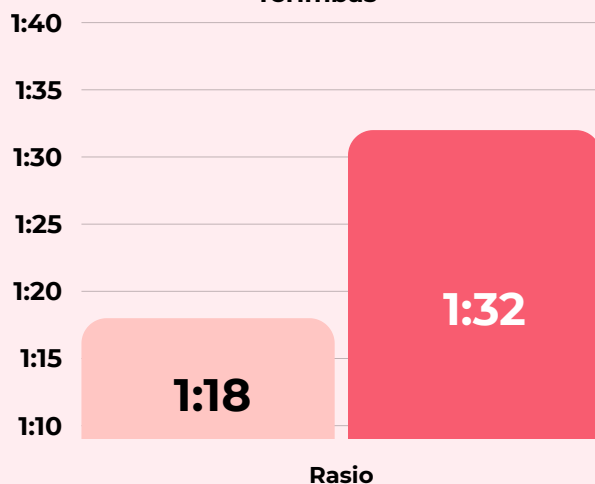
Capaian [IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi



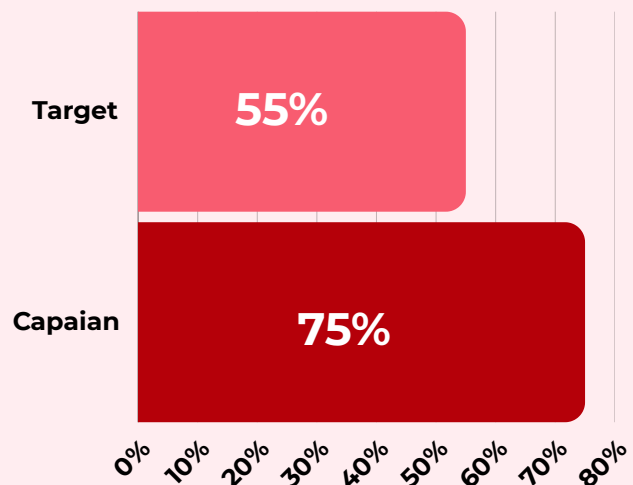
Capaian [IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan



Capaian [IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas



Capaian [IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)

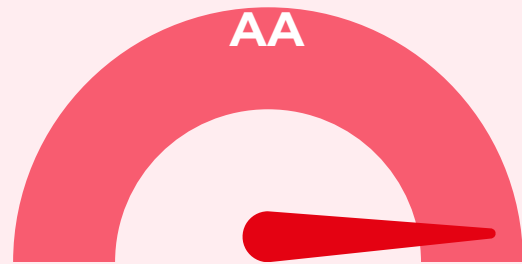


Capaian [IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Aceh

96.58

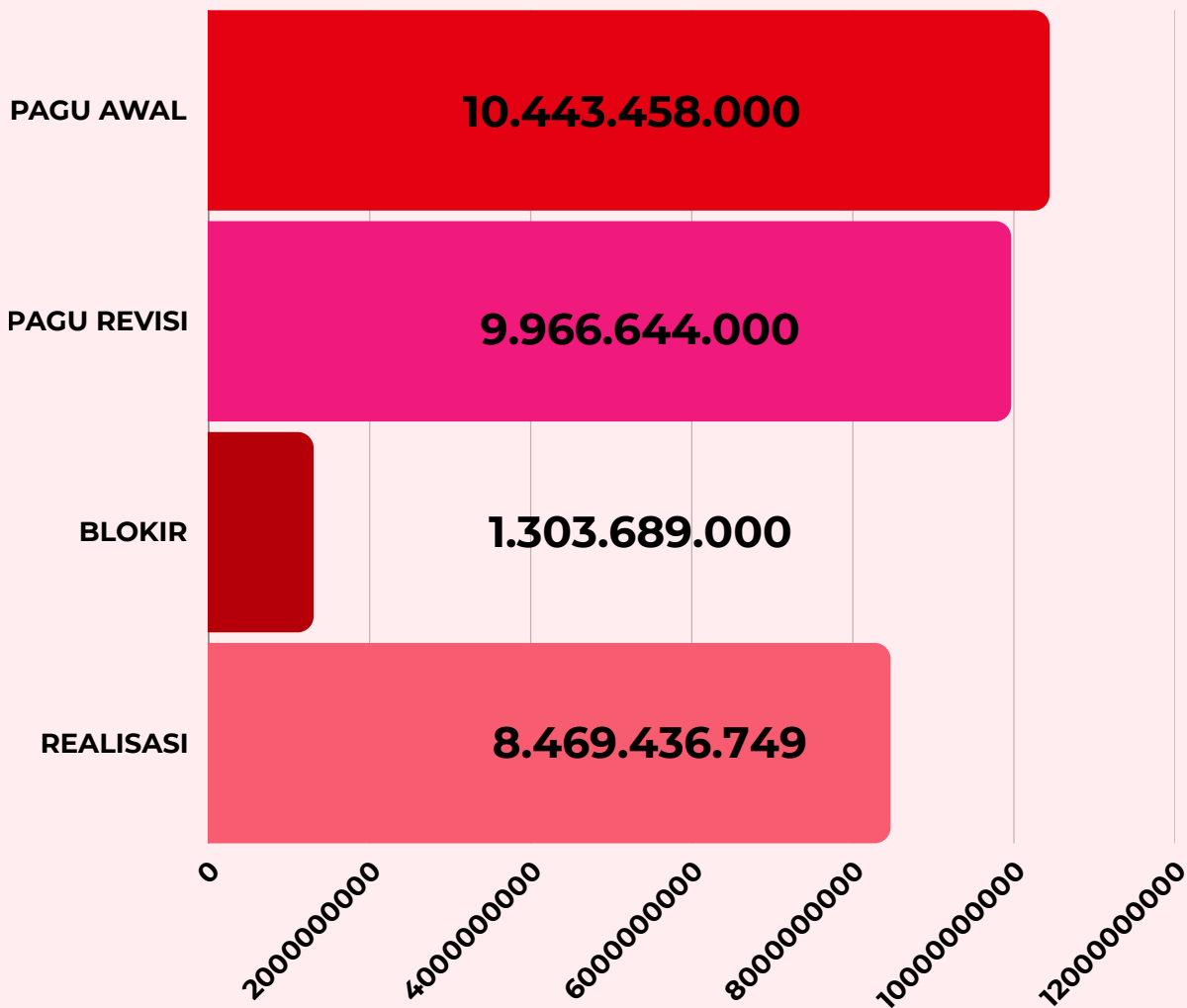
SANGAT BAIK

Capaian [IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Aceh minimal AA



PREDIKAT AA

Grafik 2
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	
Daftar Tabel	
Daftar Grafik	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	5
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	6
D. Isu Strategis	11
E. Peran Strategis	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Program Prioritas 2025—2029	18
C. Rencana Kerja dan Anggaran	21
D. Perjanjian Kinerja	24

DAFTAR ISI

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Akuntabilitas Kinerja	29
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	31
[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	33
[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	37
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	48
[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	48
[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	53
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	56
[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	57
[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya	62
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	65
[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	66
[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	76
[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	77
[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	85

DAFTAR ISI

[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	88
[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	89
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Aceh	95
[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Aceh	95
[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Aceh minimal A	98
B. Gambaran Umum Pengelolaan Anggaran	103
C. Capaian Realisasi Anggaran	103
D. Analisis Anggaran Per Program	103
E. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Belanja	109
BAB IV PENUTUP	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Balai Bahasa Provinsi Aceh	1
Gambar 1.2 Peta Provinsi Aceh	2
Gambar 2.1 Perjanjian kinerja 2025 Awal	26
Gambar 2.2 Perjanjian kinerja 2025 Revisi	27
Gambar 3.1 Kegiatan Uji Keterbacaan Produk Penerjemahan	29
Gambar 3.2 Bimtek bagi siswa SD di Aceh Besar	35
Gambar 3.3 Bimtek bagi siswa SMP di Pidie Jaya	35
Gambar 3.4 Bimtek bagi siswa di Aceh Utara	36
Gambar 3.5 Pamflet sayembara	42
Gambar 3.6 Tahap ilustrasi	42
Gambar 3.7 Uji keterbacaan siswa	43
Gambar 3.8 Bimbingan teknis	43
Gambar 3.9 Diseminasi Produk	44
Gambar 3.10 Kampanye Pemanfaatan Buku	45
Gambar 3.11 Kegiatan Penerjemahan	46
Gambar 3.12 Sosialisasi dan simulasi UKBI di Bireun	50
Gambar 3.13 Sosialisasi Daring UKBI Adaptif di Aceh Barat	50
Gambar 3.14 Pendampingan Pelaksanaan UKBI Adaptif di Aceh Barat	52
Gambar 3.15 Peyuluhan di Aceh Timur	55
Gambar 3.16 Fasilitasi lembaga terbina di Langsa	59
Gambar 3.17 Fasilitasi lembaga terbina di Langsa	60
Gambar 3.18 Bimtek literasi Aceh Barat Daya	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.19 Pengumpulan kosakata Gayo di Aceh Tengah	68
Gambar 3.20 Lokarkarya kosakata bahasa daerah	68
Gambar 3.21 Sidang komisi bahasa daerah di Banda Aceh	69
Gambar 3.22 Kamus Kopi Gayo-Indonesia	71
Gambar 3.23 Laman KBDA	72
Gambar 3.24 Peta bahasa di Aceh	77
Gambar 3.25 Tim Balai Bahasa Provinsi Aceh di lokasi TP	78
Gambar 3.26 Bimtek guru utama RBD di Bener Meriah	86
Gambar 3.27 Pimpinan bersama pemenang FTBI 2025	86
Gambar 3.28 Audiensi dan pendampingan di Politeknik Lhokseumawe	90
Gambar 3.29 Audiensi dan pendampingan di Politeknik Lhokseumawe	91
Gambar 3.30 Pendampingan ke-BIPA-an di ISBI Aceh	91
Gambar 3.31 Webinar ke-BIPA-an	92
Gambar 3.32 Pendampingan ke-BIPA-an di UIN Ar-Raniry	92
Gambar 3.33 Festival berbahasa Indonesia bagi Pembelajar Asing di Aceh	93
Gambar 3.34 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun 2025	100
Gambar 3.35 Diskusi Tim Evaluator Inspektorat Jendral pada Kegiatan Finalisasi Penilaian SAKIP Tahun 2025	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan Strategis Balai Bahasa Provinsi Aceh	14
Tabel 2.2 Indikator Pencapaian target renstra 2025—2029 per IKK	15
Tabel 2.3 Target dan alokasi anggaran Program Prioritas 2025	20
Tabel 2.4 Rencana Aksi Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun 2025	21
Tabel 2.5 Ringkasan Perjanjian Kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh tahun 2025	25
Tabel 2.6 Reviu Perjanjian Kinerja 2025	28
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025	30
Tabel 3.2 Dampak Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 1	32
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 1.1	34
Tabel 3.4 Capaian Persentase Produk Penerjemahan 2025	37
Tabel 3.5 Capaian Indikator Pemanfaatan Produk Penerjemahan	39
Tabel 3.6 Rincian pemanfaatan produk penerjemahan	40
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 1.2	41
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra	41
Tabel 3.9 Hambatan, Antisipasi, dan Strategi IKK 1.2	47
Tabel 3.10 Dampak Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 2	48
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 2.1	49
Tabel 3.12 Hambatan, Antisipasi, dan Strategi IKK 2.1	52

DAFTAR TABEL

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 2.2	54
Tabel 3.15 Hambatan, Antisipasi, dan Strategi IKK 2.2	55
Tabel 3.16 Dampak Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 3	56
Tabel 3.17 Persentase Penilaian Lembaga Terbina	58
Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 3.1	58
Tabel 3.19 Hambatan, antisipasi, strategil KK 3.1	61
Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 3.2	64
Tabel 3.21 Dampak Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 4	66
Tabel 3.22 Perbandingan capaian target dan realisasi IKK 4.1	67
Tabel 3.23 Kosakata bahasa Gayo yang diterima masuk ke KBBI	70
Tabel 3.24 Hambatan, antisipasi, strategil KK 4.1	73
Tabel 3.25 Dampak Sasaran Kegiatan 5	76
Tabel 3.26 Sepuluh titik pengamatan tim Balai Bahasa Provinsi Aceh	78
Tabel 3.27 Dialektometri kegiatan pemetaan bahasa tahun 2025	79
Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 5.1	83
Tabel 3.29 Hambatan, antisipasi, dan strategi [IKK 5.1]	84
Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 5.2	85
Tabel 3.25 Hambatan, antisipasi, dan strategi [IKK 5.2]	87
Tabel 3.26 Dampak Sasaran Kegiatan 6	88

DAFTAR TABEL

Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 6.1	89
Tabel 3.28 Hambatan, antisipasi, dan strategi IKK 6.1	94
Tabel 3.29 Rentang dan Kategori penilaian NKA	96
Tabel 3.30 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 7.1	97
Tabel 3.31 Hambatan, antisipasi, dan strategi IKK 7.1	98
Tabel 3.32 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 7.2	99
Tabel 3.34 Hambatan, antisipasi, dan strategi IKK 7.2	102
Tabel 3.35 Daftar Realisasi Anggaran Sesuai dengan Rincian Output per SK dan IKK	105
Tabel 3.36 Daftar Revisi Anggaran	108

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Target dan Capaian Per IKK Renstra 2025	III
Grafik 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	V
Grafik 3. Persentase realisasi anggaran 2025	21
Grafik 4 Perbandingan Target dan Realisasi per-IKK	110

BAB I

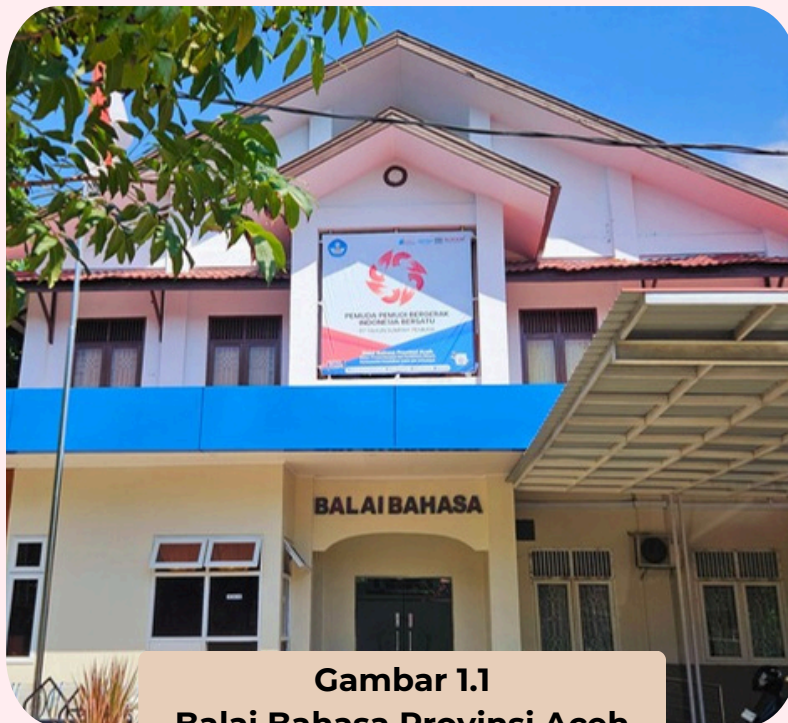
PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Secara umum, kondisi Balai Bahasa Provinsi Aceh pada tahun 2025 menunjukkan kesiapan kelembagaan, efektivitas koordinasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya yang mendukung terwujudnya tujuan dan tata kelola pendidikan dasar dan menengah yang lebih berkualitas. Hal ini menjadi fondasi penting bagi peningkatan kinerja di tahun berikutnya.



Gambar 1.1
Balai Bahasa Provinsi Aceh

Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Satuan kerja ini dibentuk pada 23 September 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 226/O/1999 tentang Pembentukan Balai Bahasa di Enam Provinsi. Pada awal pembentukannya, balai ini bernama Balai Bahasa Banda Aceh dan berada di bawah koordinasi Pusat Bahasa (kini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa), yang dipimpin oleh Dr. Abdul Djunaidi, M.S. Pada saat itu, Balai Bahasa Banda Aceh diisi oleh 9 orang SDM, yang terdiri atas Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, Bendahara, 2 orang tenaga teknis kebahasaan, dan 4 orang tenaga honorer.

Hasil

- 1) *Output*: Tersedianya bahan bacaan anak yang telah teruji keterbacaannya.
- 2) *Outcome*: Meningkatnya kemampuan memahami teks bacaan dan minat baca peserta didik.

2.

Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia

Kegiatan yang Dilakukan

- 1) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- 2) Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kebahasaan.

Hasil

- 1) *Output*: Terlaksananya kegiatan pembinaan dan layanan kebahasaan.
- 2) *Outcome*: Meningkatnya kompetensi berbahasa Indonesia di lingkungan pendidikan dan instansi.

3.

Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

Kegiatan yang Dilakukan

- 1) Memfasilitasi pelibatan lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan komunitas literasi.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan partisipatif kebahasaan dan kesastraan.

Hasil

- 1) *Output*: Terlaksananya kegiatan kolaboratif kebahasaan dan kesastraan.
- 2) *Outcome*: Meningkatnya keterlibatan aktif lembaga dan komunitas dalam pemertabatan bahasa dan sastra.

4.

Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Kegiatan yang Dilakukan

- 1) Mengembangkan dan menerjemahkan produk bahasa dan sastra.
- 2) Menjamin mutu produk melalui uji keterbacaan dan evaluasi kebahasaan.

Hasil

- 1) *Output*: Produk pengembangan bahasa dan sastra yang layak dan sesuai kaidah.
- 2) *Outcome*: Meningkatnya kualitas bahan kebahasaan dan kesastraan yang dimanfaatkan masyarakat.

5. Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

Kegiatan yang Dilakukan

- 1) Melaksanakan revitalisasi bahasa daerah.
- 2) Menyelenggarakan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI).

Hasil

- 1) *Output*: Terlaksananya kegiatan revitalisasi bahasa daerah.
- 2) *Outcome*: Terpeliharanya bahasa dan sastra daerah melalui peningkatan sikap positif generasi muda.

6. Meningkatnya Fasilitasi terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA

Kegiatan yang Dilakukan

- 1) Memberikan fasilitasi teknis dan pendampingan kepada lembaga penyelenggara BIPA.
- 2) Menyelenggarakan bimbingan teknis bagi pengajar BIPA.

Hasil

- 1) *Output*: Terlaksananya bimtek dan pendampingan BIPA.
- 2) *Outcome*: Meningkatnya kompetensi pengajar dan kualitas pembelajaran BIPA.

7. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balai Bahasa Provinsi Aceh

Kegiatan yang Dilakukan

- 1) Menerapkan SPIP dan pembangunan Zona Integritas.
- 2) Melaksanakan pembinaan SDM dan penguatan budaya kerja.

Hasil

- 1) *Output*: Terlaksananya sosialisasi SPIP dan ZI.
- 2) *Outcome*: Terwujudnya tata kelola organisasi yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun 2025, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan keuangan negara, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun dasar hukum penyusunan laporan ini meliputi:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 4) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029;
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja;
- 14) Peraturan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5889/I/BS.01.02/2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2025—2029; dan
- 15) Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh Nomor 1232/I5.1/PR.00.02/2025 tentang Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun 2025—2029.

C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

TUGAS

Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan tugas sesuai mandat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 47 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa, yaitu:

Melaksanakan perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan fungsi sebagai berikut

1. pelaksanaan pemetaan bahasa dan sastra;
2. pelaksanaan inventarisasi kosakata dan karya sastra;
3. pelaksanaan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah;
4. pelaksanaan pemasyarakatan bahasa Indonesia;
5. pelaksanaan fasilitasi perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah;
6. pemberian layanan kebahasaan dan kesastraan;
7. pelaksanaan kemitraan di bidang kebahasaan dan kesastraan;
8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kebahasaan dan kesastraan; dan
9. pelaksanaan urusan administrasi.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Balai Bahasa Provinsi Aceh terdiri dari unsur pimpinan, unit teknis, serta bagian-bagian pendukung yang berfungsi memastikan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Seluruh unsur bekerja secara sinergis dalam rangka mencapai sasaran strategis Renstra 2025–2029, khususnya terkait peningkatan mutu layanan pendidikan, efektivitas tata kelola, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2025, terdiri dari aparatur dengan kompetensi beragam, baik fungsional tertentu maupun fungsional umum. Upaya peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta penerapan manajemen kinerja berbasis hasil. Budaya kerja berintegritas, adaptif, dan kolaboratif terus ditumbuhkan sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi Tematik dan penguatan nilai-nilai ASN BerAKHLAK.

Balai Bahasa Provinsi Aceh memiliki 53 pegawai yang terdiri atas 44 ASN dan 9 Tenaga Alih Daya. Berdasarkan jabatan, ASN meliputi 2 pejabat (Kepala dan Kasubbag Umum), 18 JFT (terdiri dari 12 Widyabasa, 1 Penerjemah, 1 Pranata SDM Aparatur, 3 Perencana, dan 1 Analis SDM Aparatur), serta 24 JFU.

Berdasarkan jenjang pendidikan, ASN terdiri atas 1 orang dengan gelar S3, 9 orang S2, 30 orang S1, 3 orang D3, dan 1 orang lulusan SMA.

Berdasarkan status, ASN terdiri atas 43 PNS dan 1 PPPK, sedangkan Tenaga Alih Daya berjumlah 9 orang.

Berdasarkan golongan, ASN Balai Bahasa Provinsi Aceh terbagi ke dalam Golongan II sebanyak 1 orang (II/d); Golongan III sebanyak 36 orang, terdiri atas 11 orang (III/a), 11 orang (III/b), 3 orang (III/c), dan 11 orang (III/d); serta Golongan IV sebanyak 6 orang, terdiri atas 4 orang (IV/a) dan 2 orang (IV/b). Sementara itu, 1 orang PPPK berada pada Golongan IX.



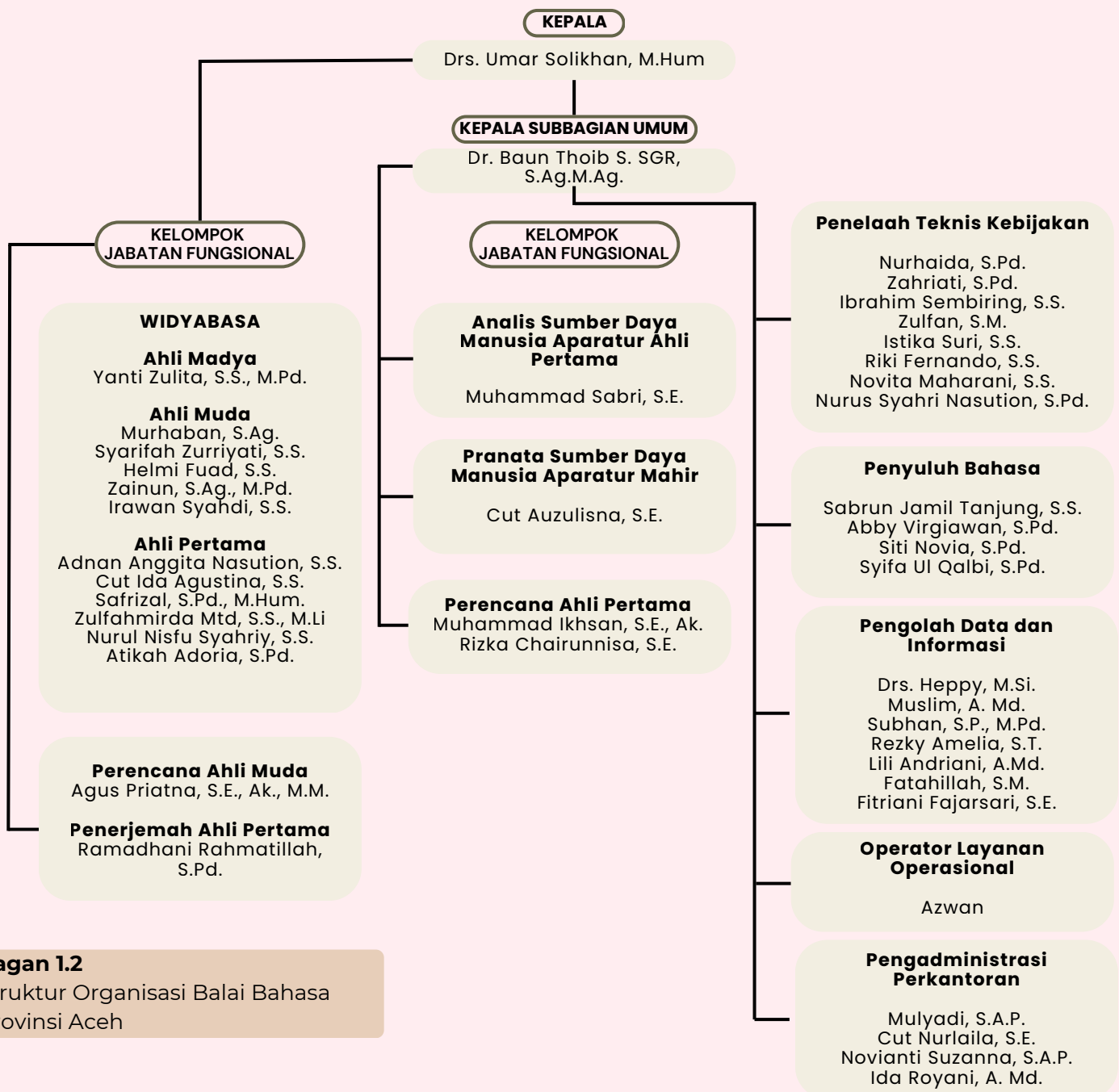
Bagan 1.1

Kondisi SDM Balai Bahasa Provinsi Aceh 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2024, struktur organisasi Balai Bahasa Provinsi Aceh terdiri atas:

- Kepala Balai,
- Subbagian Umum, dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Balai Bahasa Provinsi Aceh sebagai berikut.



Bagan 1.2
Struktur Organisasi Balai Bahasa
Provinsi Aceh

Budaya Kerja Balai Bahasa Provinsi Aceh

Balai Bahasa Provinsi Aceh berkomitmen untuk membangun lingkungan kerja yang profesional, inovatif, dan berintegritas. Budaya kerja yang diterapkan berlandaskan lima nilai utama: **Selaras, Unggul, Produktif, Anti Korupsi, dan Akuntabel** (SEUPAKAT). Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, memastikan pelayanan publik yang berkualitas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

SELARAS

Konsistensi antara Komitmen dan Tindakan. Balai Bahasa Provinsi Aceh menjunjung tinggi integritas. Artinya, setiap komitmen yang telah dicanangkan harus sejalan dengan pelaksanaannya. Pegawai menandatangani pakta integritas dan komitmen bersama, bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai tanggung jawab moral dan profesional. Prinsip ini memastikan setiap kebijakan, program, dan layanan yang diberikan berjalan secara transparan, sesuai aturan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

UNGGUL

SDM Berkualitas untuk Pelayanan Terbaik. Keunggulan dalam pelayanan hanya dapat dicapai dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Oleh karena itu, Balai Bahasa Provinsi Aceh menanamkan budaya kerja yang mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Setiap pegawai dituntut untuk terus mengembangkan diri, memahami tugas dan fungsi jabatan, perkembangan kebahasaan dan kesastraan, serta menghadirkan layanan yang sesuai standar dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan SDM yang unggul, Balai Bahasa mampu menjadi pusat literasi dan kebahasaan yang dipercaya oleh publik.

PRODUKTIF

Inovasi dan Adaptasi dalam Setiap Langkah. Di era yang terus berubah, stagnasi bukanlah pilihan. Balai Bahasa Provinsi Aceh menanamkan budaya kerja produktif. Setiap pegawai didorong untuk memenuhi pencapaian tujuan organisasi, terus belajar, mengembangkan kreativitas, serta menghadirkan inovasi yang mendukung efisiensi dan efektivitas kerja. Inovasi tidak hanya terbatas pada teknologi, tetapi juga dalam cara kerja, penyederhanaan birokrasi, dan metode pelayanan publik. Dengan sikap yang adaptif terhadap perubahan zaman, Balai Bahasa mampu memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

ANTI KORUPSI

Etos Kerja yang Bersih dan Berintegritas. Kepercayaan publik adalah aset utama yang harus dijaga. Oleh karena itu, Balai Bahasa Provinsi Aceh menerapkan budaya kerja antikorupsi, memastikan bahwa setiap pegawai bekerja dengan penuh tanggung jawab, mematuhi prosedur operasional standar (POS), hadir tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai dengan target, dan tidak mengambil hak yang bukan miliknya. Prinsip ini tidak hanya menekan praktik korupsi dalam bentuk finansial, tetapi juga dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dan kelalaian dalam menjalankan tugas.

AKUNTABEL

Tanggung Jawab dan Transparansi dalam Setiap Tindakan. Setiap kebijakan, program, dan layanan yang dijalankan di Balai Bahasa Provinsi Aceh harus dapat dipertanggungjawabkan. Pegawai dituntut untuk bekerja berdasarkan data dan fakta, serta siap menerima evaluasi atas keputusan yang diambil. Dengan transparansi dalam pelaporan, penggunaan anggaran, dan implementasi kebijakan, Balai Bahasa memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan kepentingan masyarakat dan dapat diaudit secara terbuka.

Lima nilai utama—Selaras, Unggul, Produktif, Anti Korupsi, dan Akuntabel—menjadi fondasi bagi Balai Bahasa Provinsi Aceh dalam membangun budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan kompetitif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Balai Bahasa tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai agen pemerintah dalam pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia di kancah internasional, tetapi juga menjadi institusi penting yang kredibel serta berorientasi pada kepentingan publik di bidang kebahasaan dan kesastraan.

D. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang menjadi fokus perhatian Balai Bahasa Provinsi Aceh dapat dikelompokkan ke dalam dua isu besar: (1) literasi kebahasaan dan kesastraan, dan (2) perlindungan bahasa dan sastra. Secara spesifik isu-isu yang berkaitan dapat digambarkan sebagai berikut.

Literasi Kebahasaan dan Kesastraan

1. Buku bacaan pendukung literasi di sekolah, komunitas, dan perpustakaan di berbagai daerah yang belum memenuhi minat dan kebutuhan.
2. Masih minimnya ketersediaan bacaan pendukung literasi berbasis kearifan lokal yang sesuai dengan tingkat pembaca.
3. Ketimpangan dalam persebaran dan mutu komunitas/pegiat literasi untuk mendukung Gerakan Literasi Nasional (GLN).
4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengutamaan Bahasa Indonesia di ruang publik.

Pelindungan Bahasa dan Sastra

1. Pemerintah daerah belum seluruhnya berkomitmen terhadap upaya perlindungan bahasa dan sastra daerah.
2. Minimnya pewarisan bahasa dan sastra daerah kepada generasi muda.
3. Kurikulum muatan lokal bahasa daerah belum diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah.

E. PERAN STRATEGIS

1. Menghasilkan bahan bacaan pendukung literasi berbasis kearifan lokal yang sesuai dengan tingkat pembaca.
2. Melaksanakan pembinaan bagi Komunitas Literasi di berbagai daerah.
3. Melakukan audiensi, sosialisasi, dan pendampingan untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.
4. Meningkatkan kompetensi dan kemahiran berbahasa, terutama bagi guru dan siswa, serta menciptakan ekosistem yang mendukung budaya literasi di sekolah, keluarga, dan masyarakat.
5. Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk melindungi bahasa dan sastra daerah.
6. Melaksanakan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah untuk keberlangsungan pewarisan budaya.
7. Mengoptimalkan layanan kebahasaan dan kesastraan di seluruh daerah melalui penjalinan kemitraan dengan pemangku kepentingan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan arah kebijakan dan dasar penyelenggaraan program serta kegiatan selama periode 2025–2029. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran program/sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja tahunan serta prioritas program yang menjadi pedoman dalam menetapkan target kinerja tahunan, termasuk target pada tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Balai Bahasa Provinsi Aceh berfungsi sebagai acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Seluruh target kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 merujuk pada indikator dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra tersebut dan menjadi tolak ukur yang dapat dievaluasi secara konsisten, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Visi Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2029



VISI

Terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Dukungan Partisipasi Semesta dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui Bahasa dan Sastra.

MISI

1. Mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam pendidikan;
2. Mewujudkan kemartabatan bahasa Indonesia;
3. Mewujudkan kelestarian bahasa dan sastra daerah;
4. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional;
5. Mewujudkan tata kelola Balai Bahasa Provinsi Aceh yang responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis (RAMAH)



Tujuan Strategis

Mengacu pada tujuan dan indikator tujuan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta selaras dengan tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Balai Bahasa Provinsi Aceh menetapkan tujuan dan indikator tujuan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Tujuan Strategis Balai Bahasa Provinsi Aceh

No	Tujuan Balai Bahasa Provinsi Aceh	Indikator Tujuan Balai Bahasa Provinsi Aceh	Target Keberhasilan 2029
1	Menguatnya Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional; Literasi Membaca	76,62
2	Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan	1. Indeks Pembangunan Kebahasaan	55,01
		2. Indeks Penginternasionalan Bahasa Indoneisa	55,87

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Balai Bahasa Provinsi Aceh menetapkan 5 Sasaran Program sebagai berikut:

1. Peningkatan Kecakapan Literasi
2. Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia
3. Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah
4. Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balai Bahasa Provinsi Aceh

Matriks Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Balai Bahasa Provinsi Aceh menetapkan sasaran, indikator, dan target kegiatan yang ingin dicapai selama lima tahun. Keberhasilan sasaran diukur dengan indikator-indikator kinerja sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh Nomor 1232/I5.1/PR.00.02/2025 tentang Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun 2025—2029 sebagai berikut.

Tabel 2.2 Indikator Pencapaian target renstra 2025—2029 per IKK

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
7569	Peningkatan Kecakapan Literasi						
SK	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik						
IKK 2.2.20.1	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persentase	64	68	72	76	80
IKK 2.2.20.2	Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persentase	24	30	36	42	48
7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia						
SK	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia						
IKK 3.1.1.1	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya	Persentase	41	43	45	47	49
IKK 3.1.1.2	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persentase	60	63	66	69	72
SK	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan						
IKK 3.1.2.1	Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	Persentase	59,930	63,136	66,342	69,548	72,754
IKK 3.1.2.2	Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya	Persentase	50	55	60	65	70

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra						
IKK 3.1.3.1	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persentase	1,155	2,310	3,466	4,621	5,776
7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah						
SK	Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra						
IKK 3.1.4.1	Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan	Persentase	64	176	179	185	188
IKK 3.1.4.2	Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1:18	1:20	1:22	1:25	1:30
7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia						
SK	Meningkatnya Fasilitas terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA						
IKK 3.2.1.2	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi a. Dalam Negeri	Persentase	55	555	56	565	57

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balai Bahasa Provinsi Aceh						
SK	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balai Bahasa Provinsi Aceh						
IKK 5.1.27.1	Persentase Satuan Kerja di Balai di Bahasa Provinsi Aceh dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik	Persentase	95	96	97	98	99
IKK 5.1.28.1	Persentase Satuan Kerja di Balai Bahasa Provinsi Aceh dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A	Persentase	100	100	100	100	100



B. PROGRAM PRIORITAS 2025—2029

Balai Bahasa Provinsi Aceh dalam mendukung program prioritas Kementerian melalui program-program pendidikan bermutu turut serta melaksanakan penguatan ekosistem literasi kebahasaan dan kesastraan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis teknologi. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kecakapan literasi masyarakat secara merata melalui perluasan akses, peningkatan kualitas, dan penguatan dampak program, baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Sejalan dengan kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ada empat Program Prioritas yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Aceh, sebagai berikut.

1. Peningkatan Kecakapan Literasi

Program ini diarahkan pada penguatan tiga pilar utama, yaitu:

- 1) Literasi dasar, melalui pembinaan kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah, dengan sasaran sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas literasi.
- 2) Literasi budaya dan sastra, melalui kegiatan apresiasi dan produksi karya sastra daerah sebagai sarana internalisasi nilai kearifan lokal Aceh.
- 3) Literasi digital, melalui pengembangan konten dan platform literasi berbasis teknologi untuk mendorong kecakapan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif di era digital.

2. Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

Program ini diwujudkan melalui

- 1) Pelaksanaan Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia untuk menjaga kedaulatan bahasa;
- 2) Penyuluhan dan pendampingan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- 3) Peningkatan standar kemahiran berbahasa Indonesia; serta
- 4) Penguatan kolaborasi lintas lembaga dalam pemberian penghargaan secara berjenjang dan terpadu.

3. Pelestarian Bahasa Daerah

Kebijakan pelestarian bahasa daerah difokuskan pada tiga arah strategis, yaitu:

- 1) Revitalisasi bahasa daerah, melalui pewarisan dan pembelajaran bahasa kepada generasi muda dengan melibatkan sekolah, komunitas, dan pemerintah daerah.
- 2) Pendokumentasian dan penelitian bahasa daerah, melalui pemetaan vitalitas bahasa, inventarisasi kosakata dan tata bahasa, serta penyusunan kamus dan glosarium sebagai dasar kebijakan perlindungan bahasa.
- 3) Pemasyarakatan bahasa daerah, melalui pemanfaatan bahasa daerah dalam media, seni, festival budaya, dan produk literasi untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan masyarakat Aceh.

4. Penginternasionalan Bahasa Indonesia melalui Pemberdayaan Lembaga BIPA

Program ini diarahkan pada:

- 1) Penguatan kapasitas kelembagaan BIPA, melalui pembinaan, sertifikasi pengajar, dan peningkatan mutu penyelenggaraan BIPA di Aceh.
- 2) Pengembangan jejaring kerja sama internasional, melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga kebudayaan, dan mitra luar negeri.
- 3) Pengembangan media dan teknologi pembelajaran BIPA, melalui inovasi bahan ajar digital dan penguatan konten pembelajaran yang berorientasi internasional dan kontekstual.



Adapun target dan alokasi anggaran Program Prioritas Balai Bahasa Provinsi Aceh pada tahun 2025, sebagai berikut:

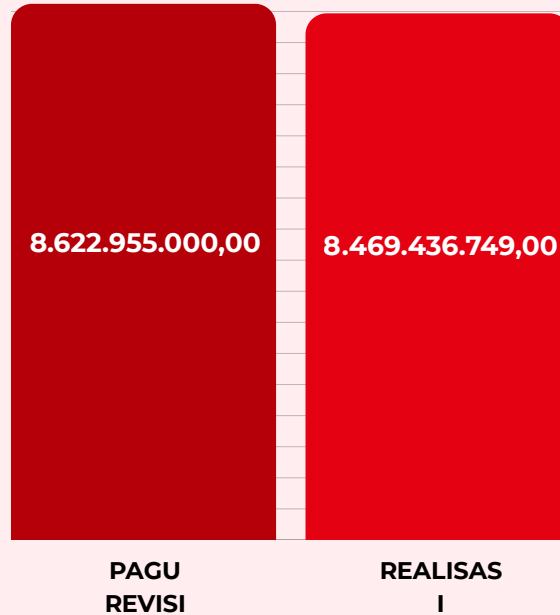
Tabel 2.3 Target dan alokasi anggaran Program Prioritas 2025

No.	Nama Program Prioritas	Target 2025	Alokasi Anggaran 2025
1	Peningkatan Kecakapan Literasi	590 Generasi muda terbina program literasi	Rp2.014.344.000
		275 Penutur bahasa terbina	
		1.996 Penutur bahasa teruji	
		4 Perhelatan Karya Kreatif Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	
		2 Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan	
		51 Produk Penerjemahan	
2	Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia	44 Komunitas Penggerak Literasi Terbina	Rp208.456.000
		45 Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	
3	Pelestarian Bahasa Daerah	234 Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah	Rp1.400.123.000
		1 Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	
		2 Koordinasi Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) Aceh	
		1 Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra	
4	Penginternasionalan Bahasa Indonesia	9 Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	Rp98.296.000

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Berikut ini adalah rencana kerja dan anggaran tahun 2025

PERSENTASE REALISASI ANGGARAN 2025



Grafik 3
Persentase realisasi
anggaran 2025

Rencana Aksi Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun 2025

Tabel 2.4 Rencana Aksi Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun 2025

No	Rincian Output	Satuan	Target	Triwulan				Alokasi
				I	II	III	IV	
1	[DI.7569.PEG.001] Perhelatan Karya Kreatif Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	Kegiatan	4	0	1	1	2	Rp322.074.000
2	[DI.7569.QDC.001] Penutur bahasa terbina	Orang	275	50	100	50	75	Rp469.399.000
3	[DI.7569.QDC.002] Penutur bahasa teruji	Orang	1996	20	741	741	494	Rp374.880.000

No	Rincian Output	Satuan	Target	Triwulan				Alokasi
				I	II	III	IV	
4	[DI.7569.QDC.003] Generasi muda terbina program literasi	Orang	590	0	60	300	230	Rp339.985.000
5	[DI.7569.QMA.002] Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan	dokumen	2	0	0	1	1	Rp155.120.000
6	[DI.7569.QMA.003] Produk Penerjemahan	dokumen	51	0	0	20	31	Rp915.807.000
7	[DU.7566.PEG.001] Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Kegiatan	1	0	0	0	1	Rp940.666.000
8	[DU.7566.QDC.001] Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah	Orang	234	0	142	92	0	Rp655.248.000
9	[DU.7566.QMA.002] Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra	dokumen	1	0	0	1	0	Rp99.750.000
10	[DU.7567.BDB.001] Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	Lembaga	45	0	0	45	0	Rp137.902.000

No	Rincian Output	Satuan	Target	Triwulan				Alokasi
				I	II	III	IV	
11	[DU.7567.BDB.002] Komunitas Penggerak Literasi Terbina	Lembaga	44	0	20	24	0	Rp200.000.000
12	[DU.7568.QDB.001] Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	Lembaga	9	1	0	3	5	Rp98.296.000
13	[WA.7613.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	0	0	0	Rp10.000.000
14	[WA.7613.EBA.958] Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Dokumen	1	0	0	0	1	Rp163.510.000
15	[WA.7613.EBA.960] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Dokumen	1	0	0	0	1	Rp78.662.000
16	[WA.7613.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	0	0	1	Rp263.877.000
17	[WA.7613.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	0	0	1	Rp4.741.863.000
18	[WA.7613.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1	0	0	0	1	Rp90.760.000
19	[WA.7613.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	5	0	0	0	5	Rp92.500.000
20	[WA.7613.EBD.974] Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	1	0	0	0	1	Rp36.345.000
Total Anggaran								Rp10.186.644.000

D. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029, Balai Bahasa Provinsi Aceh menetapkan sasaran, indikator, dan target pada tahun 2025. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh tahun 2025.


Tabel 2.5 Ringkasan Perjanjian Kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Satuan	Target Renstra	Target PK	Keterangan
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persen	64	64	Target PK sesuai dengan Renstra BBP Aceh
	[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persen	19	19	Target PK sesuai dengan Renstra BBP Aceh
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	Persen	41	41	Target PK sesuai dengan Renstra BBP Aceh
	[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persen	60	60	Target PK sesuai dengan Renstra BBP Aceh
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	Persen	59.93	59.93	Target PK sesuai dengan Renstra BBP Aceh
	[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya	Persen	50	50	Target PK sesuai dengan Renstra BBP Aceh

Sasaran	Indikator	Satuan	Target Renstra	Target PK	Keterangan
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persen	11.55	11.55	Target PK sesuai dengan Renstra BBP Aceh
[SK 5] Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	Persen	2.8	2.8	Target PK sesuai dengan Renstra BBP Aceh
	[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1:18	1:18	Target PK sesuai dengan Renstra BBP Aceh
[SK 6] Meningkatnya fasilitas terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	Persen	50	50	Target PK sesuai dengan Renstra BBP Aceh
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Aceh	[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Aceh	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Target PK sesuai dengan Renstra BBP Aceh
	[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Aceh minimal A	Predikat	A	A	Target PK sesuai dengan Renstra BBP Aceh

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Balai Bahasa Provinsi Aceh menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2025. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis. Ringkasan Perjanjian Kinerja dan Alokasi Anggaran dapat dilihat pada tangkapan layar berikut.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025



Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

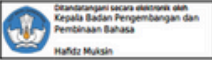
Nama : Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
Jabatan : Kepala
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hafidz Muksin
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Banda Aceh, 1 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
Hafidz Muksin



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala
Drs. Umar Solikhan, M.Hum.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatkan Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[KK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persen	64
	[KK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persen	19
[SK 2] Meningkatkan Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	[KK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	Persen	41
	[KK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persen	60
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	[KK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	Persen	59.93
	[KK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kerjanya	Persen	50
[SK 4] Meningkatkan Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[KK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persen	11.55
[SK 5] Meningkatkan Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	[KK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang tervalidasi dalam peta kebencanaan	Persen	2.8
	[KK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1:18
[SK 6] Meningkatkan fasilitas terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	[KK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	Persen	50
[SK 7] Meningkatkan tata kelola Balai Bahasa Aceh	[KK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Aceh	Kategori	Sangat Baik
	[KK 7.2] Predikat Akurabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Aceh minimal A	Predikat	A


No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Rp1.798.954.000
2	7567	Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp337.902.000
3	7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp176.180.000
4	7569	Peningkatan Kecakapan Literasi	Rp2.652.905.000
5	7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp5.477.517.000
Total Anggaran			Rp10.443.458.000

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja 2025 Awal

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 Balai Bahasa Provinsi Aceh disusun sebagai penyesuaian atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun, seiring terjadinya perubahan pada alokasi anggaran, penyesuaian indikator, pergantian pejabat serta dinamika pelaksanaan program selama tahun berjalan.

Revisi Perjanjian Kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh bertujuan untuk memastikan bahwa target kinerja tetap realistis, terukur, dan selaras dengan prioritas strategis kementerian serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Melalui penetapan perjanjian kinerja revisi, Balai Bahasa Provinsi Aceh menegaskan kembali komitmen untuk mencapai sasaran kinerja yang telah diperbarui dan menjadikan dokumen ini sebagai dasar pengukuran capaian kinerja akhir tahun 2025.



Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Kepala
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
Jabatan : Kepala
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hafidz Muksin
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa



Hafidz Muksin

Banda Aceh, 18 Desember 2025



Drs. Umar Solikhan, M.Hum.

Catatan:

- UU No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSB

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[KK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persen	64
	[KK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persen	24
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	[KK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profisiensi	Persen	41
	[KK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persen	60
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	[KK 3.1] Persentase lembaga terbita yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	Persen	59.93
	[KK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbita yang meningkatkan kualitas kinerjanya	Persen	50
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[KK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persen	11.55
[SK 5] Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelebaran Bahasa dan Sastra	[KK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebencanaan	Persen	2.8
	[KK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1:18
[SK 6] Meningkatnya Fasilitas terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	[KK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	Persen	55
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Aceh	[KK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Aceh	Kategori	Sangat Baik
	[KK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Aceh minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Rp1.695.664.000
2	7567	Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp337.902.000
3	7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp98.296.000
4	7569	Peningkatan Kecakapan Literasi	Rp2.577.265.000
5	7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp5.257.517.000
Total Anggaran			Rp9.966.644.000

Catatan:

- UU No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSB

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja 2025 Revisi

Secara keseluruhan, Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 Balai Bahasa Provinsi Aceh menjadi instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas perencanaan, serta memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal. Berikut ringkasan revisi Perjanjian Kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh tahun 2025.

Tabel 2.6 Reviu Perjanjian Kinerja 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Awal	Revisi
1	[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persen	19	24
2	[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	Persen	50	55

Alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja Revisi mengalami penyesuaian dari **Rp10.443.458.000** menjadi **Rp9.966.644.000**.

Dua hal yang melatarbelakangi penyesuaian target dan anggaran sebagaimana disebutkan di atas adalah:

1. Usulan perubahan target IKK Persentase Produk Penerjemahan yang dimanfaatkan oleh Peserta Didik dari 19% menjadi 24% didasarkan pada hasil peninjauan ulang terhadap data terbaru mengenai jumlah buku terjemahan yang telah dihasilkan, didistribusikan, serta dimanfaatkan oleh peserta didik dan masyarakat. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa volume buku yang beredar dan tingkat pemanfaatannya telah melampaui asumsi awal yang digunakan saat penetapan target 19%. Oleh karena itu, penyesuaian target menjadi 24% dilakukan untuk mencerminkan kondisi riil dan terkini pemanfaatan buku di lapangan, sekaligus memastikan pengukuran kinerja yang lebih akurat, proporsional, dan selaras dengan capaian aktual (jumlah produk penerjemahan hingga tahun 2024 pada Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra serta UPT mencapai 9.370 produk penerjemahan).
2. Usulan perubahan target IKK Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri) dari 50% menjadi 55% didasarkan pada peningkatan fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA oleh UPT. Peningkatan target tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan fasilitasi program BIPA di daerah, yang dipicu oleh bertambahnya jumlah pemelajar BIPA pada lembaga-lembaga penyelenggara program BIPA.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai Bahasa Provinsi Aceh atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selama tahun berjalan, Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pengelolaan kinerja melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan yang selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Capaian kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh pada tahun 2025 diukur secara sistematis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, diverifikasi melalui reviu internal, dan dibandingkan dengan target tahunan. Secara umum, sebagian besar indikator kinerja telah tercapai, meskipun beberapa target mengalami deviasi yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan, serta kondisi operasional di lapangan.

Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan analisis terhadap capaian yang belum optimal dan merumuskan langkah tindak lanjut sebagai bagian dari upaya peningkatan berkelanjutan. Proses ini disertai penguatan integrasi perencanaan dan anggaran, peningkatan kualitas data kinerja, serta pengawasan intern untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 menunjukkan komitmen Balai Bahasa Provinsi Aceh dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil. Upaya ini menjadi dasar bagi peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Aceh menetapkan tujuh sasaran dengan dua belas indikator kinerja. Ketercapaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Gambar 3.1 Kegiatan Uji Keterbacaan Produk Penerjemahan

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Capaian	%
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persen	64	66,5	103,90%
	[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persen	24	24,2	100,83%
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	Persen	41	43	104,87%
	[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persen	60	74,8	124,66%
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Persen	59.93	68	113,46%
	[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya	Persen	50	73	146%
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persen	11.55	37,5	324,67%
[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	Persen	2.8	5.13	183,21%
	[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1:18	1:32	177,77%
[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terasilitasi (Dalam Negeri)	Persen	55	75	136,36%
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Aceh	[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Aceh	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
	[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Aceh minimal A	Predikat	A	AA	100,38%

SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik

Meningkatnya kecakapan literasi membaca peserta didik dimaknai sebagai peningkatan kemampuan peserta didik dalam membaca dan menulis, baik terhadap teks maupun nonteks, yang secara kritis menjadi dasar penguatan kecakapan hidup. Secara operasional, peningkatan kecakapan literasi tersebut tercermin pada kemampuan peserta didik dalam memahami, memanfaatkan, dan mengolah bahasa secara tepat, yang didukung oleh tumbuhnya budaya baca-tulis, menguatnya kemampuan bernalar kritis, serta berkembangnya daya kreasi dan apresiasi terhadap bahasa dan sastra Indonesia.

Upaya peningkatan kecakapan literasi dilaksanakan melalui penguatan pada tiga ranah utama, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Khusus pada ranah sekolah, peningkatan kecakapan literasi diwujudkan melalui kemitraan seluruh unsur dalam ekosistem persekolahan, yang meliputi kepala sekolah, guru, dan komite sekolah, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik.

Peningkatan kecakapan literasi di sekolah berkontribusi langsung terhadap kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Untuk mendukung hal tersebut, Balai Bahasa Provinsi Aceh melakukan upaya kolaboratif untuk meningkatkan dua aspek utama peningkatan literasi, yaitu:

1. **Akses, melalui penyediaan bahan pengayaan pendukung literasi**

2. **Kompetensi, melalui pembinaan kecakapan literasi pendidik dan tenaga kependidikan.**



Untuk membantu perluasan dan peningkatan akses, Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan penyusunan buku cerita anak dwibahasa bergambar bertema *science, technology, engineering, arts, and mathematics* (STEAM). Buku-buku ini dirancang untuk memperkuat literasi membaca, menumbuhkan daya nalar, dan meningkatkan kreativitas peserta didik. Pencetakan buku-buku bermutu untuk pengayaan literasi dilakukan secara terbatas dan disalurkan secara ke sekolah-sekolah dengan capaian literasi rendah berdasarkan hasil Asesmen Nasional.

Selain dalam bentuk cetak, buku-buku bacaan bermutu tersebut juga tersedia dalam bentuk digital dengan tujuan agar dapat diakses oleh pembaca secara luas. Siapa pun, kapan pun, dan di mana pun, setiap orang dapat mengakses dan memanfaatkan buku-buku tersebut secara gratis melalui portal resmi, antara lain **budi.kemendikdasmen.go.id**, **repositori.kemendikdasmen.go.id**, **penjaring.kemendikdasmen.go.id**, serta laman resmi Balai Bahasa Provinsi Aceh. Ketersediaan akses digital ini memperluas jangkauan pemanfaatan produk kebahasaan, tidak hanya oleh peserta didik dan pendidik di sekolah sasaran, tetapi juga oleh masyarakat luas dari berbagai kalangan di jagat maya.

Penyediaan buku bacaan bermutu oleh Balai Bahasa Provinsi Aceh memberikan berbagai dampak positif yang terukur terhadap peserta didik, pendidik, dan lingkungan sekolah. Dampak tersebut tidak hanya terlihat pada peningkatan minat dan kemampuan membaca peserta didik, tetapi juga pada kualitas proses pembelajaran, penguatan ekosistem literasi sekolah, serta perluasan akses terhadap bahan bacaan berkualitas. Rincian dampak pelaksanaan kegiatan tersebut dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Dampak Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 1

Dampak Pelaksanaan Kegiatan			
Tersedianya bahan bacaan yang berkualitas, kontekstual, dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik sebagai pendukung kegiatan literasi membaca.	Meningkatnya akses peserta didik dan guru terhadap bahan pengayaan literasi di sekolah sasaran, serta berkurangnya keterbatasan sumber bacaan pendukung pembelajaran.	Meluasnya jangkauan pemanfaatan buku bacaan bermutu oleh satuan pendidikan dan masyarakat luas tanpa terbatas ruang dan waktu.	Meningkatnya minat baca, kemampuan pemahaman bacaan, serta kemampuan bernalar kritis peserta didik.

INDIKATOR KEGIATAN 1.1

Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik adalah kondisi terjadinya perkembangan kemampuan peserta didik dalam memahami, menafsirkan, mengevaluasi, dan merefleksikan informasi yang diperoleh dari berbagai teks tertulis. Kecakapan ini mencakup kemampuan membaca secara lancar, memahami makna tersurat dan tersirat, mengaitkan isi bacaan dengan pengetahuan serta pengalaman sebelumnya, hingga menggunakan informasi dari bacaan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dalam konteks pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari.

Batasan IKK 1.1 Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik ditujukan kepada peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan fokus pada pengembangan kemampuan membaca yang selaras dengan tahap perkembangan dan kebutuhan belajar masing-masing jenjang. Pada jenjang SD, peningkatan literasi diarahkan pada penguatan kemampuan memahami bacaan dan menumbuhkan minat baca. Pada jenjang SMP, peningkatan literasi difokuskan pada pengembangan kelancaran, kecepatan, dan pemahaman bacaan yang lebih efektif. Sementara itu, pada jenjang SMA, peningkatan literasi diarahkan pada penguatan kemampuan membaca secara kritis, analitis, dan reflektif. Secara umum, target kerja ini bertujuan membangun kecakapan literasi membaca peserta didik secara bertahap, berkelanjutan, dan berjenjang, untuk mendukung keberhasilan pembelajaran dan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Peningkatan kompetensi siswa dihitung berdasarkan hasil tes awal dan tes akhir yang diperoleh siswa. Berdasarkan hasil tes awal dan tes akhir yang dilakukan, terdapat peningkatan kemampuan membaca siswa sebesar **65,5%**, dengan rincian Peningkatan untuk **siswa SD sebesar 63%**, **siswa SMP sebesar 66%**, dan **siswa SMA sebesar 68%**.

Metode Perhitungan

Perhitungan capaian pada indikator ini dilakukan dengan mengukur tingkat capaian program literasi dalam meningkatkan kemampuan membaca peserta. Persentase Generasi Muda Terbina Program Literasi diperoleh dengan membandingkan jumlah peserta yang menunjukkan peningkatan kemampuan membaca berdasarkan tes awal dan tes akhir dengan jumlah seluruh peserta yang mengikuti kegiatan literasi, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas program literasi secara umum.

Rumus perhitungan persentasenya adalah sebagai berikut:

$$\Sigma \text{PGMTL} = \Sigma \text{PMKM} / \Sigma \text{SPK} \times 100\%$$

Keterangan:

Σ **PGMTL** = Persentase Generasi Muda Terbina Program Literasi

Σ **PMKM** = Jumlah Peserta yang Meningkatkan Nilai Kemampuan Membacanya

Σ **SPK** = Jumlah Seluruh Peserta Kegiatan

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 1.1

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Tahun 2025		
		Target PK	Realisasi PK	%
[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persen	64	66,5	103,90%

Keberhasilan pelaksanaan program peningkatan kecakapan literasi membaca peserta didik pada jenjang SD, SMP, dan SMA didukung oleh rangkaian kegiatan yang dirancang secara terencana dan berkesinambungan sesuai dengan karakteristik setiap jenjang pendidikan. Secara ringkas, tahapan kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelaksanaan (1) Bimtek Cerdas Mengulas buku bagi Siswa SD, (2) Bimtek Peningkatan Kompetensi Membaca Cepat bagi Siswa SMP, dan (3) Bimtek Peningkatan Kompetensi Membaca Kritis bagi Siswa SMA. Pelaksanaan seluruh tahapan tersebut memastikan bahwa kegiatan literasi tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kemampuan membaca peserta didik, sehingga capaian indikator kinerja dapat terukur dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

1. Bimtek Cerdas Mengulas buku bagi Siswa SD

Sasaran kegiatan ini adalah siswa tingkat SD sebanyak 200 siswa yang berasal dari 10 sekolah berbeda di wilayah kabupaten Aceh Besar. Sekolah asal peserta dipilih berdasarkan hasil Asesmen Nasional tahun 2024, khususnya yang menunjukkan capaian literasi membaca pada kategori rendah (kategori 1 dan 2).

Peserta yang akan mengikuti Bimtek Cerdas Mengulas Buku adalah siswa SD di Kabupaten Aceh Besar yang berkategori K1. Selama pelatihan berlangsung, peserta didampingi oleh satu orang guru pendamping dari masing-masing sekolah. Setiap sekolah yang ditunjuk mengirimkan dua puluh siswa dengan rincian, 10 siswa kelas III dan 10 siswa kelas V.



Gambar 3.2 Bimtek bagi siswa SD di Aceh Besar

2. Bimtek Peningkatan Kompetensi Membaca Cepat bagi Siswa SMP



Gambar 3.3 Bimtek bagi siswa SMP di Pidie Jaya

Bimtek peningkatan kompetensi membaca cepat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca, pemahaman terhadap isi bacaan, dan kemampuan berpikir pembaca. Peningkatan kompetensi membaca cepat ini juga bermanfaat untuk membantu pembaca bijak memilah informasi di tengah

banyaknya informasi yang tersedia, melatih otak dengan stimulasi yang tepat, merangsang kreativitas pembaca, dan menjadi alat bantu bagi pembaca untuk mengeksplorasi hal-hal baru.

Sasaran kegiatan ini adalah siswa tingkat SMP sebanyak 200 orang yang berasal dari 10 sekolah di Kabupaten Pidie. Setiap sekolah mengirimkan 20 siswa. Sekolah asal peserta dipilih berdasarkan hasil Asesmen Nasional tahun 2024, khususnya yang menunjukkan capaian literasi membaca pada kategori rendah (kategori 1 dan 2).

3. Bimtek Peningkatan Kompetensi Membaca Kritis bagi Siswa SMA



Gambar 3.4 Bimtek bagi siswa di Aceh Utara

Peserta yang mengikuti Bimtek Membaca Cepat adalah siswa SMA di Kabupaten Aceh Utara yang berkategori K1. Peserta berjumlah dua ratus siswa dan dua puluh orang guru pendamping dari sepuluh sekolah. Setiap sekolah yang ditunjuk mengirimkan dua puluh siswa dan satu orang guru pendamping.

Ketiga bimtek tersebut dilakukan secara luring dan daring. Satu kali kelas luring pada awal pertemuan dan beberapa kali kelas daring untuk praktik mandiri dan penguatan materi. Tes awal dilaksanakan pada pertemuan luring dan tes akhir dilaksanakan pada pertemuan daring yang terakhir.

INDIKATOR KEGIATAN 1.2

Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

Produk penerjemahan adalah produk kebahasaan yang dihasilkan melalui kegiatan penerjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia maupun dari bahasa Indonesia ke bahasa asing, yang diproduksi dan dimanfaatkan secara aktif oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan literasi.

Pemanfaatan produk penerjemahan di Balai Bahasa Provinsi Aceh mencakup penggunaan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun kegiatan literasi nonformal. Kegiatan tersebut dapat berlangsung di satuan pendidikan melalui program literasi sekolah, kelas membaca nyaring, dan pojok baca, serta di luar lingkungan sekolah, antara lain di perpustakaan umum, taman baca masyarakat (TBM), komunitas literasi, dan forum literasi anak. Selain itu, pemanfaatan juga mencakup penggunaan fitur baca buku atau pengunduhan melalui platform digital resmi pemerintah.

Batasan IKK 1.2 Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik meliputi pemanfaatan oleh peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Produk penerjemahan Balai Bahasa Provinsi Aceh yang diperhitungkan merupakan buku cerita anak dwibahasa hasil penerjemahan yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Aceh, khususnya dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, yang diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2022 hingga tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Capaian Persentase Produk Penerjemahan Tahun 2022--2024 yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

Tabel 3.4 Capaian Persentase Produk Penerjemahan 2025

SK	IKK	Jumlah Produk Dihasilkan			Jumlah Produk Dimanfaatkan			Persentase Capaian 2022–2024
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	5	30	60	5	18	-	2,421%

Metode Perhitungan

Penghitungan capaian indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah produk buku cerita anak dwibahasa hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik dengan jumlah total produk buku cerita anak dwibahasa hasil penerjemahan yang tersedia di Balai Bahasa Provinsi Aceh. Pemanfaatan yang diperhitungkan mencakup kegiatan yang melibatkan peserta didik, seperti membaca nyaring dan kegiatan kreatif yang merujuk pada isi buku, pemanfaatan fitur baca buku atau pengunduhan melalui platform digital Penjaring, laman resmi Balai Bahasa Provinsi Aceh, dan platform digital lainnya, pendistribusian buku ke perpustakaan dan taman baca masyarakat (TBM), serta bentuk pendayagunaan lainnya yang dapat diverifikasi.

Rumus perhitungan persentase pemanfaatan adalah sebagai berikut:

$$PBu = (Jpt / JTpt) \times 100\%$$

Keterangan:

PBu : Persentase produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik

Jpt : Jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik

JTpt : Jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang dihasilkan Balai Bahasa Provinsi Aceh

Satuan pengukuran adalah persentase, dengan tipe perhitungan non-kumulatif.

Interpretasi pemanfaatan adalah sebagai berikut:

Nilai PBu menunjukkan persentase produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik.

Rentang interpretasi pemanfaatan adalah sebagai berikut:

0–20%: Sangat Rendah (belum ada pemanfaatan signifikan)

21–40%: Rendah (pemanfaatan masih terbatas)

41–60%: Sedang (pemanfaatan mulai meluas)

61–80%: Tinggi (pemanfaatan sudah cukup baik)

81–100%: Sangat Tinggi (pemanfaatan optimal)

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan IKK 1.2 Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik meliputi data distribusi buku ke satuan pendidikan dan lembaga literasi, data pemanfaatan produk penerjemahan dalam kegiatan pembelajaran dan literasi di sekolah, serta data pemanfaatan melalui media digital resmi pemerintah, termasuk data fitur baca buku dan pengunduhan yang dapat diverifikasi.

Berdasarkan hasil penghitungan capaian indikator pemanfaatan produk penerjemahan Balai Bahasa Provinsi Aceh tahun 2022—2024, dari total 95 produk buku cerita anak dwibahasa hasil penerjemahan, sebanyak 23 produk telah dimanfaatkan oleh peserta didik. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang melibatkan peserta didik secara langsung, seperti membaca nyaring, kegiatan literasi kreatif yang merujuk pada buku, pemanfaatan fitur baca buku atau pengunduhan melalui media digital Penjaring dan laman resmi Balai Bahasa Provinsi Aceh, serta pendistribusian buku ke satuan pendidikan dan lembaga literasi.

Adapun hasil perhitungan capaian indikator pemanfaatan produk penerjemahan Balai Bahasa Provinsi Aceh tahun 2022—2024 dimanfaatkan oleh peserta didik terhadap target renstra adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Capaian Indikator Pemanfaatan Produk Penerjemahan

Jumlah buku hasil terjemahan 2022-2024	Jumlah buku hasil terjemahan 2022-2024 yang sudah dinilai	Jumlah buku hasil terjemahan 2022-2024 yang ber-ISBN	Jumlah buku dimanfaatkan 2025	% Jumlah buku dimanfaatkan terhadap total buku	% Jumlah buku dimanfaatkan terhadap total buku ber-ISBN	Target renstra (%)	% capaian terhadap target renstra
95	95	83	23	2,421%	28%	24%	10,088%

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian produk penerjemahan telah dimanfaatkan oleh peserta didik melalui berbagai lembaga pendidikan dan literasi, sebagaimana dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Rincian Pemanfaatan Produk Penerjemahan

No.	Judul Produk Dimanfaatkan	Tahun Terbit	Bentuk Pemanfaatan
1	Peuneurah Plik Nenek	2022	<ul style="list-style-type: none"> • Koleksi perpustakaan dan layanan baca di tempat • Layanan arsip dan akses baca digital • Layanan baca buku penerjemahan digital • Pojok baca digital • Kegiatan membaca nyaring • Kegiatan membaca nyaring peserta didik bersama orang tua
2	Kerawang Gayo Kak Ipak		
3	Pala di Tanah Anak Jamu		
4	Serunya Belajar Tari Ula-Ula Lembing		
5	Serue dan Depik Lut Tawar		
6	Kopiah Riman	2023	
7	Kuda Penemas dan Joki Ungel		
8	Nenek dan Cimpe		
9	Boya Kakek dan Si Bujang Itam		
10	Subang Gadeng Pertama Chandien		
11	Lomba Dayung Sampan		
12	Serunya Bermain ke Lumbung Padi Kakek		
13	Cecah Buatan Ipak		
14	Memanen Madu di Buloh Seuma		
15	Sie Reuboh untuk Cut Kak dan Dek Gam		
16	Nama-Nama Bulan dalam Bahasa Aceh		
17	Berburu Burung Tikusan Sawah		
18	Mari, Mengenal Tsunami Aceh!		
19	Silat Pelintau dari Tamiang		
20	Ayo, Berkunjung ke Museum Kapal Apung!		
21	Ampon dan Layangan		
22	Alut Jawara Anak Saben		
23	Selpah Besaman		

Selanjutnya, hasil perbandingan target dan realisasi, serta perbandingan realisasi T1 dengan target akhir Renstra terhadap IKK 1.2 Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik tahun 2025 disajikan dalam dua tabel sebagai berikut.

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 1.2

SK	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Jumlah Produk Penerjemahan		
		51	53	10,392
		Persentase Produk Dimanfaatkan (%)		
		24	24,21	10,088

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

SK	IKK	Tahun 2022–2024	Tahun 2025			Renstra 2025–2029		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	95 Produk	Jumlah Produk Penerjemahan					
			51 Produk	53 Produk	103,92%	199 Produk	53	26,63%
			Persentase Produk Dimanfaatkan (%)					
			24%	2,421%	100,88%	48%	24,21%	50,43%

Keberhasilan Balai Bahasa Provinsi Aceh dalam mencapai target IKK 1.2 Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik, didukung oleh pelaksanaan rangkaian kegiatan yang terencana dan berkesinambungan, meskipun melalui proses yang panjang dan kompleks. Secara ringkas, tahapan kegiatan yang dilaksanakan meliputi (1) sayembara dan penyusunan bahan terjemahan, (2) penyuntingan, (3) uji keterbacaan, (4) pengajuan ISBN, (5) pencetakan dumi, serta (6) diseminasi dan perhitungan tingkat pemanfaatan. Pelaksanaan seluruh tahapan tersebut memastikan bahwa produk penerjemahan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga benar-benar dimanfaatkan oleh peserta didik sesuai dengan target yang ditetapkan.

1. Sayembara Penulisan dan Penerjemahan Cerita Anak Dwibahasa

Sayembara Penulisan dan Penerjemahan Cerita Anak Dwibahasa merupakan sayembara terbuka yang ditujukan kepada masyarakat yang berdomisili di Provinsi Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaring karya cerita anak dwibahasa jenjang pembaca semenjana (C) yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

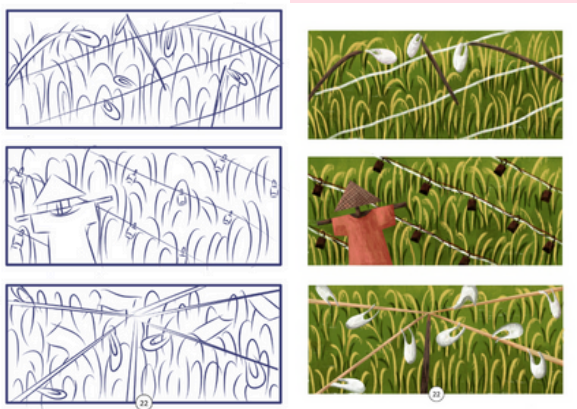
Rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan sayembara ini meliputi (1) pengumuman sayembara, (2) pendaftaran peserta, (3) taklimat kegiatan yang dilaksanakan melalui konferensi video daring (Zoom), (4) pengiriman berkas administrasi, (5) penyusunan naskah dan ilustrasi, (6) pengiriman naskah, (7) penilaian naskah, dan (8) penyuntingan naskah.



Gambar 3.5 Pamflet sayembara

Total keluaran yang dihasilkan melalui pelaksanaan komponen kegiatan ini adalah sebanyak 50 produk bacaan anak dwibahasa (bahasa daerah (Aceh, Gayo, Minangkabau Jamee, Melayu Tamiang, Melayu Singkil, Singkil, Alas, Simolol, Devayan, dan Sigulai) dan bahasa Indonesia).

2. Penyusunan Bahan Terjemahan



Gambar 3.6 Tahap ilustrasi

Penyusunan bahan terjemahan diawali dengan proses pengilustrasian, yaitu pembuatan ilustrasi yang selaras dengan alur cerita, karakter, dan pesan dalam naskah terjemahan agar mudah dipahami dan menarik bagi anak-anak.

Selanjutnya, dilakukan penataan dan pengatakan (layout) teks dan ilustrasi secara terpadu dengan memperhatikan keterbacaan, proporsi visual, dan konsistensi tampilan dwibahasa. Seluruh elemen tersebut kemudian dirangkai menjadi produk dumi berupa buku cerita anak dwibahasa yang utuh, menarik secara visual, dan siap digunakan pada tahap uji keterbacaan serta diseminasi.

3. Uji Keterbacaan



Gambar 3.7 Uji keterbacaan siswa

Kegiatan uji keterbacaan dilaksanakan dengan mengundang target pembaca, yaitu pelajar SD kelas IV–VI, pelajar SMP kelas VII, orang tua, dan guru. Kegiatan ini didampingi oleh pembaca nyaring yang memfasilitasi peserta untuk

membaca secara bersama-sama buku hasil penerjemahan.

Tujuan pelaksanaan uji keterbacaan ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat keterbacaan masing-masing produk penerjemahan sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program sejenis pada masa mendatang.

4. Bimbingan Teknis



Gambar 3.8 Bimbingan teknis

Bimbingan Teknis Penulisan Karya Berbahasa Daerah merupakan kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Aceh untuk meningkatkan kompetensi penulis dalam menghasilkan naskah cerita anak dwibahasa yang bermutu,

sesuai dengan kaidah kebahasaan, karakteristik pembaca anak, serta tujuan penguatan literasi.

Materi bimbingan teknis mencakup pengenalan karakteristik sastra anak, teknik penulisan cerita anak yang komunikatif dan edukatif, prinsip dasar penerjemahan cerita anak dwibahasa, pemilihan kosakata yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, serta integrasi nilai-nilai lokal dan tema pembelajaran kontekstual. Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai alur proses produksi buku cerita anak, mulai dari penulisan naskah hingga siap diterbitkan.

5. Pengajuan ISBN dan Cetak Dumi

Pengajuan ISBN dan cetak dumi merupakan tahapan lanjutan dalam proses produksi produk penerjemahan yang bertujuan untuk memastikan legalitas terbitan serta kesiapan buku sebelum dicetak dan disebarluaskan secara lebih luas. Tahapan ini dilaksanakan setelah naskah melalui proses penyuntingan dan uji keterbacaan.

Pengajuan ISBN dilakukan untuk memberikan identitas resmi pada setiap judul buku cerita anak dwibahasa, sehingga tercatat secara nasional sebagai terbitan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Selanjutnya, dilakukan cetak dumi, yaitu pencetakan buku dalam jumlah terbatas.

6. Diseminasi Produk

Diseminasi produk penerjemahan Balai Bahasa Provinsi Aceh dilaksanakan oleh Tim Kerja Penerjemahan dengan melibatkan Duta Bahasa Provinsi Aceh serta bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan buku cerita anak dwibahasa hasil penerjemahan dikenal, diakses, dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.



Gambar 3.9 Diseminasi Produk Penerjemahan

Diseminasi dilakukan terhadap produk yang telah diterbitkan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Selain sebagai sarana penyebarluasan, kegiatan diseminasi juga dimanfaatkan untuk memperoleh umpan balik dari guru, peserta didik, orang tua, dan pegiat literasi sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas produk dan strategi pemanfaatannya.

Pelaksanaan diseminasi di Balai Bahasa Provinsi Aceh dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan sebagai berikut.

a. Kampanye Pemanfaatan Buku

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan buku terjemahan, Balai Bahasa Provinsi Aceh melakukan kampanye melalui:

- kunjungan ke sekolah-sekolah,
- integrasi dalam kegiatan literasi seperti pameran buku,
- pemanfaatan media sosial dan laman resmi Balai Bahasa Provinsi Aceh,
- kerja sama dengan komunitas literasi dan perpustakaan,
- penyebaran materi publikasi digital (poster dan ulasan buku) baik oleh internal Balai Bahasa Provinsi Aceh maupun pihak eksternal seperti Duta Bahasa Provinsi Aceh.



Gambar 3.10 Kampanye Pemanfaatan Buku

b. Peluncuran Produk Penerjemahan

Kegiatan peluncuran dilaksanakan dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, perwakilan sekolah, serta pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan buku hasil penerjemahan secara luas dan memberikan pemahaman tentang penggunaannya di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

c. Kegiatan Interaktif

Diseminasi juga dikembangkan dalam bentuk lokakarya membaca nyaring, kelas kreatif, sesi bedah buku, diskusi dengan orang tua, serta bentuk interaktif lainnya yang relevan dengan pengguna akhir buku.

Keberhasilan Balai Bahasa Provinsi Aceh dalam mencapai target IKK 1.2 Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan yang matang dan berkesinambungan dari tahap penyusunan hingga pemanfaatan produk penerjemahan.
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, meliputi penulis, penerjemah, penyunting, ilustrator, dan tim pelaksana.
3. Kolaborasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti satuan pendidikan, Duta Bahasa, komunitas literasi, dan instansi terkait.
4. Pemanfaatan media digital resmi pemerintah untuk memperluas akses dan jangkauan pemanfaatan produk penerjemahan.
5. Adanya mekanisme evaluasi dan umpan balik, seperti uji keterbacaan dan masukan dari pengguna, untuk peningkatan kualitas produk dan program.

Gambar 3.11 Kegiatan Penerjemahan



Hambatan, Antisipasi, dan Strategi Pemanfaatan Produk Penerjemahan oleh Peserta Didik

Tabel 3.9 Hambatan, Antisipasi, dan Strategi IKK 1.2

Hambatan	Antisipasi	Strategi
Belum optimalnya kemampuan sebagian penulis dalam menghasilkan teks dwibahasa yang bebas dari kesalahan ejaan, tanda baca, dan kaidah, sehingga memerlukan waktu penyuntingan yang lebih panjang sebelum produk dapat dimanfaatkan oleh peserta didik.	Pelaksanaan penyuntingan berlapis dan penguatan pengawasan mutu kebahasaan pada setiap produk penerjemahan sebelum didistribusikan kepada sasaran.	Meningkatkan kapasitas penulis dan penerjemah melalui bimbingan teknis, klinik kebahasaan, atau lokakarya penulisan dan penerjemahan yang berfokus pada ketepatan ejaan dan keterbacaan teks bagi peserta didik.
Terbatasnya intensitas pendampingan teknis terhadap penulis dan penerjemah dalam proses produksi naskah yang sesuai standar kebahasaan dan kebutuhan pembaca sasaran.	Pemberian umpan balik kebahasaan secara berkelanjutan kepada penulis dan penerjemah untuk meminimalkan kesalahan ejaan dan meningkatkan kualitas naskah.	Mengembangkan pola kemitraan yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk mendorong pemanfaatan produk penerjemahan secara terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran.
Belum optimalnya kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal sosialisasi dan pemanfaatan produk penerjemahan di satuan pendidikan.	Peningkatan koordinasi awal dengan pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan, dalam rangka perencanaan distribusi dan pemanfaatan produk penerjemahan di sekolah.	Memperluas pemanfaatan media digital sebagai sarana diseminasi produk penerjemahan agar lebih mudah diakses oleh peserta didik dan pendidik.
Keterbatasan mekanisme pemantauan pemanfaatan produk penerjemahan di sekolah, sehingga data pemanfaatan belum sepenuhnya terukur secara optimal.	Penguatan dokumentasi dan pelaporan pemanfaatan produk penerjemahan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja.	Menyusun indikator dan instrumen pemantauan pemanfaatan produk penerjemahan guna memastikan ketercapaian target persentase pemanfaatan secara terukur dan berkelanjutan.

SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia

Sasaran Kegiatan (SK 2) Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia bertujuan meningkatkan kemahiran, sikap, dan tanggung jawab penutur bahasa Indonesia terhadap norma dan kaidah kebahasaan, baik lisan maupun tulis. Peningkatan kompetensi diukur melalui Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif berbasis daring dengan pendekatan Multistage Adaptive Testing (MSAT), sehingga hasil pengukuran lebih akurat, objektif, dan efisien. Data UKBI digunakan sebagai dasar penilaian capaian IKU/IKK.

Selain pengukuran, kompetensi penutur juga ditingkatkan melalui pembinaan intensif dan berkelanjutan, yang mencakup penilaian awal, pembekalan materi, pendampingan, dan penilaian akhir secara langsung kepada masyarakat penutur bahasa sasaran. Pelaksanaan pembinaan didukung koordinasi antara pusat dan Balai Bahasa Provinsi Aceh, serta instrumen pengukuran yang menjamin keterukuran capaian secara parsial maupun nasional, sehingga menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembinaan yang tepat sasaran.

Tabel 3.10 Dampak Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 2

Dampak Pelaksanaan Kegiatan	
Meningkatkan kompetensi penutur bahasa Indonesia yang terukur dan berstandar; menghasilkan data kemahiran berbahasa yang akurat sebagai dasar pemetaan kemampuan penutur dan perumusan kebijakan pembinaan bahasa; meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan terhadap pentingnya penguasaan bahasa Indonesia sesuai standar nasional; memperkuat kualitas layanan kebahasaan; berkontribusi pada peningkatan mutu sumber daya manusia dan layanan publik.	Meluasnya jangkauan pemanfaatan buku bacaan bermutu oleh satuan pendidikan dan masyarakat luas tanpa terbatas ruang dan waktu. Meningkatnya minat baca, kemampuan pemahaman bacaan, serta kemampuan bernalar kritis peserta didik.

INDIKATOR KEGIATAN 2.1

Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya

Persentase angka kemahiran berbahasa Indonesia adalah ukuran kinerja yang menggambarkan proporsi peserta uji kemahiran berbahasa Indonesia yang memperoleh predikat kemahiran sesuai dengan standar profesinya terhadap keseluruhan peserta yang mengikuti pengujian dalam tahun 2025. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian kompetensi berbahasa Indonesia penutur pada berbagai kelompok profesi berdasarkan hasil pengujian yang terstandar, objektif dan terukur melalui pelaksanaan UKBI Adaptif.

Metode Perhitungan

Indikator Persentase Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia dihitung dengan membandingkan jumlah peserta yang memperoleh predikat kemahiran berbahasa Indonesia sesuai dengan profesinya terhadap jumlah seluruh peserta yang mengikuti pengujian kemahiran berbahasa Indonesia pada tahun 2025.

Rumus perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

$$\text{Hasil (\%)} = (\text{Jumlah peserta yang sesuai predikat kemahirannya} / \text{Jumlah peserta seluruhnya}) \times 100\%$$

Perbandingan Capaian Target dan Realisasi
Capaian IKK 2.1 Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan
predikat kemahiran berbahasa profesinya

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 2.1

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Tahun 2025		
		Target PK	Realisasi PK	%
[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang Sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya	Persen	41	43	104,87%

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah atau target akhir Rencana Strategis, realisasi tahun 2025 menunjukkan kontribusi positif terhadap pencapaian target Renstra. Capaian ini menjadi bagian dari akumulasi kinerja tahunan yang diharapkan dapat mendorong tercapainya target akhir Renstra secara bertahap dan berkelanjutan.

Program sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan UKBI Adaptif menjadi faktor utama dalam pencapaian target Indikator Kinerja Persentase Penutur Teruji yang Memperoleh Predikat Kemahiran Berbahasa sesuai Profesi. Sosialisasi UKBI Adaptif yang dilaksanakan secara daring dan luring berperan strategis dalam memperluas jangkauan informasi, meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan, serta mendorong partisipasi penutur dari berbagai latar belakang profesi di tingkat kabupaten/kota.

1. Sosialisasi dan Simulasi UKBI Adaptif Secara Luring

Pada tahun 2025, sosialisasi dan simulasi UKBI Adaptif secara luring dilaksanakan di empat kabupaten, yaitu:

- Kabupaten Pidie Jaya
(20 Agustus 2025)
- Kabupaten Aceh Barat
(23–24 September 2025)
- Kabupaten Bireun
(7–8 Oktober 2025)
- Kabupaten Aceh Jaya
(17–19 Desember 2025)



Gambar 3.12 Sosialisasi dan simulasi UKBI di Bireun

2. Kegiatan Sosialisasi dan UKBI Adaptif Secara Daring

Sementara itu, Kegiatan Sosialisasi dan UKBI Adaptif secara daring dilaksanakan di 7 kabupaten di Provinsi Aceh, yaitu:



Gambar 3.13 Sosialisasi Daring UKBI Adaptif di Aceh Barat

- Kota Langsa
- Kota Banda Aceh
- Kabupaten Gayo Lues
- Kabupaten Aceh Barat
- Kabupaten Aceh Tengah

3. Pendampingan Pelaksanaan UKBI Adaptif

Selain sosialisasi, kegiatan pendampingan pelaksanaan UKBI Adaptif di daerah berperan penting dalam memastikan kelancaran proses pengujian, baik dari aspek teknis maupun administratif serta membantu meminimalkan kendala pelaksanaan uji dan menjaga mutu hasil pengujian.

Pendampingan pelaksanaan UKBI Adaptif bekerjasama dengan 3 Dinas Pendidikan Kabupaten di Provinsi Aceh, yaitu:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah
- Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat

Sinergi antara kegiatan sosialisasi dan pendampingan tersebut secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penutur yang mengikuti UKBI Adaptif serta meningkatnya persentase penutur yang memperoleh predikat kemahiran berbahasa sesuai profesinya, sehingga mendukung pencapaian target kinerja indikator secara optimal.

Pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2.1 pada tahun berjalan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi pendorong keberhasilan maupun penyebab belum optimalnya capaian indikator.

a. Faktor Penyebab Keberhasilan

- Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja didukung oleh adanya komitmen dan dukungan pemerintah daerah serta pimpinan instansi sasaran dalam pelaksanaan UKBI Adaptif
- Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman penutur mengenai manfaat UKBI sebagai alat ukur kemahiran berbahasa sesuai profesi, sehingga mendorong meningkatnya partisipasi peserta uji
- Pendampingan teknis yang dilakukan secara langsung membantu kelancaran pelaksanaan pengujian dan menjaga kualitas hasil uji.

b. Faktor Penyebab Kegagalan

- Pencapaian indikator kinerja berpotensi tidak optimal apabila sosialisasi belum menjangkau seluruh pemangku kepentingan atau tidak diikuti dengan tindak lanjut yang memadai.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, kendala jaringan, serta rendahnya komitmen sebagian instansi daerah dapat menghambat partisipasi penutur dan pelaksanaan UKBI Adaptif, yang berdampak pada rendahnya persentase penutur yang mencapai predikat kemahiran berbahasa sesuai profesinya.

Hambatan, Antisipasi, dan Strategi Pemanfaatan Produk Penerjemahan oleh Peserta Didik

Tabel 3.12 Hambatan, Antisipasi, dan Strategi IKK 2.1

Hambatan	Antisipasi	Strategi
Belum meratanya pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota terhadap pentingnya UKBI sebagai alat ukur kemahiran berbahasa berbasis profesi	Penguatan sosialisasi terarah kepada pimpinan di instansi daerah untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap pelaksanaan UKBI Adaptif	Penguatan peran UKBI sebagai instrumen utama dalam peningkatan dan pemetaan kemahiran berbahasa Indonesia berbasis profesi
Kendala teknis dan infrastruktur, khususnya pada pelaksanaan UKBI Adaptif secara daring, seperti keterbatasan jaringan internet, perangkat pendukung, dan kesiapan lokasi uji	Peningkatan kesiapan teknis melalui pendampingan dan penyediaan panduan guna meminimalkan kendala pelaksanaan.	Perlu adanya perluasan pelaksanaan UKBI Adaptif secara daring dan luring untuk meningkatkan aksesibilitas penutur dari berbagai wilayah dan profesi.
Terbatasnya waktu dan sumber daya manusia di daerah, sehingga pelaksana kesulitan menyesuaikan jadwal uji dengan tugas kedinasan dan jumlah pendamping/fasilitator UKBI di kabupaten/kota yang mengurangi efektivitas pelaksanaan UKBI Adaptif	Melakukan penjadwalan yang lebih fleksibel serta pemanfaatan pendampingan daring	Strategi yang dilakukan meliputi penguatan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi pusat dan daerah agar UKBI dipahami sebagai bagian dari pengembangan kompetensi SDM



Gambar 3.14 Pendampingan Pelaksanaan UKBI Adaptif di Aceh Barat

INDIKATOR KEGIATAN 2.2

Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

Indikator Kegiatan (IKK) 2.2 Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai proporsi penutur bahasa Indonesia di wilayah kerja Balai Bahasa Provinsi Aceh yang mengalami peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia setelah mengikuti pembinaan melalui Program Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia (PKBI). Peningkatan kualitas berbahasa ditentukan berdasarkan hasil perbandingan antara penilaian awal dan penilaian akhir yang dilakukan menggunakan instrumen baku yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Aspek yang dinilai meliputi ketepatan penerapan kaidah kebahasaan, kompetensi berbahasa sesuai konteks, serta sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia.

Metode Perhitungan

Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa penutur dilakukan dengan membandingkan nilai pada tes awal dan tes akhir setiap pesuluh. Materi dalam tes awal dan tes akhir adalah materi yang diberikan oleh penyuluh saat pelaksanaan pembinaan. Pesuluh dianggap telah meningkat kualitas berbahasanya apabila memiliki nilai akhir yang lebih tinggi daripada nilai awal. Peningkatan nilai bukan semata-mata didasarkan pada faktor kompetensi pesuluh saja, tetapi harus pula diperhatikan faktor kualitas penyuluh dan faktor bahan ajar juga. Dengan adanya kesadaran bersama mengenai faktor-faktor peningkatan tersebut. Pemenuhan target IKK dapat tercapai walaupun dengan pesuluh yang berbeda setiap tahun. Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai dan jumlah peserta pembinaan, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$\text{PPB} = (\text{PM} \div \text{PT}) \times 100\%$$

Keterangan:

- PPB** = Persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya
- PM** = Jumlah penutur bahasa yang meningkat nilainya
- PT** = Jumlah penutur bahasa terbina

Perbandingan Capaian Target dan Realisasi
IKK 2.2 Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 2.2

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Tahun 2025		
		Target PK	Realisasi PK	%
[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persen	60	74,8	124,66

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia (PKBI) tahun 2025 menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Tingkat capaian PKBI tercatat sebesar 76,43%, sementara target kinerja yang direncanakan sebesar 60%. Perbandingan antara capaian dan target tersebut menunjukkan bahwa kinerja PKBI telah mencapai 127,38% dari target.

Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan PKBI 2025 tidak hanya memenuhi sasaran yang ditetapkan, tetapi juga melampaui target sebesar 27,38%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta keberhasilan strategi pembinaan dalam meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia pada sasaran program.

1. Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia

Pada tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia sebanyak 6 kegiatan dengan jumlah peserta 280 orang. Peserta kegiatan terdiri atas 150 guru Bahasa Indonesia, 80 tenaga administrasi sekolah, dan 50 mahasiswa program studi Bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil perbandingan nilai tes awal dan tes akhir, sebanyak 214 penutur bahasa menunjukkan peningkatan kualitas berbahasa. Dengan demikian, persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya mencapai 76,43%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Aceh efektif dalam meningkatkan kompetensi berbahasa pada kelompok sasaran yang memiliki peran strategis dalam penggunaan dan penyebarluasan bahasa Indonesia.



Gambar 3.15 Peyuluhan di Aceh Timur

Tabel 3.15 Hambatan, antisipasi, dan strategi IKK 2.2

Hambatan	Antisipasi	Strategi
Peserta kegiatan tidak semuanya aktif selama masa pendampingan.	Membuat dan menerapkan metode pendampingan yang lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan agar meningkatkan partisipasi peserta.	Strategi yang ditempuh difokuskan pada penguatan pelaksanaan pendampingan melalui penerapan metode yang lebih interaktif, kontekstual, dan aplikatif dengan memadukan moda daring dan luring
Adanya kendala jaringan pada pelaksanaan tes awal dan tes akhir di beberapa balai/kantor, khususnya di daerah perbatasan.	Berkoordinasi dengan panitia daerah setempat untuk menyediakan dan memastikan ketersediaan jaringan internet yang memadai.	Selain itu, strategi pencapaian target IKK diarahkan pada penguatan aspek teknis pelaksanaan kegiatan.
Jarak waktu yang cukup lama antara pemberian materi dan pelaksanaan tes akhir (akibat adanya pendampingan) menyebabkan peserta yang tidak aktif mengalami kesulitan dalam mengisi tes akhir.	Mengirimkan kembali bahan materi kepada peserta serta menyediakan pengayaan materi sebagai penguatan sebelum tes akhir.	

SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

Sasaran Kegiatan Meningkatkan Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan aktif lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, serta komunitas dalam pengutamaan Bahasa Negara dan pengembangan program kebahasaan dan kesastraan. Lembaga dan komunitas tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek partisipatif yang berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, termasuk dalam pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa daerah, serta pengutamaan penggunaan Bahasa Negara di ruang publik dan dokumen resmi.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya melalui kegiatan Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya melalui kegiatan Komunitas Penggerak Literasi Terbina. Melalui kegiatan tersebut, sasaran diarahkan untuk membangun kesadaran, kepedulian, dan keterlibatan kolektif lembaga dan komunitas dalam pembinaan bahasa dan sastra secara berkelanjutan, guna mewujudkan penggunaan Bahasa Negara yang tertib, bermartabat, dan sesuai kaidah di ruang publik dan dokumen resmi.

Tabel 3.16 Dampak Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 3

Dampak Pelaksanaan Kegiatan		
Memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa resmi negara, dan sarana komunikasi publik yang efektif.	Berkontribusi pada penguatan identitas dan kedaulatan bahasa, serta menumbuhkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia	Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan lembaga terhadap kaidah kebahasaan yang berlaku, sehingga penggunaan bahasa dalam ruang publik dan dokumen menjadi lebih tepat, jelas, dan bermartabat

INDIKATOR KEGIATAN 3.1

Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3.1 adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan persentase lembaga yang telah memperoleh pembinaan kebahasaan dan menunjukkan peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Peningkatan tersebut diukur dengan membandingkan kondisi penggunaan bahasa sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Lembaga terbina adalah instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga layanan publik yang menjadi sasaran program pembinaan bahasa yang telah mengikuti rangkaian kegiatan: sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi, atau evaluasi kebahasaan.

Aspek-aspek penggunaan bahasa yang menjadi tolok ukur kualitas penggunaan bahasa pada lembaga terdiri dari:

- 1. **Ketaatan terhadap kaidah bahasa Indonesia**, meliputi ejaan, pilihan kata, struktur kalimat, dan tata bahasa;
- 2. **Ketepatan penggunaan bahasa dalam dokumen resmi**, seperti surat dinas, papan nama, spanduk, dan publikasi kelembagaan;
- 3. **Kesesuaian ragam bahasa dengan fungsi dan konteks kelembagaan**, khususnya dalam layanan publik dan komunikasi resmi;
- 4. **Konsistensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar** dalam berbagai media komunikasi lembaga

Peningkatan kualitas dinyatakan tercapai apabila hasil penilaian pascapembinaan menunjukkan skor atau kategori yang lebih baik dibandingkan dengan hasil penilaian awal (baseline). Persentase capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah lembaga yang mengalami peningkatan kualitas penggunaan bahasa dengan jumlah keseluruhan lembaga yang dibina.

Metode Perhitungan

Peningkatan kualitas penggunaan bahasa pada lembaga diukur penggunaan bahasa di lanskap dan dokumen yang dibuat oleh lembaga. Selain itu, sikap bahasa juga menjadi komponen yang diperhitungkan dalam peningkatan kualitas penggunaan bahasa pada lembaga tersebut. Proporsi nilai penggunaan bahasa tulis di lanskap, penggunaan bahasa tulis di dokumen, dan sikap bahasa mengacu pada persentase berikut.

Tabel 3.17 Persentase Penilaian Lembaga Terbina

Penilaian	Persentase
Objek Bahasa Tulis di Lanskap	40%
Objek Bahasa Tulis di Dokumen	40%
Sikap Bahasa	20%

Peningkatan kualitas penggunaan bahasa harus dapat terukur secara faktual, yaitu adanya perubahan kualitas menjadi lebih baik dalam hal pengutamaan bahasa negara. Hal tersebut dibuktikan dengan cara menyandingkan kondisi kebahasaan lembaga sebelum dilakukan pembinaan dan kondisi kebahasaan lembaga setelah dilakukan pembinaan.

Perbandingan Capaian Target dan Realisasi Capaian IKK 3.1 Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 3.1

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Tahun 2025		
		Target PK	Realisasi PK	%
[IKK 3.1] Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	Persen	59,93	68	113,46

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan kebahasaan, realisasi capaian indikator ini mencapai 56,67%, yang menunjukkan bahwa (lebih tinggi) dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut diperoleh dari hasil penilaian pascapembinaan terhadap lembaga sasaran yang menunjukkan perbaikan pada aspek ketepatan kaidah bahasa, konsistensi penggunaan bahasa Indonesia, serta kesesuaian ragam bahasa dalam dokumen dan media kelembagaan.

Apabila realisasi melampaui atau memenuhi target, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan berjalan efektif dan mendapat respons positif dari lembaga sasaran. Faktor pendukung capaian tersebut antara lain intensitas pendampingan yang memadai, komitmen pimpinan lembaga, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam layanan publik.

1. Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan

Secara kumulatif, capaian tahun berjalan menjadi landasan yang penting dalam mendukung pencapaian target akhir Renstra. Meskipun demikian, untuk memastikan target jangka menengah dapat tercapai secara optimal, diperlukan penguatan strategi pelaksanaan pembinaan, terutama melalui peningkatan kualitas evaluasi kebahasaan, penguatan komitmen lembaga sasaran, serta perluasan jangkauan pembinaan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, realisasi indikator pada tahun berjalan dapat dinilai berada pada jalur yang selaras dengan target Renstra, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya agar capaian kinerja dapat berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas penggunaan bahasa di lembaga-lembaga sasaran.



Gambar 3.16 Fasilitasi lembaga terbina di Langsa

Pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3.1 pada tahun berjalan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi pendorong keberhasilan maupun penyebab belum optimalnya capaian indikator.

a. Faktor Penyebab Keberhasilan

- **Komitmen dan dukungan pimpinan lembaga sasaran** yang mendorong penerapan rekomendasi kebahasaan secara berkelanjutan dalam dokumen dan media resmi lembaga.
- **Pelaksanaan pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan**, mulai dari pemetaan kondisi awal, pendampingan, hingga evaluasi pascapembinaan, sehingga lembaga sasaran memperoleh pemahaman yang komprehensif.

- **Kualitas sumber daya manusia pelaksana kegiatan**, khususnya tenaga pembina dan pendamping kebahasaan yang kompeten dan berpengalaman.
- **Respons positif dan partisipasi aktif lembaga terbina**, terutama dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kebahasaan dan memperbaiki praktik penggunaan bahasa.
- **Ketersediaan pedoman dan instrumen penilaian kebahasaan yang jelas** sehingga proses pengukuran peningkatan kualitas penggunaan bahasa dapat dilakukan secara objektif dan menyeluruh.

b. Faktor Penyebab Kegagalan atau Kendala

- **Keterbatasan waktu pembinaan dan pendampingan** yang menyebabkan belum seluruh rekomendasi kebahasaan dapat diterapkan secara optimal oleh lembaga sasaran.
- **Perbedaan tingkat pemahaman dan kompetensi kebahasaan di antara lembaga terbina**, sehingga laju peningkatan kualitas penggunaan bahasa tidak seragam..
- **Kurangnya tindak lanjut internal lembaga**, terutama dalam pembaruan dokumen lama atau penyesuaian media publikasi yang telah terlanjur digunakan.
- **Keterbatasan sumber daya pendukung, baik dari sisi anggaran**, jumlah lembaga yang dapat dibina, maupun sarana evaluasi kebahasaan.
- **Faktor eksternal**, seperti perubahan kebijakan internal lembaga sasaran, rotasi pegawai, atau prioritas program lain yang mengurangi fokus terhadap pembinaan kebahasaan.



Gambar 3.17 Fasilitasi lembaga terbina di Langsa

Tabel 3.19 Hambatan, Antisipasi, Strategil KK 3.1

Hambatan	Antisipasi	Strategi
<p>Keterbatasan sumber daya manusia pelaksana kegiatan, baik dari segi jumlah maupun waktu kerja, sehingga intensitas pendampingan terhadap seluruh lembaga sasaran belum dapat dilakukan secara optimal.</p>	<p>Mengantisipasi keterbatasan SDM dengan pengaturan prioritas sasaran dan pemanfaatan waktu pelaksanaan secara lebih efisien.</p>	<p>1) Menetapkan skala prioritas lembaga sasaran berdasarkan tingkat kebutuhan pembinaan.</p> <p>2) Mengoptimalkan metode pendampingan daring atau hibrida untuk memperluas jangkauan layanan.</p> <p>3) Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan daerah untuk mendukung pelaksanaan pendampingan.</p>
<p>Keterbatasan alokasi anggaran, yang berdampak pada terbatasnya jumlah lembaga yang dapat dibina serta frekuensi kegiatan pembinaan lanjutan.</p>	<p>Mengantisipasi keterbatasan anggaran melalui perencanaan kegiatan yang lebih selektif dan efisien.</p>	<p>1) Mengintegrasikan kegiatan pembinaan dengan program/kegiatan lain yang relevan.</p> <p>2) Mendorong partisipasi dan kontribusi lembaga mitra dalam mendukung keberlanjutan pembinaan.</p> <p>3) Mengutamakan pembinaan yang berdampak langsung dan berkelanjutan bagi lembaga sasaran.</p>

INDIKATOR KEGIATAN 3.2

Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya

Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi komunitas penggerak literasi yang mengalami peningkatan kualitas kinerja setelah mengikuti kegiatan pembinaan dan pendampingan literasi. Peningkatan kualitas kinerja tersebut tercermin dari kemampuan komunitas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan literasi secara lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berdampak bagi masyarakat. Indikator ini menggambarkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembinaan komunitas literasi dalam memperkuat peran dan kontribusi komunitas penggerak literasi.

1. Bimtek Pembinaan Komunitas Literasi

Pembinaan merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan mengacu pada proses yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi, kemampuan, dan sikap seseorang atau kelompok agar mencapai tujuan tertentu secara optimal.

Pembinaan biasanya dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, pengarahan, dan pengawasan. Tujuan utama pembinaan adalah:

- mengembangkan kemampuan dan keterampilan, baik secara individu maupun kelompok;
- meningkatkan pengetahuan dan wawasan sehingga seseorang mampu bertindak dan berpikir secara lebih bijak dan profesional;
- menanamkan nilai, sikap, dan perilaku positif, yang sesuai dengan tujuan organisasi, institusi, atau komunitas;
- mendorong kemandirian agar individu atau kelompok mampu mengelola potensi yang dimiliki.



Gambar 3.18 Bimtek literasi Aceh Barat Daya

Secara umum, pembinaan adalah usaha membangun dan memberdayakan, tidak sekadar memberi arahan, tetapi juga membimbing secara aktif agar terjadi pertumbuhan yang nyata.

2. Komunitas Penggerak Literasi

Komunitas Penggerak Literasi adalah komunitas penggerak yang diinisiasi oleh dan untuk masyarakat dalam rangka pengembangan enam kemampuan literasi dasar, terutama literasi baca tulis. Komunitas penggerak literasi merupakan komunitas yang menyemai konsep literasi di masyarakat secara aktif. Komunitas penggerak literasi merupakan penghubung yang dapat menerjemahkan secara lebih sederhana tentang definisi literasi dan membantu menanamkan literasi yang mengakar untuk masyarakat.

Komunitas penggerak literasi merupakan komunitas yang dapat menginternalisasi nilai-nilai literasi yang mengakar di masyarakat. Keefe & Copeland (2011) memberikan pemahaman ada lima inti dari prinsip literasi yakni (1) semua orang harus memiliki kemampuan literasi sejak dini, (2) literasi merupakan hal fundamental yang menjadi bagian dalam diri manusia, (3) literasi bukan semata-mata tentang manusia sebagai individu, namun literasi sebagai penghubung manusia dengan orang lain, (4) literasi yang berlandaskan komunikasi dan interaksi mampu membangkitkan potensi seseorang untuk lebih berdaya, (5) literasi menghimpun segala kepekaan manusia untuk menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari komunitas yang memiliki tugas untuk mengembangkan sebuah komunikasi dan menangkap informasi dengan lebih baik.

Setelah peserta mengikuti pendampingan selama dua bulan, balai/kantor melaksanakan pertemuan daring melalui zoom meeting yang dipimpin oleh ketua panitia balai/kantor di hari terakhir. Dalam kegiatan tersebut peserta dan narasumber wajib hadir. Dengan demikian, proses pendampingan ini tidak hanya menjadi sarana diskusi, tetapi juga evaluasi.

1. Panitia balai/kantor bahasa sudah menyediakan link tautan dan *Gdrive*, *Google Form* untuk mengisi Instrumen Evaluasi Kinerja Akhir peserta pembinaan Komunitas Penggerak Literasi.
2. Peserta mengunggah Instrumen Evaluasi Kinerja Akhir berupa data dukung hasil pendampingan melalui link tautan yang sudah disediakan oleh panitia balai/kantor bahasa. Pengisian instrumen evaluasi akhir kinerja manajerial komunitas literasi ini dilaksanakan dalam durasi 30 menit.

Bimtek pembinaan komunitas literasi mendorong para penggiat atau pengelola supaya lebih berperan aktif dalam pengelolaan komunitas literasi dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten dan sudah mumpuni di bidangnya.

Hasil evaluasi kinerja komunitas literasi yang mencapai 73% menunjukkan bahwa bimtek pembinaan komlit pada tahun 2025 ini mampu membantu para pengelola komunitas literasi untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Terdapat 40 komunitas literasi dari 55 komunitas literasi yang mengikuti bimtek yang nilainya meningkat. Sisanya, sebanyak 15 komunitas literasi atau 27 % yang nilainya tetap.

Evaluasi kegiatan pembinaan yang telah dilakukan menggunakan instrumen evaluasi penilaian program pembinaan komunitas literasi secara keseluruhan. Data evaluasi yang diambil merupakan data kualitatif dari pengisian kuisioner yang menjadi tolok ukur keberhasilan program pembinaan komunitas literasi. Hasil dari instrumen tersebut dipadukan dengan data statistik sederhana, yaitu dengan menggunakan Skala Likert (Sugiono, 2017) dengan rentang penilaian 1—4. Skala penilaian yang digunakan sebagai berikut.

- 4 = Sangat Baik
- 3 = Baik
- 2 = Cukup
- 1 = Tidak Baik

Kriteria perhitungan hasil yang didapatkan menggunakan skor rata-rata, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Skor Hasil Pengumpulan Data}}{(\text{Jumlah Butir Penilaian} \times \text{Jumlah Poin Tertinggi})} \times 100\%$$

Selanjutnya panitia balai dan kantor menafsirkan data kualitatif menjadi data kuantitatif yang menggunakan acuan berikut ini:

Rentang Skor	Interpretasi
0- 25%	Tidak Baik
>25%-50 %	Cukup
>50%- 75%	Baik
>75%-100%	Sangat Baik

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 3.2

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Tahun 2025		
		Target PK	Realisasi PK	%
[IKK 3.2] Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya	Persen	50	73	146%

SASARAN KEGIATAN 4

Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan acuan kebahasaan melalui pengayaan daya ungkap bahasa Indonesia dan penyusunan produk kodifikasi bahasa daerah yang tervalidasi. Pengayaan bahasa Indonesia dilakukan dengan menambahkan leksikon dari bahasa daerah. Selain untuk memperkaya daya ungkap bahasa Indonesia, bahasa daerah diinventarisasi guna penyusunan kamus bahasa daerah, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Untuk mencapai target kinerja tersebut, indikator kinerja kegiatan yang digunakan adalah persentase penambahan produk pengembangan bahasa dan sastra yang tervalidasi. Target ini dicapai melalui dua komponen utama:

1. **Pemeriksaan Kosakata**
2. **Pengembangan Kamus**

Pemeriksaan kosakata merupakan kegiatan pengayaan kosakata bahasa Indonesia dengan menambahkan kosakata baru yang berasal dari bahasa-bahasa-bahasa daerah. Pada tahun 2025, bahasa daerah yang menjadi objek analisis kosakata potensial untuk diusulkan agar masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjadi kosakata baru bahasa Indonesia adalah bahasa Gayo.

Pada saat yang bersamaan, kegiatan inventarisasi bahasa daerah sebagai bagian dari upaya penyusunan kamus bahasa daerah juga dilakukan. Pengembangan kamus difokuskan pada penyusunan kamus bahasa daerah di Provinsi Aceh. Pada tahun ini, kegiatan pengembangan kamus bersumber dari kosakata bahasa Gayo. Produk yang dihasilkan meliputi Kamus Kopi Gayo-Indonesia serta pemutakhiran entri kosakata bahasa Gayo dalam Kamus Digital Bahasa Daerah Aceh (KBDA). Kedua komponen ini saling mendukung untuk meningkatkan kualitas produk pengembangan bahasa dan sastra dan berkontribusi pada pelestarian dan pemanfaatan produk bahasa daerah.

Penerima manfaat dari keluaran produk pengembangan bahasa dan sastra yang tervalidasi adalah para pemangku kepentingan di bidang kebahasaan dan kesastraan, antara lain pengambil kebijakan di bidang kebahasaan dan kesastraan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, akademisi, siswa, penulis, peneliti kebahasaan, media massa, serta masyarakat umum.

Tabel 3.21 Dampak Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 4

Dampak Pelaksanaan Kegiatan		
Tersedianya acuan kebahasaan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum	Tersedianya informasi yang komprehensif bagi masyarakat yang berminat menggeluti bidang perkopian	Dapat digunakan sebagai bahan pengembangan dan penelitian kebahasaan

**INDIKATOR
KEGIATAN 4.1**

Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Produk pengembangan bahasa adalah produk hasil kodifikasi norma kebahasaan yang disusun oleh Balai Bahasa Provinsi Aceh untuk menjadi acuan kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, dan acuan kebahasaan lain. Manfaat produk pengembangan bahasa adalah sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara, produk pengembangan sastra adalah produk yang dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan lain sehingga dapat digunakan secara lebih meluas dan dapat diakses secara lebih cepat oleh masyarakat. Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra berupa, antara lain; buku prosiding, buku bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku acuan, buku pedoman, buku pengayaan pembelajaran sastra, produk alih wahana, dan produk digitalisasi sastra (vlog, video, pangkalan data sastra).

Metode Perhitungan

$$PPP = \frac{PB}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

- PPP** = Persentase penambahan produk pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi
- PB** = Jumlah produk baru pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi
- PA** = Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang sudah ada
- SATUAN** = Persentase

Dengan tipe perhitungan kumulatif

Perbandingan Capaian Target dan Realisasi
Capaian IKK 4.1 Persentase Penambahan Produk
Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Tabel 3.22 Perbandingan capaian target dan realisasi IKK 4.1

No	SK	IKK	Tahun 2024	Tahun 2025	
				Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	3 produk	11,55%	37,5%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 indikator kinerja berbasis jumlah, sedangkan pada tahun 2025 indikator kinerja disesuaikan menjadi berbasis persentase dengan target sebesar 11,55%. Capaian kinerja tahun 2025 tersebut menunjukkan tingkat realisasi yang melampaui target tahunan yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis dalam Renstra 2025–2029.

Pada tahun 2025 capaian realisasi kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh adalah sebanyak 37,5% yang meliputi:

1. **Pemeriksaan kosakata bahasa Indonesia melalui usulan bahasa Gayo**
2. **Penyusunan Kamus Kopi Gayo-Indonesia**
3. **Penambahan entri bahasa Gayo dalam Kamus Digital Bahasa Daerah Aceh (KBDA)**

Perbandingan capaian kinerja antartahun tidak dapat dilakukan secara langsung karena perbedaan satuan pengukuran. Namun, apabila ditelusuri kembali total produk pada tahun 2024 dan 2025 berjumlah sama, yaitu 3 produk. Produk pengayaan kosakata yang diusulkan ke KBBI pada tahun 2025 adalah 608 entri.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, terdapat dua komponen utama yang mendukung ketercapaian target, yaitu pemerikayaan kosakata dan pengembangan kamus.

1. **Pemeriksaan Kosakata**

A. Pengumpulan dan Pengolahan Kosakata Bahasa Daerah

Lokus pengumpulan kosakata bahasa Gayo terbagi menjadi 4 kabupaten/kota, yaitu 1) Kabupaten Gayo Lues, 2) Kabupaten Aceh Tengah, 3) Kota Banda Aceh, dan 4) Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan dilaksanakan pada,

1. Kabupaten Aceh Tengah : 19–23 Februari 2025
2. Kabupaten Gayo Lues: 26–30 Mei 2025
3. Kabupaten Bener Meriah : 21–25 Juli 2025
4. Kota Banda Aceh : 30 Juli–1 Agustus 2025



Gambar 3.19 Pengumpulan kosakata Gayo di Aceh Tengah

B. Lokakarya Kosakata Bahasa Daerah

Lokakarya bahasa daerah bertujuan untuk menyeleksi, memverifikasi, dan menyunting hasil kosakata bahasa daerah hasil inventarisasi untuk diusulkan ke KBBI. Kriteria kosakata bahasa daerah untuk menjadi kosakata bahasa Indonesia, yaitu 1) unik, 2) eufonik, 3) seturut kaidah bahasa Indonesia, 4) tidak berkonotasi negatif, dan 5) kerap digunakan. Keluaran kegiatan ini adalah daftar hasil verifikasi kosakata yang sudah disunting.



Gambar 3.20 Lokarkarya kosakata bahasa daerah

Lokakarya dilakukan dengan format diskusi kelompok terpumpun yang terbagi menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok membahas kosakata bahasa Gayo yang telah diinventarisasi sebelumnya. Pada tahap ini masih terbuka kemungkinan masuknya usulan kosakata baru. Dalam kegiatan ini juga terdapat paparan oleh narasumber tentang tata bahasa Gayo. Narasumber merupakan penutur jati bahasa Gayo yang berprofesi sebagai dosen di IAIN Takengon.

C. Sidang Komisi Bahasa Daerah

Rangkaian terakhir dari proses pengusulan kosakata bahasa daerah untuk memperkaya KBBI adalah Sidang Komisi Bahasa Daerah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memeriksa dan memberi umpan balik atas hasil verifikasi kosakata hasil inventarisasi dalam lokakarya. Keluaran dari kegiatan ini adalah daftar usulan entri ke KBBI yang tervalidasi.

Kegiatan SKBD dilaksanakan di Perpustakaan Wilayah Provinsi Aceh, Banda Aceh, tanggal 23–24 September 2025. Partisipan SKBD berjumlah 10 orang, terdiri atas 2 orang tim redaksi KBBI dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa, 2 orang penutur bahasa Gayo, pimpinan, 2 orang panitia, dan 4 orang pegawai dari Balai Bahasa Provinsi Aceh.



Gambar 3.21 Sidang komisi bahasa daerah di Banda Aceh

Berdasarkan Berita Acara Sidang Komisi Bahasa Daerah tahun 2025, terdapat i) 608 kosakata bahasa Gayo yang berpotensi dijadikan entri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (ii) 143 kosakata bahasa Gayo yang ditolak karena entri dan makna telah ditemukan di dalam KBBI, tetapi terdapat 3 entri yang dapat diusulkan perbaikan maknanya, dan (iii) 64 kosakata tambahan bahasa Gayo yang akan diverifikasi kembali sebelum diusulkan sebagai entri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Total kosakata Gayo yang dibahas dalam Sidang Komisi Bahasa Daerah berjumlah 815 kosakata. Berikut ini beberapa kosakata bahasa Gayo yang diterima masuk ke KBBI:

Tabel 3.23 Kosakata bahasa Gayo yang diterima masuk ke KBBI

No	Kosakata	Kelas Kata/ Jenis	Makna
1	atur	n	pranata dalam adat Gayo yg berfungsi untuk mengatur tata kehidupan masyarakat
2	Abisia 3	n	tanaman kopi yg menghasilkan biji dng ukuran yg lebih besar dan panjang dr biasanya
3	abun	n	sesuatu yg dilebihkan dr ukuran standar (tt perkataan, tali, kayu, dsb)
4	acuk	v	mengayun tangan spt hendak memukul, tetapi tidak kena, biasanya karena kesal
5	alang bertulung beret berbantu	ukp	tolong menolong sesama warga, baik material maupun tenaga dalam berbagai hal, makna harfiah 'sayang menolong, berat membantu'
6	alas belintem	n	tikar anyaman dr kertan, diberi pewarna yg berwarna-warni, berukuran sekitar 1x1,5 meter, biasanya digunakan dalam acara adat atau untuk tamu kehormatan
7	alas tetopang	n	tikar anyaman dr kertan atau beldem yg tidak diwarnai, biasanya berukuran sekitar 1x1 meter, biasanya sbg alas tidur
8	am	n	satuan ukuran untuk benda berbentuk serbuk, msl gula atau kopi, setara seperempat kilogram
9	ampar	n	padi yg sudah berbuah semua dalam satu sawah tetapi belum tua
10	amur	n	butiran makanan yg berjatuhan, biasanya pd anak-anak
11	gayong	n	tuturan dr dukun yg dapat menyebabkan orang lain mengalami sesuatu yg buruk
12	ancong	n	perpaduan bahan untuk menambahkan rasa, msl gula pd kopi atau gulai dr beberapa jenis sayuran
13	angkap sentaran	n	wali dr pihak perempuan mendatangi wali dr mempelai laki-laki untuk menikahkan putrinya dalam status perkawinan angkap
14	angkul-angkul	n	perangkap untuk menangkap babi atau rusa, berupa tali yg diikat di kayu berat yg dipotong, tali akan mencekik leher hewan
15	ane-ane	n	hewan kecil bersayap menyerupai tawon, tidak menyengat, dan tidak menghasilkan madu, berukuran sedikit lebih panjang dr butir beras, berwarna kuning dng garis-garis hitam, serta membuat sarang dr tanah yg dibawanya ke pohon kayu

2. Pengembangan Kamus

A. Penyusunan Kamus Kopi Gayo-Indonesia

Salah satu upaya pendokumentasian kosakata bahasa daerah adalah melalui penyusunan kamus bahasa daerah. Tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Aceh melakukan penyusunan kamus yang berjudul Kamus Kopi Gayo-Indonesia. Kamus ini memuat 156 lema yang disusun berdasarkan bidang dan tahapan pengolahan, di antaranya tanaman kopi, pembenihan kopi, perawatan tanah, perawatan batang, pemanenan kopi, penggilingan kopi, pengeringan kopi, jenis kopi pascapanen, cara membawa kopi, alat yang digunakan, dan jenis kopi berdasarkan penyajian. Kamus ini dirancang dengan memadukan elemen visual dan linguistik untuk membantu pengguna memahami makna secara konkret.

Penyusunan kamus ini bertujuan untuk menyediakan referensi leksikografi. Lebih jauh, kamus ini sebagai upaya untuk mendukung Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bahasa Aceh yang mengamanatkan bahasa daerah di Provinsi Aceh diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, khususnya bagi pelajar tingkat dasar dan menengah. Selanjutnya, kamus ini dapat digunakan untuk mendukung pengembangan bahasa Gayo atau penelitian kebahasaan.

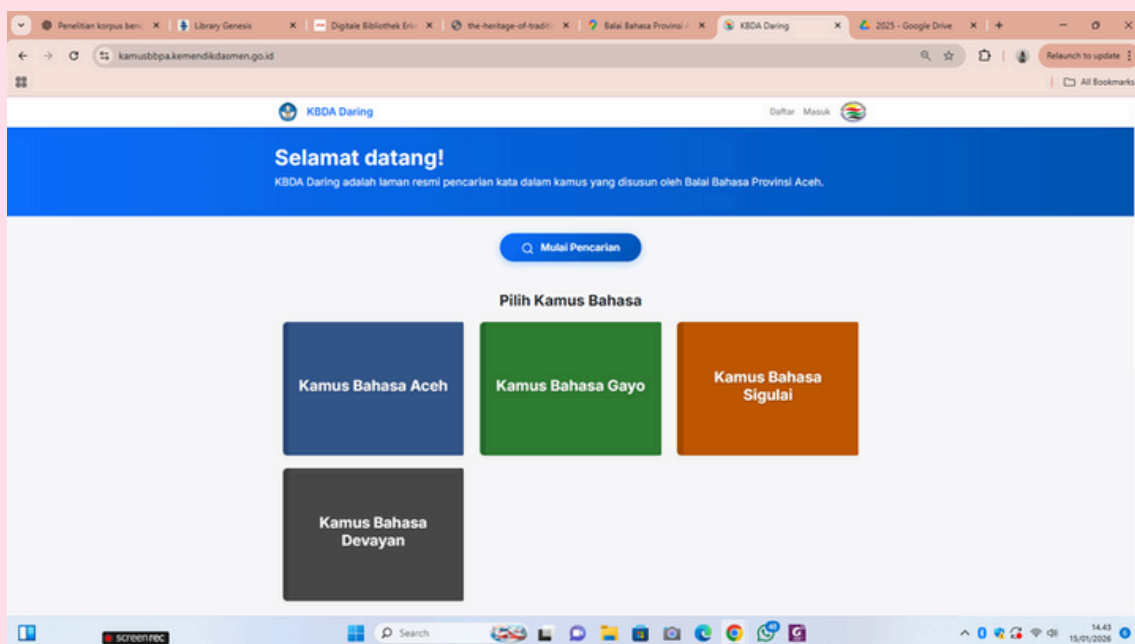
Kamus ini telah melalui proses penyuntingan bersama penyunting kamus yang merupakan akademisi di bidang kebahasaan serta praktisi di bidang pertanian. Selain itu, kamus cetak ini telah memperoleh ISBN dan divalidasi oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.



Gambar 3.22 Kamus Kopi Gayo-Indonesia

B. Pemutakhiran Kosakata Bahasa Gayo dalam Kamus Digital (KBDA)

Balai Bahasa Provinsi Aceh memiliki kamus digital, yaitu Kamus Bahasa Daerah Aceh (KBDA) yang dapat diakses melalui tautan **kamusbbpa.kemendikdasmen.go.id**. Kamus digital ini memuat kosakata bahasa daerah di Provinsi Aceh. Laman tersebut telah diresmikan sejak tahun 2021. Kamus digital ini bersifat jangka panjang dan senantiasa diperbaharui. Pemutakhiran yang dilakukan dalam kamus digital ini adalah pemutakhiran kosakata bahasa Gayo dan pemutakhiran teknis laman. Tahun ini, bertambah 982 kosakata bahasa Gayo dalam kamus digital sehingga total entri dalam KBDA berjumlah 5.386 lema. Kosakata yang ditambahkan terkait jenis kopi dan cara pengolahannya. Terkait pemutakhiran teknis laman, telah dilakukan pemutakhiran (update): tampilan per kategori bahasa dan alfabetis dan grafik statistika per kategori serta penambahan fitur: pencarian dwibahasa, dukungan multimedia audio dan gambar, integrasi internal ke **kemendikdasmen.go.id**, dan fitur impor data melalui file template.



Gambar 3.23 Laman KBDA

Faktor Pendukung Keberhasilan

- Narasumber dan peserta kegiatan mumpuni dalam menjelaskan definisi kosakata bahasa daerah dan menggali konsep kosakata yang unik untuk berpotensi masuk KBBI.
- Tersedianya referensi tertulis dalam bahasa daerah tersebut untuk memudahkan penyusunan instrumen pencarian data dan pendefinisian kosakata
- Pelaksana memiliki kemampuan linguistik dalam melakukan inventarisasi kosakata hingga penyusunan kamus.

Tabel 3.24 Hambatan, antisipasi, strategil KK 4.1

Hambatan	Antisipasi	Strategi
Penurunan Potensi Pengayaan KBBI melalui Kosakata Daerah	Mengidentifikasi keterbatasan sumber data sejak awal dan menyiapkan sumber rujukan alternatif	Melakukan pengambilan data melalui studi pustaka untuk menambah data usulan KBBI
Penulisan kata serapan bahasa daerah di KBBI tidak konsisten	Melakukan evaluasi awal terhadap pola penulisan kosakata daerah yang sudah masuk KBBI	Berkoordinasi dengan tim redaksi KBBI untuk menyusun panduan penulisan kosakata bahasa daerah untuk pengusulan ke KBBI yang mengakomodasi ciri khas bahasa daerah agar sesuai kaidah bahasa Indonesia.
Kesulitan dalam mengategorikan bahasa dan dialek secara tepat, terutama di wilayah Provinsi Aceh yang memiliki keragaman linguistik tinggi	Menyusun kerangka klasifikasi awal sebagai acuan kerja lapangan	Melakukan pemetaan ulang terhadap bahasa dan dialek daerah secara menyeluruh untuk mendukung klasifikasi yang lebih akurat dalam KBBI.
Munculnya ketegangan atau kegaduhan sosial di masyarakat yang dapat menghambat proses dokumentasi bahasa, menurunkan kepercayaan publik, dan menunda penerbitan produk leksikografi.	Membangun komunikasi awal dan pendekatan persuasif kepada masyarakat setempat	Melibatkan pemangku kepentingan lokal, tokoh adat, dan ahli bahasa dalam proses klasifikasi dan validasi bahasa. Selain itu, penting untuk menyosialisasikan pendekatan ilmiah yang digunakan secara terbuka agar proses ini dipahami dan diterima secara luas.

Hambatan	Antisipasi	Strategi
Honor informan tidak mencerminkan beban kerja yang sesungguhnya	Menginventarisasi beban kerja informan dan membandingkannya dengan standar pembiayaan	Mengusulkan agar pembiayaan honor informan dimasukkan dalam SBM sebagai acuan resmi, serta menyesuaikan besaran honor agar proporsional dengan kontribusi dan beban kerja informan.
Jumlah kosakata yang dikumpulkan tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya	Mengantisipasi keterbatasan narasumber dan kondisi lapangan sejak tahap perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan awal lokasi dan calon narasumber dengan bantuan instansi daerah. 2. Menyiapkan narasumber alternatif di wilayah sekitar. 3. Bekerja sama dengan pemerintah daerah/ universitas lokal untuk menjembatani komunikasi. 4. Menjadwalkan kegiatan lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan kondisi narasumber lanjut usia
Cedera fisik pada petugas, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, serta tambahan biaya pengobatan dan perawatan	Mengidentifikasi risiko kerja lapangan dan menyiapkan mitigasi sejak awal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menerapkan SOP keselamatan kerja lapangan. 2. Menyediakan perlengkapan keselamatan kerja (sepatu boot, jas hujan, helm, kotak P3K, dll). 3. Melakukan pelatihan singkat keselamatan kerja bagi anggota tim. 4. Menunjuk pendamping lokal yang memahami medan. 5. Menjamin perlindungan asuransi atau BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas lapangan.
Hambatan komunikasi dengan narasumber menyebabkan data tidak lengkap atau tidak akurat, serta memperpanjang waktu pelaksanaan kegiatan.	Mengantisipasi perbedaan bahasa dan latar budaya sebelum pengumpulan data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan minimal satu anggota tim yang menguasai bahasa daerah sebagai pendamping utama. 2. Menjalin kerja sama dengan instansi daerah / lembaga adat untuk bantuan penerjemahan. 3. Meningkatkan kompetensi bahasa daerah tim melalui pelatihan singkat
Hasil inventarisasi kurang maksimal, verifikasi data tidak menyeluruh, dan kualitas data berpotensi menurun	Menyesuaikan target waktu dengan kapasitas tim dan kondisi geografis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun jadwal lebih realistis dengan mempertimbangkan waktu kerja tim dan jarak lokasi. 2. Membuat rencana kerja cadangan jika terjadi keterlambatan

Hambatan	Antisipasi	Strategi
Kegiatan tertunda dan tidak berjalan secara optimal, target tahunan kemungkinan tidak tercapai, dan tim tidak dapat melaksanakan tugas lapangan	Mengantisipasi kemungkinan pemblokiran anggaran dalam perencanaan tahunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan pihak keuangan pusat terkait status blokir. 2. Menyiapkan skenario kegiatan alternatif dengan sumber dana berbeda (misal kerja sama instansi lain). 3. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan hingga anggaran tersedia
Pemeliharaan laman digital kamus harus disesuaikan dengan kebijakan pembaruan domain dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Memantau perubahan regulasi dan kebijakan kelembagaan secara berkala	Mengajukan clearance agar pemeliharaan aplikasi dapat dibiayai
Target berubah dari rencana awal yang telah ditetapkan dan pola kerja yang berbeda-beda antar satuan kerja	Menyelaraskan rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan sejak awal	Melaksanakan kegiatan sesuai RKAKL serta berkoordinasi dengan pimpinan dan tim kerja perkamusan di pusat
Efisiensi kerja menurun, waktu input data bertambah, dan risiko kesalahan data meningkat	Mengantisipasi potensi tumpang tindih sistem dan format data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun mekanisme sinkronisasi data antar sistem (KBBI-KBDA). 2. Membuat format unggah seragam. 3. Meningkatkan koordinasi antara tim IT dan tim data

SASARAN KEGIATAN 5

Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

Sasaran kegiatan Meningkatkan Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra adalah meningkatnya cakupan dan kualitas upaya pelindungan bahasa dan sastra melalui penambahan data dan perluasan jangkauan fasilitasi kepada komunitas penutur bahasa atau isolek daerah. Sasaran ini difokuskan pada penambahan titik pengamatan pengambilan data bahasa, khususnya pada komunitas penutur yang berada pada wilayah dengan jarak sekurang-kurangnya 20 km dari titik pengamatan terdekat, sebagai upaya memperluas pemetaan dan pendokumentasian bahasa daerah.

Selain itu, sasaran kegiatan ini mencakup terwujudnya pelindungan, pelestarian, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah serta bahasa Indonesia agar tetap hidup, berfungsi secara optimal, dan menjadi bagian integral dari identitas budaya nasional. Sasaran tersebut diarahkan terutama pada bahasa yang berstatus kritis atau terancam punah melalui kegiatan revitalisasi, pendokumentasian digital melalui registrasi bahasa, serta peningkatan penggunaan bahasa di ruang publik dan pendidikan. Secara lebih luas, sasaran kegiatan ini juga mencakup penumbuhan sikap positif terhadap bahasa dan sastra, peningkatan kegairahan berbahasa, serta penguatan pemahaman dan apresiasi budaya melalui karya sastra.

Tabel 3.25 Dampak Sasaran Kegiatan 5

Dampak Pelaksanaan Kegiatan		
Pemetaan bahasa dalam peta kebinekaan memberikan dampak positif terhadap upaya pelindungan dan pelestarian kebinekaan linguistik di Provinsi Aceh	Data yang valid dan terverifikasi menjadi landasan perumusan kebijakan kebahasaan, perencanaan program pembinaan, serta pengembangan literasi berbasis bahasa daerah	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya menjaga keberadaan bahasa daerah sebagai kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat Indonesia yang bhineka ini
Dapat mengukur perbedaan bahasa secara kuantitatif sehingga hubungan dan batas isolek dapat ditentukan secara objektif dan ilmiah	Anak usia SD dan SMP memiliki sikap positif terhadap bahasa daerahnya	Pemerintah Daerah memiliki rasa peduli untuk melindungi bahasa daerahnya
Beberapa daerah mulai menjadikan bahasa daerah sebagai muatan lokal	Guru dan pegiat bahasa daerah mulai termotivasi dalam mengajarkan kepada para siswa	Pemberitaan media tentang pentingnya pelindungan bahasa dan sastra daerah mulai berkembang

INDIKATOR KEGIATAN 5.1

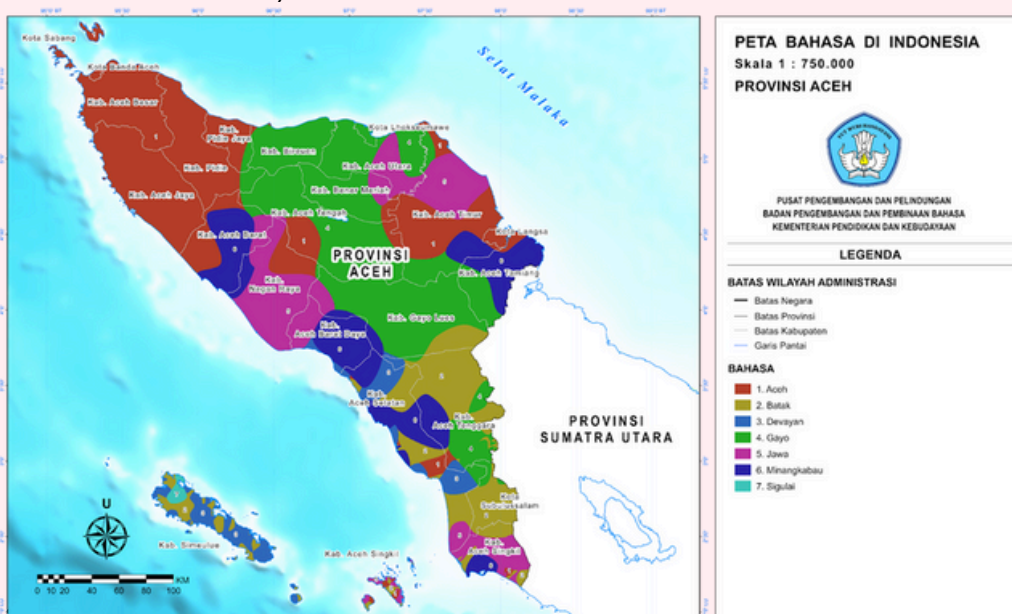
Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan

Sasaran kegiatan ini secara umum adalah (1) penambahan bahasa melalui penambahan titik pengamatan (TP) pengambilan data bahasa, (2) subjek yang disasar adalah komunitas penutur bahasa/isolek daerah yang berjarak sekurang-kurangnya 20 km dari titik pengamatan terdekat. Komunitas penutur yang dimaksud juga harus memenuhi kriteria narasumber dalam penelitian dialektologi yang ditentukan oleh tim pakar, yaitu:

- penduduk asli, pria/wanita;
- jika menikah, pasangannya juga orang asli setempat, bukan pendatang.
- usia \pm 40 tahun;
- alat dengar & alat ucap sempurna (tidak ompong, cadel, atau ;
- pendidikan maksimum SD;
- pekerjaan (menetap), petani, nelayan, dsb;
- jarang bepergian;
- ramah, tidak pemalu.

Pemetaan bahasa di Provinsi Aceh telah dilakukan sejak tahun 1993, dilanjutkan pada 1996, lalu 2008–2013, 2019–2012, dan kembali dilakukan pada 2025. Tujuan awalnya adalah mengidentifikasi dan memetakan bahasa daerah di Indonesia (dalam hal ini Aceh) yang memiliki lanskap linguistik yang beragam. Keberagaman ini dianggap sebagai warisan yang perlu didata, didokumentasikan, dan dipetakan agar dapat dilindungi, dibina, dan dikembangkan.

Hingga saat ini, entitas petuturan masyarakat di Provinsi Aceh yang berlabel bahasa terpetakan sebanyak 7 bahasa, yaitu bahasa Aceh, bahasa Gayo, bahasa Minangkabau, bahasa Batak, bahasa Devayan, bahasa Sigulai, dan bahasa Jawa. Ketujuhny telah dimuat dalam peta bahasa daerah nasional (tergambar dalam peta bahasa berikut).



Gambar 3.24 Peta bahasa di Aceh

Tim pemetaan Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan pemetaan di sepuluh Titik Pengamatan (TP) sesuai target tahun 2025. TP dalam pemetaan bahasa adalah tingkat desa/kampung/kelurahan. TP memperhitungkan faktor jarak lebih dari sama dengan (\geq) 20 km dari TP terdekat. TP yang dipetakan tahun 2025 adalah

Tabel 3.26 Sepuluh titik pengamatan tim Balai Bahasa Provinsi Aceh

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Bahasa/Isolek
1	Lugu Sebahak	Teluk Dalam	Simeulue	Isolek Simolol
2	Salur	Teupah Barat	Simeulue	Isolek Devayan
3	Badegong	Teupah Selatan	Simeulue	Isolek Devayan
4	Sigulai	Simeulue Barat	Simeulue	Isolek Sigulai
5	Meunafa	Salang	Simeulue	Isolek Sigulai
6	Langi	Alafan	Simeulue	Isolek Lekon
7	Sinabang	Simeulue Timur	Simeulue	Bahasa Minangkabau
8	Sawang	Setia Bhakti	Aceh Jaya	Bahasa Aceh
9	Teupin Asan	Darul Hikmah	Aceh Jaya	Bahasa Aceh
10	Alue Tho	Krueng Sabee	Aceh Jaya	Bahasa Aceh



Gambar 3.25 Tim Balai Bahasa Provinsi Aceh di lokasi TP

Pemetaan bahasa dalam peta kebinekaan memberikan dampak positif terhadap upaya perlindungan dan pelestarian kebinekaan linguistik di Provinsi Aceh. Data yang valid dan terverifikasi menjadi landasan perumusan kebijakan kebahasaan, perencanaan program pembinaan, serta pengembangan literasi berbasis bahasa daerah. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya menjaga keberadaan bahasa daerah sebagai kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat Indonesia yang bineka ini.

Dampak langsung dari pengambilan data bahasa ini adalah (1) memungkinkan Badan Bahasa atau Balai Bahasa untuk menentukan batas isolek secara objektif berdasarkan persentase leksikal, fonologis, atau gramatikal antarwilayah, (2) dapat menjustifikasi klasifikasi label beda bahasa, beda dialek, beda subdialek, atau tidak ada perbedaan, (3) setelah dihitung dialektometri, hasilnya akan memberikan gambaran seberapa dekat atau jauhnya hubungan linguistik antarwilayah tutur. Secara singkat, kita jadi dapat mengukur perbedaan bahasa secara kuantitatif sehingga hubungan dan batas isolek dapat ditentukan secara objektif dan ilmiah.

Penjelasan definisi operasional Indikator Kinerja

Persentase penambahan bahasa, sastra, dan aksara adalah ukuran penambahan entitas dalam peta kebinekaan yang di dalamnya juga meliputi seluruh hasil dialektometri berupa beda dialek, beda subdialek, dan beda wicara. Adapun hasil dialektometri kegiatan pemetaan bahasa tahun 2025 adalah

Tabel 3.27 Dialektometri kegiatan pemetaan bahasa tahun 2025

No	Kode Desa	% Min (sama)	% Plus (beda)	Hasil Dialektometri
1	1/2	9.25%	90.75%	Beda Bahasa
2	1/3	11.50%	88.50%	Beda Bahasa
3	1/4	11.75%	88.25%	Beda Bahasa
4	1/11	50%	50%	Beda Subdialek
5	1/13	25.50%	74.50%	Beda Dialek
6	1/14	28.50%	71.50%	Beda Dialek
7	1/17	55%	45%	Beda Subdialek
8	1/18	72.50%	27.50%	Beda Wicara
9	1/19	16.50%	83.50%	Beda Bahasa
10	2/3	59.75%	40.25%	Beda Subdialek
11	2/4	56.25%	43.75%	Beda Subdialek

No	Kode Desa	% Min (sama)	% Plus (beda)	Hasil Dialektometri
12	2/11	8.25%	91.75%	Beda Bahasa
13	2/13	6%	94%	Beda Bahasa
14	2/14	6.75%	93.25%	Beda Bahasa
15	2/17	7.75%	92.25%	Beda Bahasa
16	2/18	9.50%	90.50%	Beda Bahasa
17	2/19	12.50%	87.50%	Beda Bahasa
18	3/4	82.25%	17.75%	Tidak ada Perbedaan
19	3/11	11.50%	88.50%	Beda Bahasa
20	3/13	7.50%	92.50%	Beda Bahasa
21	3/14	9%	91%	Beda Bahasa
22	3/17	8.75%	91.25%	Beda Bahasa
23	3/18	11.75%	88.25%	Beda Bahasa
24	3/19	17.25%	82.75%	Beda Bahasa
25	4/11	11.75%	88.25%	Beda Bahasa
26	4/13	7.25%	92.75%	Beda Bahasa
27	4/14	9%	91%	Beda Bahasa
28	4/17	9%	91%	Beda Bahasa
29	4/18	13%	87%	Beda Bahasa
30	4/19	16.25%	83.75%	Beda Bahasa
31	11/13	27.75%	72.25%	Beda Dialek
32	11/14	33.25%	66.75%	Beda Dialek

No	Kode Desa	% Min (sama)	% Plus (beda)	Hasil Dialektometri
33	11/17	49.25%	50.75%	Beda Dialek
34	11/18	47.75%	52.25%	Beda Dialek
35	11/19	16.25%	83.75%	Beda Bahasa
36	13/14	64.25%	35.75%	Beda Subdialek
37	13/17	21.50%	78.50%	Beda Bahasa
38	13/18	23%	77%	Beda Dialek
39	13/19	14%	86%	Beda Bahasa
40	14/17	23.75%	76.25%	Beda Dialek
41	14/18	23.75%	76.25%	Beda Dialek
42	14/19	14.25%	85.75%	Beda Bahasa
43	17/18	56.75%	43.25%	Beda Subdialek
44	17/19	11.75%	88.25%	Beda Bahasa
45	18/19	14.75%	85.25%	Beda Bahasa

Keterangan

Kode bahasa	Nama Desa		Bahasa/Isolek				
				11	Langi	:	Lekon
				13	Sigulai	:	Sigulai
1	Lugu Sebahak	:	Simolol	14	Meunafa	:	Sigulai
2	Teupin Asan	:	Aceh	17	Salur	:	Devayan
3	Sawang	:	Aceh	18	Badegong	:	Devayan
4	Alue tho	:	Aceh	19	Sinabang	:	Minangkabau

Dialektometri

Persentase	Kategori
81-100%	Beda bahasa
51-80%	Beda dialek
31-50%	Beda subdialek
21-30%	Beda wicara
20	Tidak ada perbedaan

Metode Perhitungan

Jumlah bahasa/dialek baru yang dipetakan dibagi dengan jumlah bahasa/sastra yang telah dipetakan di Provinsi Aceh selama ini, lalu dikalikan seratus.

$$PPB = \frac{x}{n} \times 100\%$$

$$PPB = \frac{1}{16} \times 100\%$$

$$PPB = 6.25\%$$

Keterangan:

PPB : persentase penambahan bahasa, sastra, dan/atau aksara dalam peta kebinekaan

x : penambahan bahasa, sastra, dan/atau aksara

n : jumlah bahasa, sastra, dan aksara yang sudah terpetakan

Variabel n=16 diperoleh dari pangkalan data pokok bahasa dan sastra yang dikelola Pusbanglin dan Sekretariat Badan Bahasa.

Dalam hal menghitung indikator kinerja pemetaan bahasa, variabel x didefinisikan juga sebagai penambahan entitas bahasa dalam pemetaan meliputi bahasa, dialek, subdialek, atau beda wicara. Perluasan definisi operasional terhadap variabel x memungkinkan untuk menghasilkan nilai PPB tahun 2025. Pemaknaan definisi variabel x ini dilakukan untuk mengakomodasi persoalan yang terjadi dalam kegiatan pemetaan bahasa di Provinsi Aceh. Persoalannya,

1. tahun 2025 hanya dilakukan pemetaan bahasa saja karena postur anggaran hanya cukup untuk dilakukan kegiatan pemetaan bahasa saja,
2. pemetaan berlabel bahasa dapat dikatakan sudah selesai, artinya entitas yang berlabel bahasa sudah dipetakan semua sehingga dapat disimpulkan tidak ada lagi penambahan bahasa. Hal ini dimungkinkan terjadi di daerah lain di bagian barat Indonesia yang jumlah bahasanya tidak seheterogen Indonesia bagian timur. Temuan tim pemetaan bahasa tahun 2025 hanyalah penambahan isolek berdasarkan pengakuan penuturnya, yaitu isolek Lekon dan Simolol.

Target IKK Pemetaan Bahasa pada tahun 2025 adalah 2,8 persen, sementara realisasi yang berhasil dicapai adalah 6.25 persen atau tingkat ketercapaian sebesar 223,21%. Realisasi ini melampaui target tahun berjalan, meski masih cukup rendah jika dibandingkan dengan target-target tahun berikutnya: 17,6 (2026); 17,9 (2027); 18,5 (2028); 18,8 (2029).

Perbandingan Capaian Target dan Realisasi
Capaian I[IKK 5.1] Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan
Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan

Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 5.1

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Tahun 2025		
		Target PK	Realisasi PK	%
[IKK 5.1] Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan	Persen	2,8	5,13	183,21

Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Peningkatan kompetensi berupa pelatihan teknis pemetaan bahasa, sastra, dan aksara bagi tim pemetaan bahasa Balai Bahasa Provinsi Aceh sangat menentukan keberhasilan kegiatan ini. Tim dibekali dasar-dasar ilmu dialektologi, fonologi, adaptasi bunyi-bunyi bahasa daerah, dan pemahaman komprehensif mengenai program kegiatan. Sebagian tim juga terus berlatih mengisi transkripsi fonetis bunyi-bunyi bahasa daerah yang dilafalkan oleh warga Balai. Latihan ini mempertajam pendengaran dan pemahaman tim dalam mentranskripsikan bunyi bahasa ke dalam transkripsi fonetis.



Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target

1. Tim pemetaan bahasa BBPA telah melakukan identifikasi dan studi awal secara mendalam mengenai bahasa-bahasa di provinsi Aceh.
2. Perencanaan kegiatan yang matang dan berkesinambungan dari tahap perencanaan, penentuan TP, analisis data, serta integrasi data daerah dengan pusat.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten (telah mengikuti pelatihan teknis pemetaan bahasa dan sastra).
4. Komunikasi yang efektif dengan masyarakat penutur, kepala desa, pemerintah daerah, dan instansi terkait.
5. Adanya forum wawancara kelompok terpumpun untuk mendengarkan seluruh pandangan penutur bahasa/isolek daerah yang memiliki kekerabatan yang dekat sehingga sudut pandang ilmiah penentuan label bahasa dapat diinformasikan kepada penutur (masyarakat).
6. Adanya pendampingan dengan ahli dialektologi dalam melakukan analisis dialektometri.

Tabel 3.29 Hambatan, antisipasi, dan strategi [IKK 5.1]

Hambatan	Antisipasi	Strategi
Kriteria narasumber yang rigid, TP yang jumlah penduduknya sedikit, dan usia desa yang relatif baru menyulitkan tim menemukan narasumber yang ideal.	Memilih dan menentukan narasumber yang paling mendekati kriteria ideal.	Membagi dua tim dan pengambilan data dilakukan secara simultan. Hal ini dilakukan untuk mengefisiensikan anggaran dan waktu.
Narasumber tidak tahu sejumlah kosakata yang ditanyakan karena tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pewawancara berdasarkan instrumen wawancara.	Untuk membantu narasumber memahami sejumlah kosakata yang relatif asing bagi mereka, tim pemetaan menyiapkan gambar-gambar yang merepresentasikan sejumlah kosakata tersebut untuk ditunjukkan.	Mengidentifikasi sebanyak mungkin TP pada satu kabupaten yang sama dengan jarak 20 km agar dapat dilakukan secara simultan.
Tidak tersedia transportasi umum di daerah pengamatan. Ditambah adanya limitasi belanja, terutama belanja sewa kendaraan sangat menyulitkan tim.	Meminta bantuan masyarakat setempat untuk melakukan jasa pengantaran.	Untuk memastikan akan adanya kenaikan variabel x , perlu diidentifikasi hipotesis awal yang memungkinkan adanya penambahan bahasa, dialek, atau subdialek.

INDIKATOR KEGIATAN 5.2

Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

Sasaran kegiatan ini secara umum adalah bentuk upaya perlindungan bahasa dan sastra yang diarahkan untuk menjaga keberlangsungan bahasa dan sastra daerah, serta bahasa Indonesia, agar tetap hidup, berfungsi secara optimal, dan menguat sebagai bagian integral dari identitas budaya nasional. Fokus utama diberikan pada bahasa-bahasa yang berada dalam kondisi kritis atau terancam punah melalui langkah-langkah revitalisasi, pendokumentasian digital melalui registrasi bahasa, serta perluasan penggunaan bahasa di ruang publik dan lingkungan pendidikan. Selain itu, sasaran kegiatan ini juga mencakup penumbuhan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra, peningkatan kegairahan dalam berbahasa, serta penguatan pemahaman dan apresiasi terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung dalam karya sastra.

Metode Perhitungan

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah pengajar utama bahasa daerah yang mengikuti bimbingan teknis Revitalisasi Bahasa Daerah dengan jumlah penutur muda yang memperoleh pembelajaran bahasa daerah di lingkungan sekolah

Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 5.2

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Tahun 2025		
		Target PK	Realisasi PK	%
[IKK 5.2]Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1:18	1:32	177,77%

Target keberhasilan program Revitalisasi Bahasa Daerah pada tahun berjalan (2025) adalah **1:18** antara pengajar utama dan siswa (penutur muda). **Target ini berhasil dicapai karena realisasinya mencapai rasio 1:32.** Realisasi pada tahun 2025 ini juga termasuk berhasil karena target jangka menengah/target akhir renstra adalah 1:20 pada tahun 2026, 1:22 pada tahun 2027, 1:25 pada tahun 2028, dan 1:30 pada tahun 2029.

Pelaksanaan program perlindungan bahasa daerah di Provinsi Aceh dilaksanakan melalui dua jenis kegiatan utama, yaitu **Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD)** dan **Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI)**. Kedua kegiatan ini dirancang secara terpadu dan berkelanjutan untuk memperkuat keberlangsungan bahasa dan sastra daerah melalui penguatan kapasitas pemangku kepentingan serta pelibatan langsung generasi muda.

1. Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD)

Kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) dilaksanakan melalui rangkaian tahapan yang mencakup koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, serta bimbingan teknis bagi guru utama bahasa daerah. Tahap koordinasi bertujuan menyelaraskan pemahaman dan komitmen bersama mengenai pentingnya perlindungan bahasa



Gambar 3.26 Bimtek guru utama RBD di Bener Meriah

daerah serta pelaksanaan program revitalisasi di wilayah masing-masing. Selanjutnya, bimbingan teknis guru utama difokuskan pada penguatan kompetensi guru dalam penguasaan bahasa dan sastra daerah, serta kemampuan diseminasi kepada guru lain dan peserta didik di sekolah. Hasil dari kegiatan RBD ini adalah terbangunnya kesepakatan dan dukungan pemerintah daerah, serta terbentuknya guru-guru master yang siap mengimbaskan pembelajaran bahasa daerah secara berkelanjutan di satuan pendidikan.

2. Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI)

Sementara itu, Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) dilaksanakan sebagai ruang apresiasi dan ekspresi hasil revitalisasi bahasa daerah yang melibatkan peserta didik secara langsung. Kegiatan ini diselenggarakan secara berjenjang dan menjadi wahana bagi generasi muda untuk menampilkan kemampuan berbahasa dan bersastra daerah melalui berbagai bentuk kreativitas.



Gambar 3.27 Pimpinan bersama pemenang FTBI 2025

FTBI tidak hanya berfungsi sebagai ajang lomba atau unjuk kebolehan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, penumbuhan sikap positif, dan penguatan identitas budaya peserta didik. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tumbuhnya generasi muda penutur bahasa daerah yang aktif, kreatif, dan bangga terhadap bahasa serta budaya daerahnya, sekaligus munculnya peserta didik berbakat dan berprestasi dalam bidang seni dan sastra daerah.

Faktor Pendukung Keberhasilan

- Keberhasilan ini utamanya dicapai karena adanya kesediaan dari peserta RBD untuk mengikuti bimtek secara daring melalui zoom

Faktor Penyebab Kegagalan

- Banyaknya kendala teknis yang harus dihadapi peserta selama sesi penyampaian materi, serta kendala-kendala lain yang lazim terjadi dalam pertemuan-pertemuan secara daring.

Tabel 3.25 Hambatan, antisipasi, dan strategi [IKK 5.2]

Hambatan	Antisipasi	Strategi
Efisiensi anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah berjalan kurang lancar	Mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota untuk tetap melaksanakan RBD sesuai dengan tahapan yang telah disepakati meskipun dalam kondisi seadanya	Memanfaatkan fitur Zoom Meeting sebagai alternatif dalam pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah dengan peserta di sejumlah kabupaten/kota.
Pergantian pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota, sehingga informasi tentang RBD tidak disampaikan oleh pejabat lama ke pejabat baru.	Untuk mengantisipasi terputusnya informasi akibat pergantian pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota, pihak Balai Bahasa Provinsi Aceh tetap menjalin komunikasi dengan narahubung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota	

SASARAN KEGIATAN 6

Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan dukungan dan fasilitas kepada lembaga-lembaga penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di dalam negeri, khususnya di wilayah Provinsi Aceh. Sepanjang tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan berbagai kegiatan fasilitas program BIPA yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan pembentukan dan penguatan lembaga BIPA, serta penguatan pemahaman kebijakan dan standar nasional pengajaran BIPA. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui bimbingan teknis, pendampingan kelembagaan, serta forum peningkatan kompetensi secara daring.

Hingga Tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Aceh mengidentifikasi sebanyak 16 lembaga penyelenggara dan/atau calon penyelenggara Program BIPA di wilayah Provinsi Aceh. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 lembaga telah memperoleh fasilitas melalui berbagai bentuk kegiatan dari target 9 RO sebanyak 9 lembaga. Dengan demikian, dari target renstra sebesar 55 persen, capaian IKK 6.1 Tahun 2025 adalah sebesar 75 persen, dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah lembaga terfasilitasi dan jumlah lembaga teridentifikasi. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga BIPA di Aceh telah mendapatkan fasilitas dari Balai Bahasa Provinsi Aceh.

Tabel 3.26 Dampak Sasaran Kegiatan 6

Dampak Pelaksanaan Kegiatan	
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pada lembaga penyelenggara BIPA dalam memahami dan menerapkan prinsip, metode, serta standar pengajaran BIPA sesuai kebijakan nasional.	Menguatnya kelembagaan penyelenggara BIPA, baik yang telah berjalan maupun calon penyelenggara, melalui pendampingan yang mendorong tata kelola program BIPA yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan akuntabel.
Dapat mengukur perbedaan bahasa secara kuantitatif sehingga hubungan dan batas isolek dapat ditentukan secara objektif dan ilmiah	Terciptanya ekosistem BIPA yang lebih siap berkembang, ditandai dengan meningkatnya kesiapan lembaga untuk menyelenggarakan program BIPA secara mandiri dan berkelanjutan.
Meluasnya jangkauan fasilitas program BIPA di Provinsi Aceh, yang tercermin dari meningkatnya jumlah lembaga yang memperoleh dukungan dibandingkan dengan jumlah lembaga yang teridentifikasi.	Meningkatnya kualitas layanan pembelajaran BIPA, yang berdampak pada efektivitas proses pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing di lembaga-lembaga BIPA.

INDIKATOR KEGIATAN 6.1

Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

Indikator ini mengukur persentase lembaga penyelenggara atau calon penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang memperoleh fasilitasi dari Balai Bahasa Provinsi Aceh dalam satu tahun anggaran. Persentase Lembaga Penyelenggara Program BIPA Terasilitasi adalah perbandingan antara jumlah lembaga penyelenggara dan/atau calon penyelenggara program BIPA yang memperoleh fasilitasi dari Balai Bahasa Provinsi Aceh dengan jumlah total lembaga BIPA yang teridentifikasi pada tahun berjalan, dinyatakan dalam persentase.

Metode Perhitungan

$$\% \text{ Lembaga Terasilitasi} = \frac{\Sigma \text{ lembaga BIPA yang memperoleh fasilitasi}}{\Sigma \text{ lembaga BIPA teridentifikasi sebagai target}} \times 100\%$$

Berdasarkan data rekapitulasi kegiatan Program BIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun 2025, diperoleh capaian sebagai berikut.

Jumlah Lembaga BIPA Teridentifikasi	:	16 lembaga
Jumlah Lembaga BIPA Terasilitasi	:	12 lembaga
Persentase Lembaga Terasilitasi	:	(12 ÷ 16) × 100% = 75%

Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 6.1

SK	IKK	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Fasilitasi terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terasilitasi (Dalam Negeri)	9 lembaga	55%	75%	136,36%

Pada tahun 2025, indikator kinerja IKK 6.1 mengalami perubahan pendekatan pengukuran dari sebelumnya berbasis jumlah lembaga menjadi persentase lembaga terfasilitasi. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan gambaran capaian yang lebih proporsional terhadap target dan konteks pengembangan program BIPA di daerah. Capaian sebesar 75 persen dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain strategi fasilitasi berjenjang, pemanfaatan moda daring untuk memperluas jangkauan kegiatan, serta dukungan pimpinan lembaga terhadap upaya internasionalisasi kampus. Selain itu, kolaborasi dengan asosiasi pengajar BIPA turut memperkuat pelaksanaan kegiatan.

1. Audiensi dan Pendampingan Ke-BIPA-an di Politeknik Negeri Lhokseumawe

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18—20 Maret 2025 di Politeknik Negeri Lhokseumawe. Kegiatan difokuskan pada pemetaan kesiapan kelembagaan, diskusi kebutuhan pengembangan BIPA, serta pendampingan awal terkait perencanaan program dan penguatan SDM pengajar. Tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman awal dan pendampingan strategis bagi lembaga dalam merintis atau memperkuat program BIPA. Manfaat kegiatan berupa meningkatnya kesadaran dan komitmen lembaga terhadap pengembangan BIPA sebagai bagian dari internasionalisasi perguruan tinggi. Hasil kegiatan adalah terbangunnya kesepahaman awal mengenai tahapan dan strategi pengembangan BIPA, yang mendukung pencapaian indikator lembaga terfasilitasi.



Gambar 3.28 Audiensi dan pendampingan di Politeknik Lhokseumawe

2. Bimbingan Teknis Pengajaran BIPA Dasar bagi Dosen dan Calon Pengajar BIPA

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 8—11 Juli 2025 di Kota Lhokseumawe dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang, merupakan bentuk fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengajar BIPA sebagai fondasi utama pembentukan dan penguatan lembaga penyelenggara program BIPA di daerah. Tujuan kegiatan adalah menyiapkan calon pengajar BIPA yang memiliki pemahaman awal mengenai standar dan praktik pengajaran BIPA. Manfaat kegiatan adalah menjadi bekal bagi para dosen dan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18—20 Maret 2025 di Politeknik Negeri Lhokseumawe. Kegiatan difokuskan pada pemetaan kesiapan kelembagaan, diskusi kebutuhan pengembangan BIPA, serta pendampingan awal terkait perencanaan program dan penguatan SDM pengajar. Tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman awal dan pendampingan strategis bagi lembaga dalam merintis atau memperkuat program BIPA. Manfaat kegiatan berupa meningkatnya kesadaran dan komitmen lembaga terhadap pengembangan BIPA sebagai bagian dari internasionalisasi perguruan tinggi. Hasil kegiatan adalah terbangunnya kesepahaman awal mengenai tahapan dan strategi pengembangan BIPA, yang mendukung pencapaian indikator lembaga terfasilitasi.



Gambar 3.29 Audiensi dan pendampingan di Politeknik Lhokseumawe

3. Pendampingan Ke-BIPA-an di ISBI Aceh



Gambar 3.30 Pendampingan ke-BIPA-an di ISBI Aceh

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2025 sebagai bentuk pendampingan awal bagi ISBI Aceh dalam merintis dan mengembangkan program BIPA berbasis keunggulan seni dan budaya. Diskusi difokuskan pada potensi kelembagaan, strategi pengembangan BIPA, serta tahapan perencanaan program yang berkelanjutan. Tujuan kegiatan adalah memfasilitasi perintisan lembaga BIPA. Manfaat kegiatan berupa meningkatnya pemahaman kelembagaan terhadap peluang pengembangan BIPA. Hasil kegiatan adalah terbangunnya kesepahaman awal mengenai pengembangan program BIPA di ISBI Aceh sebagai calon lembaga penyelenggara BIPA.

4.

Webinar Ke-BIPA-an “Mengenal SKKNI BIPA: Langkah Awal Menjadi Pengajar BIPA Profesional”



Gambar 3.31 Webinar ke-BIPA-an

Webinar ini dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2025 melalui aplikasi Zoom Meeting, merupakan bagian dari fasilitasi peningkatan pemahaman standar nasional kompetensi pengajar BIPA. Materi difokuskan pada pengenalan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pengajaran BIPA sebagai acuan profesionalisme dan penguatan mutu lembaga penyelenggara BIPA. Tujuan kegiatan adalah menyosialisasikan standar kompetensi pengajar BIPA kepada pengelola dan pengajar BIPA. Manfaat kegiatan berupa meningkatnya pemahaman peserta terhadap pentingnya standardisasi dan sertifikasi pengajar BIPA. Hasil kegiatan adalah meluasnya jangkauan fasilitasi Balai Bahasa Provinsi Aceh kepada lembaga dan pengajar BIPA di berbagai daerah di Aceh.

5.

Pendampingan Ke-BIPA-an di UIN Ar-Raniry



Gambar 3.32 Pendampingan ke-BIPA-an di UIN Ar-Raniry

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2025 sebagai bentuk pendampingan awal bagi ISBI Aceh dalam merintis dan mengembangkan program BIPA berbasis keunggulan seni dan budaya. Diskusi difokuskan pada potensi kelembagaan, strategi pengembangan BIPA, serta tahapan perencanaan program yang berkelanjutan. Tujuan kegiatan adalah memfasilitasi perintisan lembaga BIPA. Manfaat kegiatan berupa meningkatnya pemahaman kelembagaan terhadap peluang pengembangan BIPA. Hasil kegiatan adalah terbangunnya kesepahaman awal mengenai pengembangan program BIPA di ISBI Aceh sebagai calon lembaga penyelenggara BIPA.

6.

Festival Berbahasa Indonesia bagi Pemelajar Asing di Provinsi Aceh Tahun 2025



Gambar 3.33 Festival berbahasa Indonesia bagi Pembelajaran Asing di Aceh

Festival ini diselenggarakan pada tanggal 17—18 November 2025 di Gedung Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, diikuti oleh 27 pemelajar asing yang berasal dari 12 negara dan 6 perguruan tinggi di Aceh. Kegiatan ini merupakan bentuk fasilitasi pengembangan BIPA yang menasar langsung pemelajar asing sebagai bagian dari ekosistem lembaga BIPA. Kegiatan berbentuk kompetisi dengan dua kategori lomba, yaitu berpidato dan mendongeng dalam bahasa Indonesia. Tujuan kegiatan adalah memberikan apresiasi dan meningkatkan motivasi pemelajar asing dalam menggunakan bahasa Indonesia secara aktif. Manfaat kegiatan berupa penguatan praktik berbahasa Indonesia di luar kelas serta promosi program BIPA di Aceh. Hasil kegiatan adalah meningkatnya visibilitas dan peran lembaga penyelenggara BIPA dalam mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia.

Faktor Pendukung Keberhasilan

- Jumlah pemelajar asing di lembaga/kampus
- SDM bersertifikat pengajar BIPA
- Dukungan pimpinan lembaga
- Kebijakan internal lembaga
- Anggaran dan sarana prasarana lembaga
- Upaya kolaborasi dengan APPBIPA Aceh

Hambatan, Antisipasi, dan Strategi

Tabel 3.28 Hambatan, antisipasi, dan strategi IKK 6.1

Hambatan	Antisipasi	Strategi
Keterbatasan kapasitas dan pengalaman SDM pada sebagian lembaga penyelenggara dan calon penyelenggara BIPA, khususnya dalam memahami standar nasional pengajaran BIPA.	Pemanfaatan metode daring dan hibrida dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan forum peningkatan kompetensi untuk menjangkau lembaga secara lebih luas.	Peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan melalui bimbingan teknis, pendampingan intensif, dan forum berbagi praktik baik antar lembaga BIPA.
Belum meratanya pemahaman kebijakan BIPA, sehingga terdapat perbedaan kualitas pelaksanaan program antar lembaga.	Penyusunan materi fasilitasi yang terstandar dan mudah dipahami, sehingga dapat digunakan secara mandiri oleh lembaga setelah kegiatan pendampingan.	Penguatan kelembagaan BIPA dengan mendorong penerapan tata kelola, kurikulum, dan standar pembelajaran yang selaras dengan kebijakan nasional.
Kondisi geografis dan sebaran lembaga di berbagai wilayah Aceh yang menyulitkan pelaksanaan pendampingan secara tatap muka.	Pemetaan awal kebutuhan lembaga BIPA, baik dari aspek SDM, kelembagaan, maupun sarana pendukung, sebagai dasar perencanaan fasilitasi	Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, baik untuk pelatihan, pendampingan, maupun jejaring antar penyelenggara BIPA.
Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran BIPA pada beberapa lembaga, terutama calon penyelenggara.	Penguatan komunikasi dan koordinasi berkelanjutan dengan lembaga BIPA melalui forum diskusi dan pendampingan jarak jauh.	Penguatan peran Balai Bahasa Provinsi Aceh sebagai koordinator dan fasilitator utama, yang menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah.
Rendahnya jejaring dan kolaborasi antar lembaga BIPA, yang berdampak pada lambatnya pertukaran praktik baik dan penguatan ekosistem BIPA.	Pendekatan bertahap terhadap calon lembaga BIPA, agar kesiapan penyelenggaraan dapat ditingkatkan secara realistis dan berkelanjutan.	Pengembangan jejaring dan kolaborasi antar lembaga BIPA, termasuk dengan pemangku kepentingan terkait, untuk membangun ekosistem BIPA yang kuat dan berkelanjutan.

SASARAN KEGIATAN 7

Meningkatnya Tata Kelola Balai Bahasa Aceh

Tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tercermin dari capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta kinerja organisasi pada masing-masing satuan kerja. Peningkatan nilai SAKIP menunjukkan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang berdampak langsung pada efektivitas manajemen organisasi dan kinerja pegawai. Tata kelola yang baik pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Aceh berhasil memperoleh predikat SAKIP kategori AA dengan nilai 90,85, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 yang berada pada kategori A dengan nilai 90,00. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan tata kelola organisasi serta komitmen Balai Bahasa Provinsi Aceh dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Dampak Pelaksanaan Kegiatan

Ketercapaian Sasaran Kinerja 7 berdampak pada penguatan tata kelola Balai Bahasa Provinsi Aceh yang semakin transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Peningkatan tata kelola tersebut mendorong terbentuknya budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada kinerja, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan dan kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh sebagai lembaga pemerintah.

Upaya mewujudkan sasaran kegiatan “Meningkatnya Tata Kelola Balai Bahasa Provinsi Aceh” didukung oleh indikator kinerja kegiatan (IKK).

INDIKATOR KEGIATAN 7.1

Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

Nilai Kinerja anggaran merupakan hasil pengukuran dan evaluasi atas pelaksanaan RKA-K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun sebelumnya serta menghasilkan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di masa mendatang.

Pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan dengan melibatkan kementerian/lembaga, unit eselon I, dan satuan kerja sesuai dengan kewenangannya. Hasil evaluasi ditetapkan setiap tahun dalam bentuk Nilai Kinerja Anggaran melalui Keputusan Menteri Keuangan sebagai dasar pembinaan dan penyempurnaan pengelolaan anggaran.

Pengukuran kinerja anggaran dilakukan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu:

- Aspek Konteks, yang menilai keselarasan kebijakan, program, dan kegiatan dengan prioritas nasional;
- Aspek Implementasi, yang mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran sesuai rencana kerja; dan
- Aspek Manfaat, yang menilai outcome atau dampak nyata dari penggunaan anggaran terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Metode Perhitungan

Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan dua indikator utama:

- **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA):** Mengukur aspek-aspek seperti ketepatan waktu penyerapan anggaran, efisiensi pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- **Indikator Kinerja Hasil Pelaksanaan Anggaran (EKA):** Menilai capaian hasil (output) dan dampak (outcome) yang dihasilkan dari pelaksanaan anggaran, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan program atau kegiatan.

IKPA dan EKA masing-masing berkontribusi sebesar 50% dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran. Aspek implementasi dalam penilaian ini mencakup variabel capaian keluaran, efisiensi penggunaan anggaran, serta konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Metode penghitungan Nilai Kinerja Anggaran adalah

$$\text{NKA} = \text{Nilai IKPA [50\%]} + \text{Nilai EKA [50\%]}$$

Sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 62/PMK.02/2023, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan rentang nilai sebagai berikut:

Rentang Nilai	Kategori
≥ 90	Sangat Baik
80 – < 90	Baik
60 – < 80	Cukup
< 60	Kurang

Tabel 3.29
Rentang dan Kategori penilaian NKA

Perbandingan Capaian Target dan Realisasi
 Capaian [IKK 7.1] Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan
 Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan

Tabel 3.30 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 7.1

SK	IKK	Realisasi 2025							
		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi
[SK 7] Meningkatnya Tata Kelola Balai Bahasa Aceh	[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Aceh	Nilai	93.04	88.08	91.5	93.73	97.94	Sangat Baik	Sangat Baik dengan nilai 96.58

1. Kegiatan yang mendukung pencapaian IKK 7.1

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKK 7.1 meliputi optimalisasi serapan anggaran, penyesuaian rencana penarikan dana secara triwulanan, pelaporan capaian output secara berkala, serta evaluasi pelaksanaan program dan anggaran secara periodik. Selain itu, dilakukan penyusunan prognosis capaian kinerja hingga akhir tahun sebagai dasar pengendalian pelaksanaan anggaran. Upaya tersebut diperkuat melalui kegiatan pendampingan dan sosialisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sosialisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) oleh KPPN Aceh, serta kegiatan sosialisasi NKA lainnya guna meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.

Faktor Penyebab Keberhasilan dalam Pencapaian Target IKK

Faktor utama yang mendukung keberhasilan pencapaian target IKK adalah sebagai berikut:

- **Pemantauan progres capaian output secara rutin:** Progres capaian output dipantau setiap bulan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana dan target.
- **Pemantauan dan evaluasi nilai IKPA dan EKA:** Secara rutin memantau nilai IKPA dan EKA, kemudian melakukan evaluasi atas hasil pemantauan tersebut. Langkah evaluasi meliputi pengoptimalan komponen-komponen yang belum mencapai nilai maksimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Hambatan, Antisipasi, dan Strategi IKK 7.1

Tabel 3.31 Hambatan, antisipasi, dan strategi IKK 7.1

Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian IKK
Perubahan jadwal dan dinamika pelaksanaan kegiatan	Penyesuaian rencana penarikan dana dan jadwal kegiatan secara berkala	Revisi RPD triwulanan dan penyusunan prognosis capaian hingga akhir tahun
Keterlambatan atau ketidaksesuaian pelaporan capaian output	Penguatan koordinasi dan pengendalian internal	Pemantauan dan evaluasi capaian output secara rutin setiap bulan
Nilai IKPA/EKA pada beberapa komponen belum optimal	Identifikasi dan perbaikan komponen penilaian yang rendah	Optimalisasi pengelolaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi
Pemahaman teknis pengelolaan anggaran yang belum merata	Pendampingan dan sosialisasi teknis	Partisipasi aktif dalam sosialisasi IKPA/NKA oleh KPPN dan unit pembina
Risiko deviasi antara perencanaan dan realisasi	Penguatan pengendalian dan evaluasi berkala	Evaluasi pelaksanaan program dan anggaran secara periodik

INDIKATOR KEGIATAN 7.2

*Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Balai Bahasa Aceh minimal A*

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program wajib dalam Reformasi Birokrasi Internal yang penerapannya mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**. Implementasi SAKIP dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kementerian, unit kerja, hingga satuan kerja, yang mencakup perencanaan kinerja, pengukuran, pengelolaan data kinerja, pelaporan, serta evaluasi kinerja.

Evaluasi penerapan SAKIP dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya keterkaitan antara capaian hasil (outcome) dengan penggunaan anggaran. Evaluasi ini bertujuan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-oriented government), dengan pelaksanaan evaluasi berpedoman pada **Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**.

Metode Perhitungan

Dalam mencapai target pada IKK 7.1, nilai SAKIP dihitung berdasarkan

$$\text{Nilai SAKIP} = [30\% \text{ Perencanaan Kinerja}] + [30\% \text{ Pengukuran Kinerja}] + [15\% \text{ Pelaporan Kinerja}] + [25\% \text{ Evaluasi Kinerja}]$$

Satuan: Predikat

Tipe Penghitungan: Nonkumulatif

Tabel 3.32 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKK 7.2


Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Aceh	[IKK 7.2] Predikat SAKIP Balai Bahasa Aceh	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik dengan nilai 90.85

Capaian IKK 7.2 Tahun 2021--2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Aceh	[IKK 7.2] Predikat SAKIP Balai Bahasa Aceh	Predikat B	Predikat BB dengan nilai 71.97	Predikat A dengan nilai 86.55	Predikat A dengan nilai 89.15	Predikat A dengan nilai 90

1.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh pada tahun 2025 oleh tim APIP



Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Balai Bahasa Aceh
Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	24.6
2	Pengukuran Kinerja	30%	27
3	Pelaporan Kinerja	15%	14.25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	25
Predikat		AA	90.85

Gambar 3.34 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun 2025 berada pada kategori A dengan nilai 90,85. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan secara konsisten, terstruktur, dan berkelanjutan.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Aceh sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2020–2024 senantiasa memenuhi, bahkan melampaui, target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data capaian tahun 2020 hingga 2025, terlihat adanya tren peningkatan nilai SAKIP secara berkelanjutan. Pada tahun 2021, nilai SAKIP telah memenuhi target Renstra dengan predikat BB. Selanjutnya, capaian SAKIP terus meningkat pada tahun 2022, 2023, dan 2024 hingga mencapai predikat AA, serta dipertahankan pada Tahun 2025 dengan nilai yang tetap tinggi.

Capaian predikat SAKIP AA pada Tahun 2025 berdampak langsung pada peningkatan kualitas tata kelola dan layanan publik Balai Bahasa Provinsi Aceh. Pengelolaan kinerja yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel memastikan bahwa setiap program dan penggunaan anggaran berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam layanan kebahasaan dan kesastraan. Dampak lanjutannya tercermin pada meningkatnya kepercayaan publik, terjaminnya mutu layanan, serta penguatan peran Balai Bahasa Provinsi Aceh dalam pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia serta bahasa daerah.

2.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target predikat SAKIP

Komponen SAKIP	Kegiatan Pendukung
Perencanaan Kinerja	Penyelarasan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi; reviu Renstra; penyusunan peta risiko dan mitigasi risiko; rapat awal penyelarasan target kinerja
Pengukuran Kinerja	Pemantauan capaian indikator kinerja; rapat evaluasi kinerja bulanan; rapat internal Tim SAKIP
Pelaporan Kinerja	Penginputan Rencana Aksi; pengelolaan dan pemenuhan dokumen SAKIP; pelaporan kinerja dan anggaran
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi AKIP internal; reviu dan penilaian mandiri SAKIP; finalisasi evaluasi bersama Inspektorat Jenderal

Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari pencapaian nilai SAKIP adalah;

1. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam penerapan manajemen kinerja yang berorientasi hasil.
2. Perencanaan kinerja yang selaras dan terukur, mulai dari Renstra, Perjanjian Kinerja, hingga Rencana Aksi.
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala melalui rapat evaluasi rutin dan reviu internal.
4. Kelengkapan dan kualitas dokumen SAKIP yang dikelola secara sistematis dan sesuai pedoman KemenPANRB.
5. Pemanfaatan sistem aplikasi kinerja (SAKTI dan SPASIKITA) untuk mendukung pelaporan yang tepat waktu dan akurat.

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Hambatan, Antisipasi, dan Strategi IKK 7.2

Tabel 3.34 Hambatan, antisipasi, dan strategi IKK 7.2

Hambatan	Strategi Pencapaian	Langkah Antisipasi
Pemahaman pegawai terhadap SAKIP belum merata	Penguatan koordinasi dan pendampingan internal SAKIP	Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pembelajaran internal
Beban administrasi kinerja dan keterbatasan waktu	Penyelarasan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Penjadwalan pengendalian dokumen dan monitoring kinerja secara berkala
Dinamika kebijakan dan pedoman teknis SAKIP	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SAKTI dan SPASIKITA	Tindak lanjut cepat atas rekomendasi evaluasi internal dan eksternal



Gambar 3.35 Diskusi Tim Evaluator Inspektorat Jendral pada Kegiatan Finalisasi Penilaian SAKIP

B. Gambaran Umum Pengelolaan Anggaran

Balai Bahasa Aceh pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp8.662.955.000. Pagu tersebut merupakan pagu akhir setelah mengalami 18 (delapan belas) kali revisi anggaran selama tahun berjalan. Revisi anggaran dilakukan sebagai respons atas dinamika pelaksanaan kegiatan, perubahan kebijakan penganggaran, serta penyesuaian terhadap kebutuhan riil satuan kerja.

Frekuensi revisi anggaran yang relatif tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam konteks akuntabilitas kinerja, revisi anggaran dimaknai sebagai upaya penyempurnaan perencanaan agar selaras dengan capaian kinerja yang diharapkan.

C. Capaian Realisasi Anggaran

Hingga akhir Desember 2025, realisasi anggaran Balai Bahasa Aceh mencapai Rp8.469.436.749 atau sebesar 97,77% dari pagu akhir. Dengan demikian, sisa anggaran tercatat sebesar Rp193.518.251 atau sekitar 2,23% dari total pagu.

Tingkat realisasi tersebut mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam melaksanakan anggaran secara optimal. Dalam kerangka LKjIP, capaian realisasi di atas 95% dapat dikategorikan sangat baik, karena menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara realistis dan pelaksanaannya dapat dikendalikan dengan baik.

D. Analisis Realisasi Anggaran per Program

1. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran memiliki pagu sebesar Rp2.014.344.000 dengan realisasi sebesar Rp1.993.866.690 atau 98,98%. Tingginya tingkat realisasi menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan literasi kebahasaan, pembinaan penutur bahasa, pelaksanaan UKBI, serta pengembangan produk kamus dan penerjemahan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Sisa anggaran yang relatif kecil pada program ini lebih disebabkan oleh efisiensi belanja dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan, bukan karena penundaan atau pembatalan program.

2. Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

Program ini memiliki pagu sebesar Rp1.706.875.000 dengan realisasi sebesar Rp1.676.800.444 atau 98,24%. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pelestarian bahasa dan sastra daerah, pemertabatan bahasa Indonesia, serta penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia telah terlaksana secara optimal.

Realisasi yang tinggi juga mencerminkan efektivitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan serta kesiapan teknis dalam pelaksanaan kegiatan berbasis komunitas dan kelembagaan.

3. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen memiliki pagu terbesar, yaitu Rp4.941.736.000 dengan realisasi sebesar Rp4.798.769.615 atau 97,11%. Program ini mencakup belanja gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, layanan BMN, layanan umum, serta manajemen keuangan dan kinerja.

Sisa anggaran pada program ini terutama berasal dari komponen operasional dan pemeliharaan kantor, yang menunjukkan adanya efisiensi belanja dan pengendalian pengeluaran yang baik.

Daftar Realisasi Anggaran Sesuai dengan Rincian Output per SK dan IKK

Tabel 3.35 Daftar Realisasi Anggaran Sesuai dengan Rincian Output per SK dan IKK

Sasaran	Indikator	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	66,5 Persen			
	[7569.QDC.003] Generasi muda terbina program literasi		339.985.000		5,786
	[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	24,2 Persen			
	[7569.QMA.003] Produk Penerjemahan		915.807.000	908.855.300	9,924
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	43 Persen			
	[7569.QDC.002] Penutur bahasa teruji		374.880.000		5,881
	[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	74,8 Persen			
	[7569.QDC.001] Penutur bahasa terbina		469.399.000		5,975

Sasaran	Indikator	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	68 Persen			
	[7567.BDB.001] Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan			94.152.000	6,827
	[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya	73 Persen			
	[7567.BDB.002] Komunitas Penggerak Literasi Terbina		200.000.000		5,579
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	37,5 Persen			
	[7569.QMA.002] Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan				8,057

Sasaran	Indikator	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	5,13 Persen			
	[7566.QMA.002] Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra		99.750.000	67.921.040	6,809
	[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio 1:32			
	[7566.QDC.001] Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah			346.531.000	6,859
[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	75 Persen			
	[7568.QDB.001] Lembaga Terfasilitasi Program BIPA				9,816

Sasaran	Indikator	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Aceh	[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Aceh	Kategori Sangat Baik			
	[7613.EBA.994.001] Gaji		3.161.996.000		9,910
	[7613.EBA.994.001] Operasional Perkantoran				
	[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Aceh minimal A	Predikat AA			
	[7613.EBA.956] Layanan BMN				5,076
	[7613.EBA.958] Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		163.510.000		
	[7613.EBA.960] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		78.662.000	38.193.000	
	[7613.EBA.962] Layanan Umum				7,015
	[7613.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi				4,702
	[7613.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan				
	[7613.EBD.974] Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		36.345.000	15.190.000	

Daftar Revisi Anggaran

No	Revisi DIPA	Tanggal	Keterangan
1	Revisi 01	23 Jan 2025	Revisi DJA Buka Blokir Anggaran
2	Revisi 02	21 Feb 2025	Revisi DJA Blokir Sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
3	Revisi 03	25 Feb 2025	Revisi Kanwil Pemutakhiran POK dan RPD Hal III DIPA
4	Revisi 04	11 Mar 2025	Revisi KPA Pemutakhiran POK
5	Revisi 05	14 Mar 2025	Revisi DJA Blokir Sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
6	Revisi 06	21 Apr 2025	Revisi DJA Buka Blokir Anggaran
7	Revisi 07	17 Jun 2025	Revisi Kanwil Pemutakhiran POK dan RPD Hal III DIPA
8	Revisi 08	14 Jul 2025	Revisi Kanwil Pemutakhiran POK dan RPD Hal III DIPA
9	Revisi 09	14 Jul 2025	Revisi Kanwil Pemutakhiran POK dan RPD Hal III DIPA
10	Revisi 10	12 Sep 2025	Revisi Kanwil Pemutakhiran POK dan RPD Hal III DIPA
11	Revisi 11	23 Sep 2025	Revisi Kanwil Pemutakhiran POK dan RPD Hal III DIPA
12	Revisi 12	09 Okt 2025	Revisi DJA Buka Blokir dan Pengurangan Anggaran
13	Revisi 13	16 Okt 2025	Revisi Kanwil Pemutakhiran POK dan RPD Hal III DIPA
14	Revisi 14	5 Nov 2025	Revisi Kanwil Pemutakhiran POK dan RPD Hal III DIPA
15	Revisi 15	17 Nov 2025	Revisi Kanwil Pemutakhiran POK dan RPD Hal III DIPA
16	Revisi 16	25 Nov 2025	Revisi KPA Pemutakhiran POK
17	Revisi 17	12 Des 2025	Revisi KPA Pemutakhiran POK
18	Revisi 18	12 Des 2025	Revisi KPA Pemutakhiran POK

Tabel 3.36 Daftar Revisi Anggaran

E. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Belanja

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil dari yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja pada satuan kerja.

Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari :

1. Perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran;
2. Analisis kesesuaian antara output yang dihasilkan dengan anggaran yang digunakan;
3. Identifikasi kegiatan yang mampu menghasilkan capaian kinerja optimal dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah;
4. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja secara efektif dan tepat sasaran.

Analisis ini menjadi dasar untuk menilai tingkat efisiensi pengelolaan anggaran serta sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

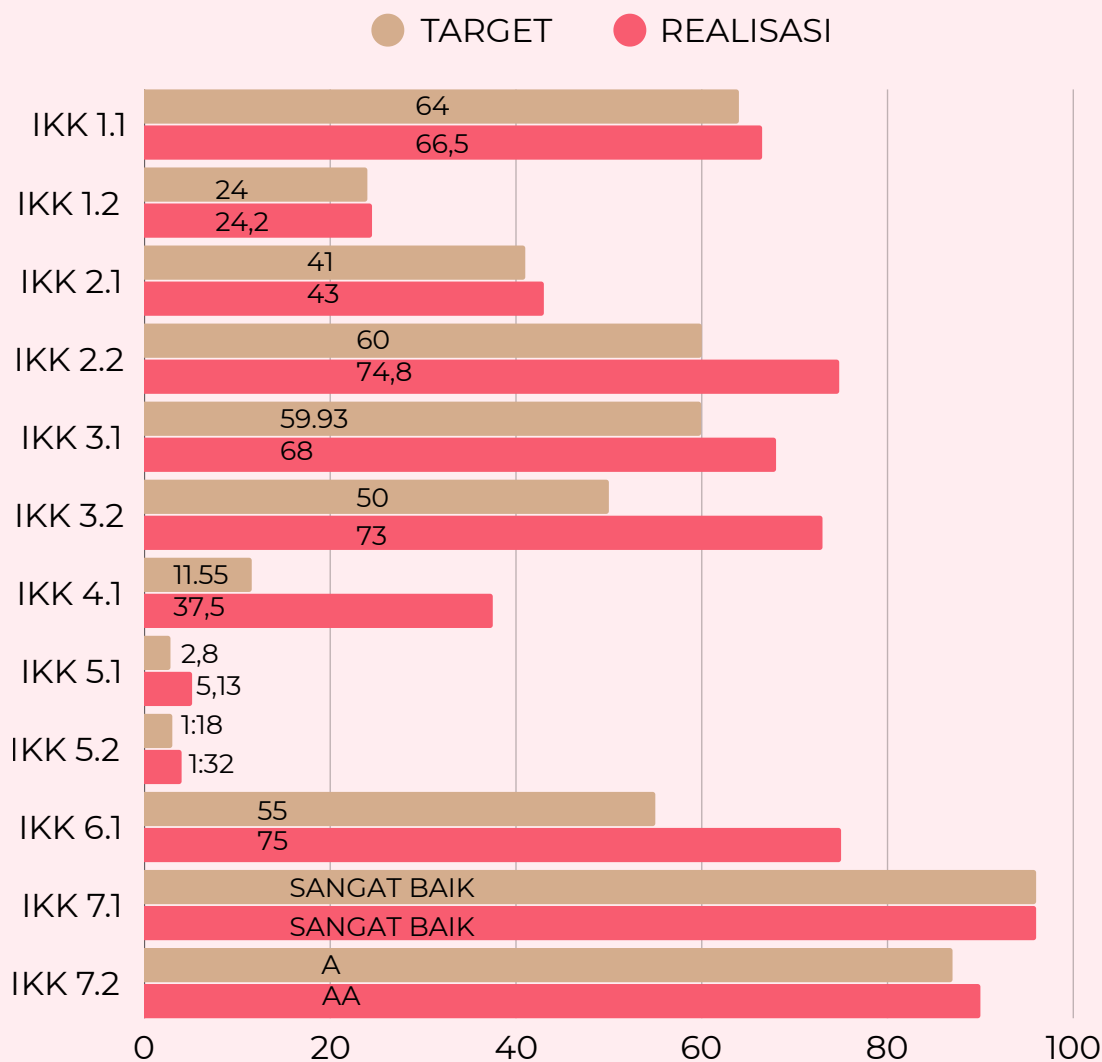


Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas Balai Bahasa Provinsi Aceh atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025. Capaian kinerja yang disampaikan dalam laporan ini menunjukkan tingkat keberhasilan Balai Bahasa Provinsi Aceh dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan.

Melalui evaluasi ini, **Balai Bahasa Provinsi Aceh** berkomitmen untuk memperkuat langkah peningkatan kinerja di tahun berikutnya, termasuk penguatan tata kelola, efektivitas program, serta efisiensi pemanfaatan anggaran. Laporan ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyempurnaan perencanaan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja semakin selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Selama tahun **2025**, **Balai Bahasa Provinsi Aceh** berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

CAPAIAN IKK



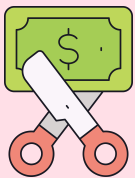
Grafik 4 Perbandingan Target dan Realisasi per-IKK

SERAPAN ANGGARAN



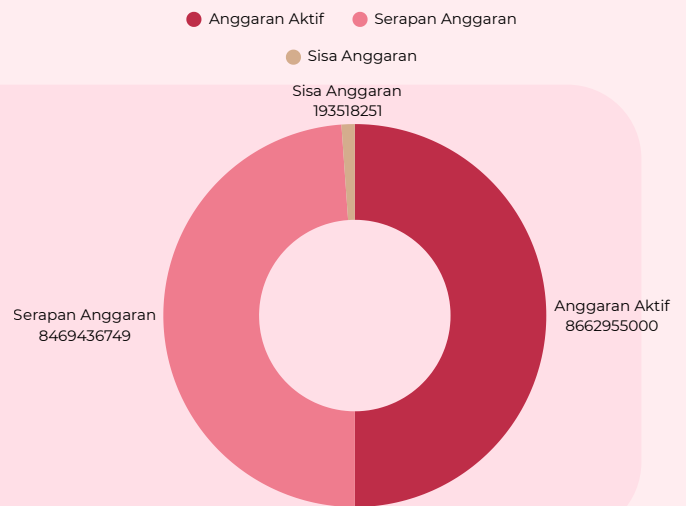
Anggaran Aktif

Rp 8.662.955.000



Blokir Anggaran

Rp 1.303.689.000



Berdasarkan data kinerja anggaran Tahun 2025, pengelolaan anggaran menunjukkan dinamika penyesuaian kebijakan dan respons terhadap pelaksanaan program, ditandai dengan penurunan pagu dari Rp10.443.458.000 menjadi Rp9.966.644.000 sebagai bentuk rasionalisasi dan efisiensi belanja. Adanya blokir anggaran sebesar Rp1.303.689.000 membatasi kapasitas belanja dan memengaruhi capaian realisasi, yang tercatat sebesar Rp8.469.436.749 atau 84,98% dari pagu revisi setelah blokir. Meski demikian, jika dihitung terhadap anggaran yang benar-benar dapat dimanfaatkan, tingkat serapan mencapai 97,77%, yang menunjukkan bahwa satuan kerja pada dasarnya telah mampu mengelola dan menyerap anggaran secara sangat optimal, dengan kendala utama lebih disebabkan oleh faktor eksternal berupa pembatasan anggaran.

Capaian tersebut mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang efektif, ditunjukkan melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan kegiatan yang relatif tepat waktu, serta kesiapan administrasi keuangan. Ke depan, perlu dilakukan upaya strategis untuk meminimalkan terjadinya blokir anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan, percepatan pemenuhan persyaratan administratif, serta penguatan koordinasi dengan pihak terkait. Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan anggaran tidak hanya akan meningkatkan persentase realisasi, tetapi juga memperkuat kontribusi program dan kegiatan terhadap pencapaian kinerja instansi secara keseluruhan.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

No	Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian
Kegiatan Peningkatan Kecakapan Literasi	
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi melalui surat resmi daring sering kali tidak mendapatkan respons cepat. 2. Tidak semua pemangku kepentingan memahami urgensi UKBI 3. Dinamika perubahan anggaran atas pertimbangan efisiensi memengaruhi waktu pelaksanaan dan anggaran kegiatan Inventarisasi kosakata 4. Tidak tersedia kendaraan umum di daerah pengambilan data dan tidak boleh sewa kendaraan mempersulit mobilitas antar informan yang berada di kecamatan atau desa berlainan 5. Honorarium informan yang disamaratakan membuat panitia sulit menggaet informan berpendidikan tinggi 6. Revisi anggaran yang terjadi berulang kali memengaruhi lini masa pelaksanaan kegiatan sayembara penulisan cerita anak. 7. Peniadaan Bimtek menyebabkan kemungkinan naskah cerita yang dihasilkan kurang maksimal
Kegiatan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	
2	<p>Koordinasi antara Balai Bahasa Provinsi Aceh dan pemerintah daerah belum membuahkan hasil yang maksimal. Pemerintah daerah cenderung pasif dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian bahasa dan sastra daerah. Mereka sering beralasan bahwa tidak tersedia anggaran, sehingga banyak kegiatan bergantung pada dukungan penuh Balai Bahasa Provinsi Aceh. Kondisi ini menghambat pemerataan program, mengurangi efektivitas pelestarian, dan menurunkan keberlanjutan kegiatan di kabupaten/kota</p>
Kegiatan Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia	
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan sasaran kegiatan Bimtek, semula komunitas penggerak literasi (selama 3th) menjadi pengelola perpustakaan sekolah 2. Anggaran sudah terpakai untuk Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah Dasar sesuai arahan Badan Bahasa di awal tahun terkait efisiensi anggaran. 3. Keterbatasan waktu pelaksanaan Bimtek Komunitas Literasi yang relatif singkat, yaitu hanya selama tiga hari, membuat materi yang kompleks sulit untuk diserap secara optimal oleh peserta. 4. Jumlah peserta yang cukup banyak dengan latar belakang dan kebutuhan yang beragam menyulitkan narasumber dalam memberikan pendampingan secara personal dan mendalam.
Kegiatan Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia	
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya yang minim untuk Pendampingan APPBIPA sehingga intensitas pendampingan tidak memadai 2. Jumlah Pengajar BIPA Bersertifikat Masih Kurang 3. Keterbatasan Anggaran untuk Program Internasionalisasi pada Mitra yang ada
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	
5	<p>Balai Bahasa Provinsi Aceh belum mencapai predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).</p>

No	Tindak Lanjut Kegiatan di Tahun 2025	Langkah Perbaikan Tahun 2026
Kegiatan Peningkatan Kecakapan Literasi		
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara aktif berkomunikasi dengan pihak terkait yang relevan dalam UKBI melalui pesan singkat atau telepon. 2. Sosialisasi secara daring dan luring untuk menjelaskan pentingnya UKBI bagi peningkatan mutu bahasa Indonesia 3. Senantiasa berkoordinasi dengan pimpinan dan tim terkait pelaksanaan kegiatan, seperti mengikuti rapat revisi anggaran. 4. Mengumpulkan informan di tempat pertemuan yang disepakati 5. Meniadakan informan dari kalangan akademis 6. Melakukan kajian kepustakaan untuk menambah target kosakata 7. Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan secara berkala berdasarkan revisi anggaran terbaru. 8. Melaksanakan pendampingan penyusunan naskah kepada masing-masing penulis naskah terpilih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan intensitas koordinasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan melalui berbagai kanal komunikasi serta pendampingan langsung agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif. 2. Menyesuaikan metode dan pelaksanaan kegiatan secara fleksibel terhadap dinamika anggaran, termasuk optimalisasi kajian kepustakaan dan pendampingan penulisan untuk menjaga kualitas luaran.
Kegiatan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah		
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pertemuan berkala dengan pemda untuk menjelaskan urgensi pelestarian bahasa daerah sesuai regulasi nasional (misalnya PP 57/2014 dan amanat Badan Bahasa). 2. Menginisiasi MoU/MoA yang menentukan tanggung jawab jelas antar pihak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah melalui pertemuan berkala untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen bersama. 2. Menginisiasi kerja sama formal melalui MoU/MoA guna memperjelas peran, tanggung jawab, dan keberlanjutan program pelestarian
Kegiatan Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia		
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyesuaian kurikulum dan modul Bimtek agar relevan dengan kebutuhan pengelola perpustakaan sekolah tanpa menghilangkan muatan literasi. 2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersisa 3. Menyediakan materi lanjutan secara daring. 4. Menerapkan sistem kelompok kerja (workgroup) sehingga narasumber dapat melakukan pendampingan yang lebih fokus dan peserta bisa saling mendukung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan kurikulum dan modul bimtek agar lebih relevan dengan sasaran kegiatan serta mendukung penguatan literasi secara berkelanjutan. 2. Mengoptimalkan pelaksanaan bimtek melalui penyediaan materi lanjutan daring dan penerapan sistem kelompok kerja untuk meningkatkan efektivitas pendampingan.

No	Tindak Lanjut Kegiatan di Tahun 2025	Langkah Perbaikan Tahun 2026
Kegiatan Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia		
4	1. Pendampingan dilakukan secara daring dengan memanfaatkan media yang tersedia walau tidak bisa maksimal 2. Mengadakan pelatihan pengajar BIPA secara rutin. 3. Memberikan pembinaan lanjutan bagi pengajar melalui komunitas praktisi dan kelas daring	1. Mengoptimalkan pendampingan dan pembinaan program BIPA melalui pemanfaatan media daring dan jejaring komunitas praktisi. 2. Meningkatkan kapasitas pengajar BIPA melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan guna mendukung kualitas program internasionalisasi.
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa		
5	1. Penguatan Komitmen Pimpinan dan Pegawai 2. Penyusunan dan Penyempurnaan Dokumen LKE ZI-WBK 3. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Implementasi ZI-WBK 4. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik 5. Penguatan Pengendalian Internal dan Pengawasan 6. Peningkatan Kolaborasi Internal	1. Memperkuat komitmen pimpinan dan pegawai melalui peningkatan kapasitas SDM, pengendalian internal, dan pengawasan berkelanjutan. 2. Menyempurnakan dokumen dan inovasi pendukung Zona Integritas untuk mendorong pencapaian predikat ZI-WBK.

Sebagai penutup, Laporan Kinerja Tahun 2025 ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Aceh selama satu tahun anggaran. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif pada sebagian besar sasaran strategis, baik dalam peningkatan kecakapan literasi peserta didik, penguatan kompetensi berbahasa penutur, pelibatan lembaga dan komunitas literasi, pengembangan produk kebahasaan dan kesastraan, perlindungan bahasa daerah, fasilitasi program BIPA, maupun penguatan tata kelola internal. Beberapa indikator bahkan mencapai kategori sangat baik, termasuk predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan nilai AA, yang mencerminkan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabel.

Dari sisi pengelolaan keuangan, realisasi anggaran tahun 2025 mencapai 84,98% setelah memperhitungkan blokir anggaran, dan 97,77% apabila dihitung terhadap anggaran yang dapat dimanfaatkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Balai Bahasa Provinsi Aceh pada prinsipnya telah mampu menyerap anggaran secara optimal, meskipun terdapat keterbatasan akibat penyesuaian kebijakan dan pemblokiran anggaran di tengah tahun.

Berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan telah diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui langkah antisipatif dan perbaikan yang terukur. Ke depan, Balai Bahasa Provinsi Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program agar capaian kinerja semakin optimal serta memberikan dampak nyata bagi pemajuan bahasa dan sastra di Provinsi Aceh.

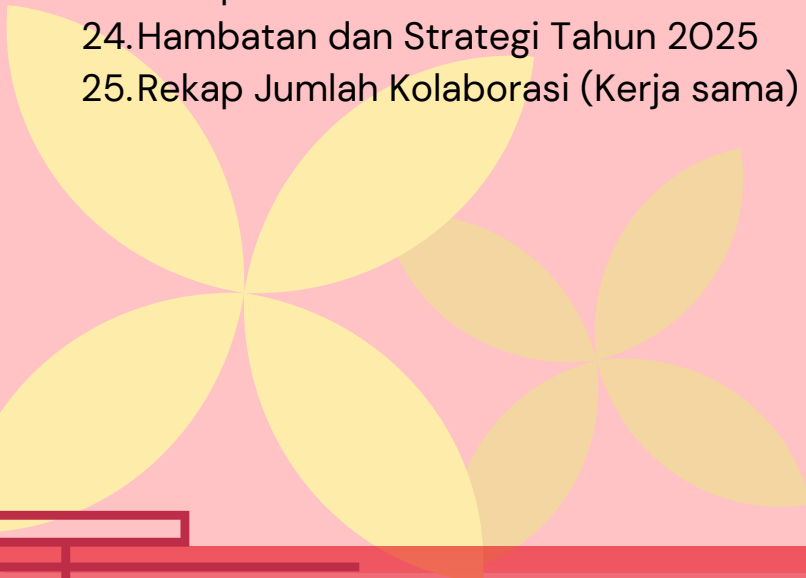
LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN



1. Perjanjian Kinerja Awal
2. Perjanjian Kinerja Revisi
3. Pengukuran Kinerja
4. SK Tim Penyusun Lakin
5. SK Tim Reviu Lakin
6. Pernyataan Telah Direviu
7. Rekapitulasi Penghargaan Tahun 2025
8. Rekapitulasi Inovasi Tahun 2025
9. Rekapitulasi Buku Terjemahan Tahun 2025
10. Rekapitulasi Kamus Tahun 2025
11. Rekapitulasi Lembaga Terfasilitasi Kebahasaan Tahun 2025
12. Rekapitulasi Lembaga Terfasilitasi BIPA Tahun 2025
13. Rekapitulasi Pemelajar BIPA Tahun 2025
14. Rekapitulasi Jumlah Lembaga Terbina Tahun 2025
15. Rekapitulasi Jumlah Duta Bahasa Tahun 2025
16. Rekapitulasi Jumlah Komunitas Literasi Tahun 2025
17. Rekapitulasi Jumlah Komunitas Sastra Tahun 2025
18. Rekapitulasi Jumlah yang Terimbas RBD Tahun 2025
19. Rekapitulasi Jumlah Judul Buku Literasi Tahun 2025
20. Rekapitulasi Jumlah Peserta UKBI Tahun 2025
21. Rekapitulasi Jumlah Sekolah yang Terafiliasi UKBI Tahun 2025
22. Rekapitulasi Penutur Terbina Tahun 2025
23. Rekapitulasi IPBD Tahun 2025
24. Hambatan dan Strategi Tahun 2025
25. Rekapitulasi Jumlah Kolaborasi (Kerjasama) Tahun 2025





**Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
Jabatan : Kepala
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Hafidz Muksin
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Banda Aceh, 1 Agustus 2025


Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
Hafidz Muksin


Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala
Drs. Umar Solikhan, M.Hum.



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persen	64
	[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persen	19
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	Persen	41
	[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persen	60
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	Persen	59.93
	[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya	Persen	50
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persen	11.55
[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	Persen	2.8
	[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1:18
[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terasilitasi (Dalam Negeri)	Persen	50
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Aceh	[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Aceh	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Aceh minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Rp1.798.954.000
2	7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp337.902.000
3	7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp176.180.000
4	7569	Peningkatan Kecakapan Literasi	Rp2.652.905.000
5	7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp5.477.517.000
Total Anggaran			Rp10.443.458.000





Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa

Hafidz Muksin

Banda Aceh, 1 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik



Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Kepala
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
Jabatan : Kepala
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Hafidz Muksin
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Banda Aceh, 18 Desember 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
Hafidz Muksin

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala
Drs. Umar Solikhan, M.Hum.



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persen	64
	[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persen	24
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	Persen	41
	[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persen	60
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	Persen	59.93
	[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kerjanya	Persen	50
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persen	11.55
[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	Persen	2.8
	[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1:18
[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terasilitasi (Dalam Negeri)	Persen	55
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Aceh	[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Aceh	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Aceh minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Rp1.695.664.000
2	7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp337.902.000
3	7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp98.296.000
4	7569	Peningkatan Kecakapan Literasi	Rp2.577.265.000
5	7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp5.257.517.000
Total Anggaran			Rp9.966.644.000



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE





Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa

Hafidz Muksin

Banda Aceh, 18 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik



**Laporan Kinerja Triwulan 4
Balai Bahasa Aceh
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Bahasa Aceh selama triwulan 4 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 4	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik				
[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	64	Persen	64	65.5
[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	19	Persen	19	24.21
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia				
[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	41	Persen	41	43
[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	60	Persen	60	74.8
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan				
[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	59.93	Persen	59.93	68
[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya	50	Persen	50	73
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra				
[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	11.55	Persen	11.55	37.5
[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra				
[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	2.8	Persen	2.8	6.25
[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	1:18	Rasio	1:18	1:32
[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA				



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayt 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 4	Realisasi
[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	50	Persen	50	75
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Aceh				
[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Aceh	Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik
[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Aceh minimal A	A	Predikat	A	AA

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik

[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan IV tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Aceh kembali melaksanakan tiga bimbingan teknis untuk menunjang program peningkatan kualitas pembelajaran. Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan literasi membaca peserta didik pada jenjang SD, SMP, dan SMA dengan total peserta 600 orang. Rincian ketiga bimbingan teknis tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bimbingan Teknis "Cerdas Mengulas Buku" untuk Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Besar, dilaksanakan secara daring sebanyak 5 kali pada Oktober 2025 di sekolah masing-masing. Kegiatan ini diikuti oleh 200 siswa dari berbagai sekolah dasar dengan pendampingan 10 guru. Setiap sekolah mengikutsertakan 20 siswa dan 1 guru pendamping. Kegiatan ini menekankan kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan dan menulis ulasan buku secara terstruktur dan menarik.
2. Bimbingan Teknis "Membaca Cepat" untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pidie, dilaksanakan secara daring sebanyak 6 kali pada Oktober 2025 di sekolah masing-masing. Kegiatan ini diikuti oleh 200 siswa dan 10 guru pendamping yang merupakan guru bahasa Indonesia dari 10 sekolah. Peserta dilatih teknik membaca cepat dan efektif untuk meningkatkan daya serap terhadap teks bacaan tanpa mengurangi pemahaman makna.
3. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Membaca Kritis dan Analitis bagi Siswa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Aceh Utara, dilaksanakan secara daring sebanyak 7 kali pada Oktober 2025 di sekolah masing-masing. Kegiatan ini diikuti oleh 200 siswa dari 10 SMA kategori K1 di wilayah Kabupaten Aceh Utara, masing-masing diwakili oleh 20 siswa dan 1 guru Bahasa Indonesia. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan membaca kritis dan analitis siswa sesuai tuntutan kurikulum nasional.

Kendala/Permasalahan

1. Pelaksanaan kegiatan secara daring menghadapi kendala keterbatasan sinyal di beberapa wilayah, yang menyebabkan proses pembelajaran tidak selalu berjalan lancar, seperti terputusnya koneksi saat penyampaian materi maupun diskusi.



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



2. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan keterbatasan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran daring, sehingga diperlukan waktu adaptasi yang cukup panjang dan pendampingan tambahan.
3. Penentuan jadwal pertemuan secara serentak mengalami kendala karena harus menyesuaikan dengan jadwal sekolah masing-masing, yang pada akhirnya berdampak pada perubahan waktu pelaksanaan kegiatan.
4. Selain itu, ketidakseragaman kemampuan siswa dalam mengikuti dan memahami materi pembelajaran menyebabkan proses penyampaian materi perlu disesuaikan agar seluruh peserta tetap dapat mengikuti kegiatan secara optimal.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Untuk mengatasi keterbatasan kemampuan guru, dilakukan bimbingan dan pendampingan oleh DUBAS yang dilibatkan secara aktif, sehingga guru-guru yang mengalami kendala dapat memperoleh arahan dan dukungan teknis selama pelaksanaan kegiatan.
2. Sebagai langkah antisipatif terhadap kendala penjadwalan, konfirmasi jadwal kegiatan daring dilakukan jauh lebih awal agar dapat disesuaikan dengan agenda sekolah masing-masing dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih tertib dan efektif.

[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik

[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan IV, Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan rangkaian kegiatan dalam program pengembangan dan pemanfaatan produk penerjemahan untuk peserta didik. Kegiatan-kegiatan ini merupakan tahap lanjutan untuk menghasilkan produk penerjemahan yang akan dimanfaatkan nantinya. Rincian kegiatan tersebut meliputi

1. Bimbingan Teknis Karya Berbahasa Daerah yang dilaksanakan pada 29 September sampai dengan 2 Oktober 2025 di Hotel Grand Arabia, Banda Aceh.
2. Uji Keterbacaan Produk Penerjemahan tahun 2025 yang dilaksanakan pada 20 November 2025. Sebanyak 6 produk Penerjemahan teruji keterbacaannya pada kegiatan ini
3. Pemanfaatan Produk Penerjemahan di kabupaten Aceh Tengah yang dilaksanakan pada 25 s.d. 27 November 2025, dilanjutkan dengan kegiatan yang sama di Kabupaten Aceh Barat pada Desember 2025.

Produk Penerjemahan telah diselesaikan pada Desember 2025 dalam bentuk buku cerita anak dwibahasa bergambar dengan total 53 produk.

Kendala/Permasalahan

1. Perubahan target capaian dari 19% menjadi 24% menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan, karena memerlukan penyesuaian kembali terhadap perencanaan awal, strategi pelaksanaan, serta alokasi waktu dan sumber daya yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Kendala lain yang dihadapi adalah belum terbitnya Surat Keputusan (SK) kelayakan terhadap buku-buku yang akan dimanfaatkan, sehingga pemanfaatan produk tersebut belum dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan rencana yang telah disusun.



3. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia berdampak pada terbatasnya jumlah produk yang dapat diuji keterbacaannya, sehingga pelaksanaan uji keterbacaan belum dapat mencakup seluruh produk yang direncanakan

Strategi/Tindak Lanjut

1. Dilakukan perhitungan ulang terhadap jumlah produk yang dimanfaatkan untuk menyesuaikan dengan perubahan target capaian dari 19% menjadi 24%, sehingga strategi pelaksanaan dan prioritas pemanfaatan produk dapat disusun kembali secara lebih realistis dan terukur.
2. Untuk mengatasi kendala belum terbitnya SK kelayakan, pemanfaatan produk dilakukan melalui laman resmi Balai Bahasa Provinsi Aceh atau melalui mekanisme penjangkaran, sehingga produk tetap dapat dimanfaatkan oleh sasaran tanpa harus menunggu penerbitan SK kelayakan.
3. Selain itu, dilakukan pengecekan mandiri terhadap hasil produk yang telah disusun dengan mengacu pada umpan balik dari produk yang telah diuji keterbacaannya, guna memastikan kualitas dan keterbacaan produk tetap terjaga meskipun jumlah produk yang diuji secara langsung terbatas.

[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia

[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan IV, Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan jumlah penutur teruji melalui pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif. Kegiatan ini dilaksanakan pada beberapa daerah meliputi;

1. Sosialisasi dan Pelaksanaan Simulasi UKBI Adaptif di Kabupaten Bireuen pada 7 s.d. 8 Oktober 2025 yang diikuti oleh 50 orang peserta.
2. Pendampingan Pelaksanaan UKBI Adaptif di Kabupaten Bener Meriah pada 22 s.d. 25 Oktober 2025.
3. Pendampingan Pelaksanaan UKBI Adaptif di Kabupaten Aceh Barat pada 11 s.d. 14 November 2025.
4. Sosialisasi dan Pelaksanaan Simulasi UKBI Adaptif di Kabupaten Aceh Jaya pada Desember 2025 yang diikuti oleh 30 orang peserta.

Kendala/Permasalahan

1. Pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota terhadap pentingnya UKBI sebagai alat ukur kemahiran berbahasa berbasis profesi belum merata, sehingga partisipasi penutur masih belum optimal dan pelaksanaan UKBI belum menjadi prioritas instansi daerah.
2. Pelaksanaan UKBI Adaptif secara daring masih menghadapi kendala teknis dan infrastruktur, seperti keterbatasan jaringan internet, perangkat pendukung, serta kesiapan lokasi uji, yang berpotensi mengganggu kelancaran pengujian.



3. Keterbatasan waktu dan sumber daya manusia di daerah, termasuk kesulitan penyesuaian jadwal dengan tugas kedinasan serta terbatasnya jumlah pendamping UKBI, berdampak pada efektivitas sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Strategi pencapaian target kinerja Tahun 2025 diarahkan pada penguatan peran UKBI sebagai instrumen utama pemetaan dan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia berbasis profesi, dengan menyeimbangkan perluasan jangkauan peserta dan peningkatan kualitas hasil pengujian.
2. Penguatan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi pusat dan daerah dilakukan agar UKBI dipahami sebagai bagian dari pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
3. Pelaksanaan UKBI Adaptif diperluas secara daring dan luring untuk meningkatkan aksesibilitas penutur dari berbagai wilayah dan latar belakang profesi.
4. Hasil UKBI dimanfaatkan sebagai dasar pendampingan dan pembinaan kebahasaan yang lebih terarah, disertai peningkatan kesiapan teknis dan dukungan pelaksanaan guna meminimalkan kendala di lapangan.

[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia

[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan IV, Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia dalam rangka peningkatan kompetensi berbahasa bagi mahasiswa USK, dan ISBI Aceh yaitu: fasilitasi

Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia di Banda Aceh, dilaksanakan pada 20 November 2025, dan Desember 2025 dengan jumlah peserta 80 orang.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Ruang Publik.

Kendala/Permasalahan

1. Keterbatasan waktu penyuluhan menyebabkan praktik dan evaluasi hasil belajar belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
2. Jumlah peserta yang dapat difasilitasi masih terbatas karena keterbatasan anggaran dan jadwal pelaksanaan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melaksanakan pendampingan lanjutan secara daring untuk memperkuat penerapan hasil penyuluhan di lingkungan kerja masing-masing peserta.
2. Meningkatkan kerja sama dengan dinas pendidikan dan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan sasaran penyuluhan di kabupaten/kota lainnya.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaannya bahasanya

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan IV, Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan penggunaan bahasa negara di lingkungan lembaga pemerintahan, yaitu Penyuluhan Bahasa Indonesia Bidang Hukum di Kabupaten Bireuen pada 3-6 November 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dokumen dinas, papan nama, dan media informasi lembaga pemerintahan, serta memperkuat komitmen lembaga terhadap fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara

Kendala/Permasalahan

1. **Keterbatasan waktu pembinaan dan pendampingan**, yang menyebabkan belum seluruh rekomendasi kebahasaan dapat diterapkan secara optimal oleh lembaga sasaran.
2. **Perbedaan tingkat pemahaman dan kompetensi kebahasaan** di antara lembaga terbina, sehingga laju peningkatan kualitas penggunaan bahasa tidak seragam.
3. **Kurangnya tindak lanjut internal lembaga**, terutama dalam pembaruan dokumen lama atau penyesuaian media publikasi yang telah terlanjur digunakan.
4. **Keterbatasan sumber daya pendukung**, baik dari sisi anggaran, jumlah lembaga yang dapat dibina, maupun sarana evaluasi kebahasaan.
5. **Faktor eksternal**, seperti perubahan kebijakan internal lembaga sasaran, rotasi pegawai, atau prioritas program lain yang mengurangi fokus terhadap pembinaan kebahasaan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. **Optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia**, melalui pembagian tugas yang lebih proporsional, peningkatan koordinasi tim, serta penguatan peran pembina kebahasaan sesuai dengan kompetensinya.
2. **Penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan**, dengan memprioritaskan lembaga sasaran yang memiliki dampak luas terhadap layanan publik dan potensi peningkatan kualitas penggunaan bahasa yang signifikan.
3. **Pemanfaatan metode pembinaan berbasis daring dan hibrida**, guna mengatasi keterbatasan waktu dan anggaran serta memperluas jangkauan pembinaan.
4. **Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi**, melalui penggunaan instrumen penilaian kebahasaan yang lebih sederhana namun terukur, sehingga perkembangan kualitas penggunaan bahasa dapat dipantau secara berkala.
5. **Penguatan dokumentasi dan pelaporan kegiatan**, agar setiap tahapan pembinaan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan untuk perbaikan pelaksanaan pada periode berikutnya.

[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan IV tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Komunitas Literasi di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring pada Oktober sampai dengan November 2025 sebanyak lima kali di komunitas masing-masing. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta, yang merupakan perwakilan dari 45 komunitas literasi dan pusat kegiatan desa di Kabupaten Aceh Barat Daya.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja komunitas penggerak literasi dalam mengelola kegiatan membaca, menulis, serta mendukung program literasi berbasis masyarakat

Kendala/Permasalahan

1. Kapasitas awal peserta yang bervariasi menyebabkan kecepatan pemahaman materi tidak merata.
2. Keterbatasan dukungan logistik dari komunitas asal peserta menghambat implementasi hasil pelatihan secara optimal di lapangan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menyediakan rekaman dan bahan ajar digital agar peserta dapat mengakses materi secara mandiri bila terkendala jaringan.
2. Melakukan pendampingan jarak jauh melalui grup komunikasi daring sebagai forum berbagi praktik baik antar komunitas.
3. Berkoordinasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah untuk mengintegrasikan hasil Bimtek dalam program literasi tingkat kabupaten.
4. Melakukan evaluasi pascapelatihan guna memetakan peningkatan kapasitas peserta dan efektivitas kegiatan sebagai dasar pembinaan lanjutan.

[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan IV tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Aceh telah menambah produk pengembangan bahasa yang tervalidasi yaitu tersusunnya Kamus Kopi Gayo-Indonesia dan termutakhirkannya kosakata Gayo dalam Kamus Bahasa Daerah Aceh (KBBA) daring

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sistematis Balai Bahasa Provinsi Aceh untuk mendokumentasikan dan melestarikan kekayaan leksikal bahasa daerah di wilayah Aceh, sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam pengembangan bahasa Indonesia.

Kendala/Permasalahan

1. Tim mengalami kesulitan dalam mengategorikan bahasa dan dialek secara tepat, terutama di wilayah Provinsi Aceh yang memiliki tingkat keragaman linguistik yang tinggi.
2. Munculnya ketegangan atau kegaduhan sosial di masyarakat berpotensi menghambat proses dokumentasi bahasa, menurunkan kepercayaan publik, serta menunda penerbitan produk leksikografi.
3. Pemeliharaan laman digital kamus perlu disesuaikan dengan kebijakan pembaruan domain kementerian, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

4. Perubahan target dari rencana awal serta perbedaan pola kerja antar satuan kerja menimbulkan tantangan dalam penyesuaian pelaksanaan kegiatan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka sebagai upaya menambah dan melengkapi data usulan kosakata ke KBBI, terutama ketika pengumpulan data lapangan menghadapi keterbatasan.
2. Dilakukan koordinasi dengan tim redaksi KBBI untuk menyusun panduan penulisan kosakata bahasa daerah yang akan diusulkan ke KBBI, dengan tetap mengakomodasi ciri khas bahasa daerah agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
3. Pengajuan clearance dilaksanakan agar kegiatan pemeliharaan aplikasi perkamusan dapat dibiayai dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada RKAKL serta disertai koordinasi yang berkelanjutan dengan pimpinan dan tim kerja perkamusan di pusat guna memastikan keselarasan pelaksanaan dan pencapaian target.

[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan IV tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan Pemetaan Bahasa Daerah di Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 7 s.d. 9 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mendokumentasikan sebaran, vitalitas, dan karakteristik linguistik bahasa-bahasa daerah di wilayah tersebut, sekaligus memperbarui data peta kebinekaan bahasa yang dikelola oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Kegiatan pemetaan dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta pengisian instrumen survei bahasa yang melibatkan penutur asli dan tokoh adat. Data yang dikumpulkan meliputi variasi dialektal, serta tingkat penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan pendidikan.

Kendala/Permasalahan

1. Narasumber mengalami kesulitan dalam menjawab sejumlah kosakata yang ditanyakan karena belum memahami maksud atau konteks pertanyaan yang disampaikan, sehingga proses pengumpulan data tidak sepenuhnya berjalan optimal.
2. Keterbatasan anggaran berdampak pada terbatasnya waktu pengambilan data, yang pada akhirnya memengaruhi kelengkapan dan kedalaman data serta menyebabkan hasil kegiatan belum maksimal.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Untuk membantu narasumber memahami kosakata yang ditanyakan, digunakan media pendukung berupa gambar-gambar yang merepresentasikan kosakata tersebut sehingga penjelasan dapat diterima dengan lebih jelas dan konkret.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

2. Komunikasi dengan narasumber dilanjutkan melalui telepon atau WhatsApp setelah proses pengambilan data di lapangan, guna melengkapi informasi yang belum diperoleh dan memastikan keakuratan data yang dikumpulkan.

[SK 5] Meningkatkan Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra
[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan IV tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Provinsi Aceh pada 21 s.d. 24 November 2025 di Hotel Ayani Banda Aceh. Kegiatan ini diikuti oleh 163 peserta yang berasal dari kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Barat dan Banda Aceh.

Kendala/Permasalahan

1. Pelaksanaan kegiatan FTBI Tingkat Provinsi Aceh menghadapi kendala koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di kabupaten/kota, terutama dalam penyelarasan jadwal dan kesiapan peserta yang berasal dari wilayah berbeda.
2. Keterbatasan waktu persiapan berdampak pada optimalisasi pembinaan peserta dan kesiapan teknis pelaksanaan lomba, khususnya bagi peserta yang berasal dari daerah dengan akses terbatas.
3. Kendala teknis dan infrastruktur, seperti keterbatasan sarana pendukung, jaringan komunikasi, serta kesiapan lokasi kegiatan, memengaruhi kelancaran beberapa tahapan pelaksanaan festival.
4. Perbedaan tingkat kemampuan dan pengalaman peserta dalam menggunakan bahasa ibu menyebabkan variasi kualitas penampilan, sehingga memerlukan penyesuaian dalam mekanisme penilaian dan pendampingan.
5. Keterbatasan anggaran berdampak pada ruang lingkup kegiatan, jumlah peserta yang dapat difasilitasi, serta dukungan akomodasi dan transportasi bagi peserta dari daerah terpencil.
6. Kondisi cuaca dan faktor geografis di beberapa wilayah Aceh turut memengaruhi mobilitas peserta dan tim pelaksana, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan kehadiran dan perubahan jadwal kegiatan

Strategi/Tindak Lanjut

1. Penyiapan waktu persiapan yang lebih terstruktur disertai pendampingan teknis bagi peserta dan guru pembina, baik secara daring maupun luring, guna meningkatkan kualitas penampilan dan pemahaman terhadap materi lomba.
2. Optimalisasi dukungan teknis dan infrastruktur melalui pengecekan awal sarana prasarana, kesiapan lokasi, serta penyediaan alternatif teknis untuk



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

mengantisipasi kendala jaringan dan peralatan selama pelaksanaan kegiatan.

3. Penyusunan mekanisme penilaian yang adaptif dan proporsional dilakukan untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan peserta, dengan tetap menjunjung prinsip objektivitas dan keadilan penilaian.
4. Pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien diarahkan pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung pada pencapaian tujuan FTBI, termasuk dukungan transportasi dan akomodasi bagi peserta dari wilayah terpencil.
5. Antisipasi faktor cuaca dan kondisi geografis dilakukan melalui penjadwalan yang fleksibel serta penyediaan rencana cadangan, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap berjalan lancar dan target kegiatan dapat tercapai secara optimal.

[SK 6] Meningkatkan fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA

[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan IV tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan Webinar ke-BIPA-an dengan judul (1) "BIPA Dinamis; Pembelajaran Interaktif dan Inovatif" pada 13 November 2025; (2) "Mengenal SKKNI BIPA; Langkah Awal menjadi Pengajar BIPA Profesional" pada 29 Oktober 2025". Total peserta kedua Webinar ini berjumlah 200 orang.

Selain kedua Webinar tersebut Balai Bahasa Provinsi Aceh turut melaksanakan Festival Berbahasa Indonesia bagi Pemelajar Asing di Provinsi Aceh pada 17 s.d. 18 November 2025 di Aula Pacasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. kegiatan ini diikuti oleh 27 orang peserta pemelajar asing yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Aceh, yaitu USK, UIN Ar-Raniry, Unimal, USM, UBBG, dan UNIDA. Para peserta tersebut merupakan pemelajar BIPA yang bersal dari Afganistan, Bangladesh, Batswana, Kamboja, Kepulauan Solomon, Kyrgyzstan, Malaysia, Malawi, Papua Nugini, Rwanda, Tanzania, dan Thailand

Kendala/Permasalahan

1. Keterbatasan kemampuan teknis sebagian peserta dan pengajar BIPA dalam memanfaatkan platform digital menyebabkan perlunya pendampingan tambahan selama kegiatan berlangsung.
2. Pada pelaksanaan Festival Berbahasa Indonesia bagi Pemelajar Asing, perbedaan tingkat kemahiran berbahasa Indonesia peserta memengaruhi keseragaman kualitas penampilan dan pemahaman terhadap materi kegiatan.
3. Kendala koordinasi dengan lembaga mitra dan pemangku kepentingan, baik di dalam maupun luar negeri, berdampak pada penyesuaian jadwal dan kesiapan peserta festival.



4. Keterbatasan anggaran dan sumber daya berdampak pada cakupan kegiatan, jumlah peserta yang dapat difasilitasi, serta dukungan teknis dan nonteknis selama pelaksanaan kegiatan di Provinsi Aceh.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Peningkatan kapasitas pengajar dan peserta BIPA dalam pemanfaatan teknologi dilakukan melalui bimbingan singkat atau simulasi penggunaan platform digital sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. Perancangan materi dan mekanisme kegiatan festival disesuaikan dengan tingkat kemahiran berbahasa Indonesia peserta, sehingga seluruh pemelajar asing dapat berpartisipasi secara aktif dan proporsional.
3. Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga mitra serta pemangku kepentingan dilakukan sejak tahap perencanaan untuk memastikan keselarasan jadwal, kesiapan peserta, dan dukungan pelaksanaan kegiatan.
4. Optimalisasi pemanfaatan anggaran dan sumber daya diarahkan pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung pada pencapaian tujuan webinar dan festival, termasuk dukungan teknis, fasilitasi peserta, dan publikasi kegiatan.

[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Aceh

[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Aceh

Progress/Kegiatan

Sampai dengan akhir Desember 2025, capaian pelaksanaan anggaran Balai Bahasa Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

- Nilai Kinerja Anggaran (NKA): 96,58
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA): 93,15
 - Nilai Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran: 89,02
 - Revisi DIPA: 100
 - Deviasi Halaman III DIPA: 78,04

- Nilai Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran: 89,02

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran Balai Bahasa Provinsi Aceh telah berjalan dengan baik dari sisi kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Kendala/Permasalahan

1. Perencanaan kegiatan belum sepenuhnya matang, sehingga diperlukan penyesuaian jadwal dan anggaran pada tahun berjalan.



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSEI

2. Perubahan kebijakan dan ketentuan teknis, yang memerlukan adaptasi cepat dan berdampak pada kelancaran administrasi.
3. Keterbatasan SDM dan tingginya beban kerja, khususnya pada pengelolaan keuangan dan pelaporan.
4. Proses administrasi dan pengadaan yang memerlukan waktu, sehingga memengaruhi ketepatan pelaksanaan kegiatan.
5. Koordinasi dengan mitra eksternal yang belum optimal, terutama terkait penyesuaian jadwal kegiatan.
6. Kendala geografis dan kondisi wilayah, yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Penguatan perencanaan sejak awal tahun melalui penyusunan jadwal kegiatan dan anggaran yang realistis serta antisipatif terhadap perubahan.
2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi internal, khususnya antara pengelola kegiatan dan keuangan, agar pelaksanaan dan pelaporan berjalan selaras.
3. Optimalisasi peran dan kapasitas SDM melalui pembagian tugas yang proporsional dan peningkatan pemahaman teknis pengelolaan anggaran.
4. Percepatan proses administrasi dan pengadaan, dengan penyiapan dokumen pendukung lebih awal sesuai ketentuan.
5. Penguatan koordinasi dengan mitra eksternal, termasuk penetapan jadwal kegiatan sejak dini dan komunikasi intensif.
6. Penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan lapangan, dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan waktu yang paling efektif.

[SK 7] Meningkatkan tata kelola Balai Bahasa Aceh

[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Aceh minimal A

Progress/Kegiatan

Balai Bahasa Provinsi Aceh secara berkelanjutan melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran setiap bulan untuk memantau capaian kinerja serta tindak lanjut hasil kegiatan. Pada Triwulan IV Tahun 2025, beberapa langkah penguatan akuntabilitas kinerja telah dilakukan, antara lain:

1. Pemutakhiran data dukung SAKIP, termasuk laporan capaian indikator kinerja utama (IKK), indikator kinerja kegiatan (IKKeg), dan indikator keluaran (output) per triwulan.
2. Penyusunan dan pemutakhiran rencana aksi capaian kinerja triwulan IV, yang digunakan sebagai dasar dalam pengendalian kegiatan dan perencanaan triwulan berikutnya.



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- Evaluasi internal terhadap pelaksanaan program berdasarkan hasil rapat evaluasi bulanan, dengan fokus pada ketepatan waktu pelaksanaan, kesesuaian output, dan efisiensi anggaran.
- Koordinasi dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terkait mekanisme pelaporan SAKIP.

Kendala/Permasalahan

- Beberapa satuan kerja masih memerlukan penguatan dalam penetapan indikator kinerja antara (IK antara) agar selaras dengan target output kegiatan.
- Sinkronisasi data capaian antara pelaksana kegiatan dan bagian perencanaan memerlukan waktu lebih lama karena proses verifikasi berjenjang.
- Belum seluruh tim kerja memiliki pemahaman yang merata tentang mekanisme pengisian data dukung kinerja berbasis hasil (*outcome*).

Strategi/Tindak Lanjut

- Menyusun rencana aksi penguatan SAKIP triwulan IV, dengan fokus pada peningkatan kualitas pengukuran kinerja dan kelengkapan data dukung.
- Melaksanakan pendampingan internal SAKIP untuk seluruh tim kerja agar capaian indikator lebih terukur dan konsisten.
- Meningkatkan disiplin pelaporan hasil kegiatan sesuai jadwal rapat evaluasi bulanan agar proses validasi data capaian dapat dilakukan data terkini.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7569.PEG.001] Perhelatan Karya Kreatif Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	Kegiatan	4	4	Rp322.074.000	Rp262.365.140	81.46
2	[DI.7569.QDC.001] Penutur bahasa terbina	Orang	275	275	Rp469.399.000	Rp280.463.000	59.75
3	[DI.7569.QDC.002] Penutur bahasa teruji	Orang	1996	4051	Rp374.880.000	Rp220.484.250	58.81
4	[DI.7569.QDC.003] Generasi muda terbina program literasi	Orang	590	600	Rp339.985.000	Rp196.724.000	57.86
5	[DI.7569.QMA.002] Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan	dokumen	2	3	Rp155.120.000	Rp124.975.000	80.57



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
6	[DI.7569.QMA.003] Produk Penerjemahan	dokumen	51	53	Rp915.807.000	Rp908.855.300	99.24
7	[DU.7566.PEG.001] Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Kegiatan	1	1	Rp1.090.666.000	Rp960.137.404	88.03
8	[DU.7566.QDC.001] Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah	Orang	234	529	Rp505.248.000	Rp346.531.000	68.59
9	[DU.7566.QMA.002] Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra	dokumen	1	1	Rp99.750.000	Rp67.921.040	68.09
10	[DU.7567.BDB.001] Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	Lembaga	45	50	Rp137.902.000	Rp94.152.000	68.27
11	[DU.7567.BDB.002] Komunitas Penggerak Literasi Terbina	Lembaga	44	55	Rp200.000.000	Rp111.571.000	55.79
12	[DU.7568.QDB.001] Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	Lembaga	9	12	Rp98.296.000	Rp96.488.000	98.16
13	[WA.7613.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	1	Rp10.000.000	Rp5.076.000	50.76
14	[WA.7613.EBA.958] Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Dokumen	1	1	Rp163.510.000	Rp73.520.000	44.96
15	[WA.7613.EBA.960] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Dokumen	1	1	Rp78.662.000	Rp38.193.000	48.55
16	[WA.7613.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	Rp263.877.000	Rp185.102.055	70.15
17	[WA.7613.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	Rp4.521.863.000	Rp4.399.190.140	97.29



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
18	[WA.7613.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1	2	Rp90.760.000	Rp42.673.000	47.02
19	[WA.7613.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	5	5	Rp92.500.000	Rp39.825.420	43.05
20	[WA.7613.EBD.974] Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	1	1	Rp36.345.000	Rp15.190.000	41.79
Total Anggaran					Rp9.966.644.000	Rp8.469.436.749	84.98

D. Rekomendasi Pimpinan

Berdasarkan hasil capaian kinerja Balai Bahasa Provinsi Aceh pada Triwulan IV Tahun 2025 yang merupakan capaian akhir tahun berjalan, secara umum pelaksanaan program telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh kegiatan yang direncanakan telah terealisasi, bahkan sebagian capaian melampaui target yang ditetapkan, baik dari sisi fisik maupun keuangan. Pelaksanaan program berjalan efektif dan terkoordinasi dengan baik, sehingga mendukung ketercapaian sasaran kinerja secara optimal.

Capaian kegiatan pada bidang pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra, serta literasi terlaksana sesuai dengan target dan indikator kinerja. Berbagai kegiatan, seperti bimbingan teknis literasi membaca, penyuluhan bahasa bagi tenaga administrasi, serta revitalisasi bahasa daerah di berbagai kabupaten/kota, telah dilaksanakan secara menyeluruh dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas literasi peserta didik, penutur bahasa, serta tenaga pendidik di daerah.

Dengan tercapainya seluruh target kinerja pada Triwulan IV ini, Balai Bahasa Provinsi Aceh berhasil memastikan bahwa seluruh output dan outcome program terukur, terdokumentasi dengan baik, serta selaras dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian ini menjadi dasar yang kuat untuk penguatan dan pengembangan program pada periode selanjutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pimpinan memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan anggaran agar pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya lebih terukur, tepat waktu, dan selaras dengan target yang ditetapkan.
2. Mendorong penguatan koordinasi internal antara penanggung jawab kegiatan dan pengelola keuangan guna memastikan kesesuaian antara pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan pelaporan kinerja.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia melalui pembagian tugas yang jelas dan peningkatan pemahaman teknis, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan administrasi pelaporan.
4. Mempercepat penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan, dengan menyiapkan dokumen pendukung sejak awal pelaksanaan kegiatan.
5. Memperkuat koordinasi dengan mitra dan pemangku kepentingan, terutama dalam penetapan jadwal dan komitmen pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien.
6. Melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan kegiatan dan kinerja anggaran, sebagai dasar perbaikan



Banda Aceh, 20 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH**

Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096; Pos-el (E-mail): balaiBahasaaceh@kemdikbud.go.id
Laman: bbaceh.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 0043/15.1/PR.04.02/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN)
PADA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH T.A. 2025**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Aceh perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja T.A. 2025;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam bagian lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) T.A. 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai/Kantor Bahasa; dan
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN) PADA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH T.A. 2025
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja T.A. 2025;
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) mempunyai tugas
1. Melakukan indentifikasi bahan/data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen LAKIN;
 2. Mengumpulkan data kinerja
 3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyusunan dokumen LAKIN;
 4. Menyusun dokumen LAKIN yaitu perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, reviu atas laporan kinerja;
 5. Memastikan data dukung LAKIN lengkap dan sudah sesuai dengan ketentuan; dan
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada (DIPA) Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA BALAI BAHASA
PROVINSI ACEH



Umarsolikhan

UMARSOLIKHAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
NOMOR 0043/15.1/PR.04.02/2025
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
(LAKIN) PADA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
T.A. 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN)
PADA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH T.A. 2025**

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Drs. Umar Solikhan, M.Hum.	196808081998021001	Penanggung Jawab
2	Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.	198203302006041003	Ketua
3	Nurus Syahri Nasution, S.Pd.	199709252022032010	Anggota
4	Rizka Chairunnisa, S.E.	199712052020122006	Anggota
5	Lili Andriani, A.Md.	199109012020122020	Anggota
6	Muhammad Sabri, S.E.	199811142024211006	Anggota

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 3 Januari 2025
KEPALA BALAI BAHASA
PROVINSI ACEH,



UMAR SOLIKHAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096; Pos-el (E-mail): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id
Laman: bbaceh.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 0045/I5.1/PR.04.01/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA (LAKIN) PADA
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH T.A. 2025

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Aceh perlu menetapkan Tim Reviu Laporan Kinerja T.A. 2025;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam bagian lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Reviu Laporan Kinerja (LAKIN) T.A. 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai/Kantor Bahasa; dan
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA (LAKIN) PADA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH T.A. 2025
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh sebagai Tim Reviu Laporan Kinerja T.A. 2025;
- KEDUA : Tim Penyusun Reviu Laporan Kinerja (LAKIN) mempunyai tugas
1. Melakukan evaluasi laporan kinerja untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat, andal dan valid;
 2. Melakukan verifikasi laporan kinerja telah sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku, dan;
 3. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan kinerja.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada (DIPA) Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal
KEPALA BALAI BAHASA
PROVINSI ACEH,

UMAR SOLIKHAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
NOMOR 0045/I5.1/PR.04.01/2025
TENTANG TIM REVIU LAPORAN KINERJA (LAKIN)
PADA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH T.A. 2025

TIM REVIU LAPORAN KINERJA (LAKIN)
PADA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH T.A. 2025

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Drs. Umar Solikhan, M.Hum.	196808081998021001	Penanggung Jawab
2	Agus Priatna, S.E., Ak., M.M.	197708082006041002	Ketua
3	Cut Ida Agustina	199008012019022007	Sekretaris
4	Atikah Adoria, S.Pd.	199611202020122012	Anggota
5	Subhan, S.P., M.Pd.	197505272006041008	Anggota

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 3 Januari 2025
KEPALA BALAI BAHASA
PROVINSI ACEH,



UMAR SOLIKHAN

**Pernyataan Telah Direviu
Balai Bahasa Aceh
Tahun Anggaran 2025**

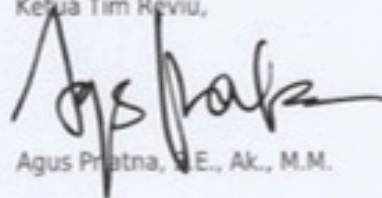
Kami telah mereviu laporan kinerja Balai Bahasa Aceh untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Balai Bahasa Aceh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banda Aceh, 29 Januari 2026

Ketua Tim Reviu,



Agus Pratna, S.E., Ak., M.M.

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	<input checked="" type="checkbox"/>



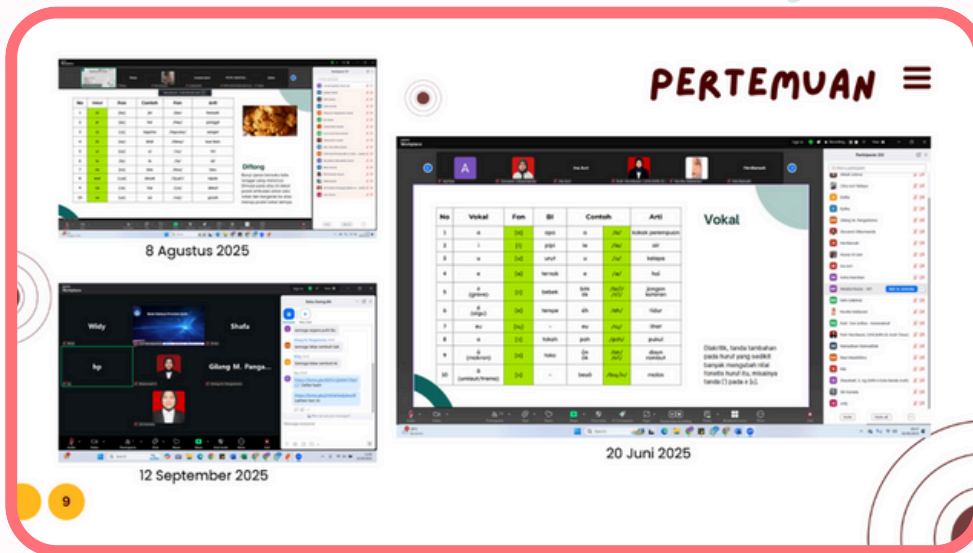
	Pernyataan	Check List
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana strategis	<input checked="" type="checkbox"/>
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	<input checked="" type="checkbox"/>
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	<input checked="" type="checkbox"/>
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	<input checked="" type="checkbox"/>



Rekapitulasi Penghargaan Tahun 2025

No.	Penghargaan	Instansi Pemberi	Keterangan
1	SAKIP dengan Predikat A pada tahun 2024	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Aceh mendapatkan penghargaan atas predikat SAKIP A yang diperoleh tahun 2024
2	Revitalisasi Bahasa Daerah	Pemerintah Kabupaten Pidie	Balai Bahasa Provinsi Aceh mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Pidie atas dukungan terhadap pelestarian bahasa dan sastra daerah Aceh dalam program Revitalisasi Bahasa Daerah Aceh
3	Kerjasama yang dilaksanakan	Universitas Almuslim Bireun	Balai Bahasa Provinsi Aceh mendapatkan penghargaan atas kerja sama yang telah dilaksanakan dengan Universitas Al-Muslim diantaranya narasumber, pengelola UKBI, dan pelaksanaan UKBI
4	Penghargaan Terbaik II Adu Kreasi Duta Bahasa Se-Indonesia Tahun 2025	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Balai Bahasa Provinsi Aceh mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam ajang Adu Kreasi Duta Bahasa se-Indonesia Tahun 2025
5	Peran dan Dukungan Kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Dalam Upaya Pelestarian dan Pengembangan bahasa Daerah Aceh	Pemerintah Kabupaten Pidie	Balai Bahasa Provinsi Aceh mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Pidie atas dukungan terhadap pelestarian bahasa dan sastra daerah Aceh dalam program Revitalisasi Bahasa Daerah Aceh
6	Peran dan Dukungan Kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Dalam Upaya Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Daerah Aceh	Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	Balai Bahasa Provinsi Aceh mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Pidie Jaya atas dukungan terhadap pelestarian bahasa dan sastra daerah Aceh dalam program Revitalisasi Bahasa Daerah Aceh
7	Partisipasi Kegiatan Rakorwil III majelis Dikdasmen dan PNF dan Seminar Nasional di BPMP	Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Aceh	Balai Bahasa Provinsi Aceh mendapatkan penghargaan atas partisipasi pada kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah III Majelis Dikdasmen dan PNF Aceh dan Seminar Nasional Pendidikan yang diselenggarakan di BPMP Aceh

No	Inovasi	Keterangan
1	Kelas Daring Bahasa Aceh bagi Pemula	"Kelas Daring bahasa Aceh bagi Pemula" yang diselenggarakan secara gratis sebulan sekali, termasuk bagi para ASN, mahasiswa, pelajar, diaspora, maupun masyarakat umum lainnya yang tertarik mempelajari bahasa Aceh.
2	Buku Saku Digital	Buku saku digital Bahasa Indonesia dalam naskah dinas ini merupakan panduan praktis yang ditujukan kepada tenaga administrasi dalam membuat naskah dinas yang sesuai dengan kaidah. Buku saku dibuat dalam format <i>flipbook</i> dengan harapan dapat menjangkau kemudahan pengguna dalam menemukan informasi yang dibutuhkan di mana dan kapan saja.



Kelas Daring Bahasa Aceh bagi Pemula



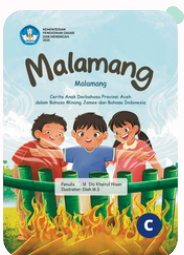
Buku Saku Digital

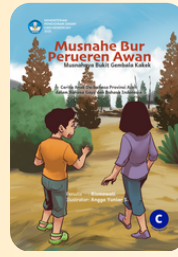
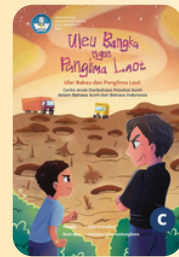
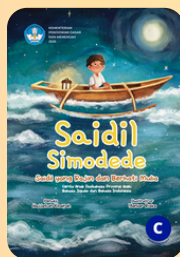
No	Judul Bahasa Sumber	Judul Terjemahan	Penerbit
1	<i>Petukel</i>	Labu	Kemendikdasmen
2	<i>Rahsia Alien Mujib</i>	Rahasia Alien Mujib	Kemendikdasmen
3	<i>Pinto Rahsia Banta</i>	Pintu Rahasia Banta	Kemendikdasmen
4	<i>Toma alek Kedang Misterius</i>	Toma dan Gendang Misterius	Kemendikdasmen
5	<i>Malaere</i>	Mencari Siput Mata Lembu	Kemendikdasmen
6	<i>Adan Mengenal Lelesen i Empus Kupi</i>	Adan Mencari Lelesen di Kebun Kopi	Kemendikdasmen
7	<i>Piasan Malam</i>	Pagelaran Malam	Kemendikdasmen
8	<i>Panglima Arif dan Senapang Buluh</i>	Panglima Arif dan Senapan Bambu	Kemendikdasmen
9	<i>Balumbili Sang Plisi I</i>	Balum Bili Sang Polisi Air	Kemendikdasmen
10	<i>Sapa Seuniman Seumapa</i>	Menyapa Seniman Seumapa	Kemendikdasmen
11	<i>Mimpi Membuat Kincir Aer</i>	Mimpi Membuat Kincir Air	Kemendikdasmen
12	<i>Gala ngon Gania</i>	Gala dan Gania	Kemendikdasmen
13	<i>Pasuken Lut Tawar</i>	Laskar Lut Tawar	Kemendikdasmen
14	<i>Satu, Due, Tige, Mule!</i>	Satu, Dua, Tiga, Mulai!	Kemendikdasmen
15	<i>Sue Rapai dari Ukail</i>	Dentuman Rapai dari Ukail	Kemendikdasmen
16	<i>Belut Gokheng Bainen Umak</i>	Belut Goreng Buatan Ibu	Kemendikdasmen
17	<i>Fikri ngon Tambang Meuh Geureudong</i>	Fikri dan Tambang Emas Geureudong	Kemendikdasmen
18	<i>Petemun Kale urum Lembide</i>	Pertemuan Kale dan Lembide	Kemendikdasmen
19	<i>Malamang</i>	Malamang	Kemendikdasmen
20	<i>Bara ngen Kota Habu Itom</i>	Bara dan Kota Debu Hitam	Kemendikdasmen
21	<i>Alya alek Dunia singa Sepi</i>	Alya dan Dunia yang Sunyi	Kemendikdasmen
22	<i>Bantai Barô Baren</i>	Bantal Baru Baren	Kemendikdasmen

No	Judul Bahasa Sumber	Judul Terjemahan	Penerbit
23	<i>Petualangan ke Negekhi Panton</i>	Petualangan ke Negeri Pantun	Kemendikdasmen
24	<i>Mangasila: Waresan Asen Simeulue</i>	Mangasila: Warisan Laut Simeulue	Kemendikdasmen
25	<i>Sihir Penuripni Rara</i>	Sihir Pemicu Api	Kemendikdasmen
26	<i>Nyan Kung-Kung Bukon Geugasi</i>	Itu Kung-Kung Bukan Geugasi	Kemendikdasmen
27	<i>Detektif Sains Kota Nago</i>	Detektif Sains Kota Naga	Kemendikdasmen
28	<i>Reje Bujang si Manuk Jampuk</i>	Reje Bujang si Burung Rangkong Badak	Kemendikdasmen
29	<i>Si Kalek: Bapatualang ka Danau Lauik Bangko</i>	Si Kalek: Berpetualang di Danau Laut Bangko	Kemendikdasmen
30	<i>Berbukhu Ikan Jurong di Sunge Tamiang</i>	Berburu Ikan Jurung di Sungai Tamiang	Kemendikdasmen
31	<i>Meureuyam Karbet</i>	Meriam Karbit	Kemendikdasmen
32	<i>Penjage Deleng Leuser</i>	Penjaga Hutan Leuser	Kemendikdasmen
33	<i>Cangguek Bineh Krueng</i>	Katak Tepi Sungai	Kemendikdasmen
34	<i>Saidil Simodede</i>	Saidil yang Rajin dan Berhati Mulia	Kemendikdasmen
35	<i>Uleu Bangka ngon Panglima Laot</i>	Ular Bakau dan Panglima Laut	Kemendikdasmen
36	<i>Banta ngon Glayang Impian</i>	Banta dan Layangan Impian	Kemendikdasmen
37	<i>Ariga khut Anak Mawas si Mekhuggah</i>	Ariga dan Anak Orang Utan yang Terluka	Kemendikdasmen
38	<i>Takhien khak Ate: Kisah Lina ni Balik Sengep</i>	Tarian dari Hati: Kisah Lina di Balik Senyap	Kemendikdasmen
39	<i>Waw! Gutel Tradisional, Rasae Internasional</i>	Waw! Gutel Tradisional, Rasa Internasional	Kemendikdasmen
40	<i>Petualangan bak le Teureujun</i>	Petualangan ke Air Terjun	Kemendikdasmen
41	<i>Petualangan Lam Uteun Pulo Meuria</i>	Petualangan di Hutan Pulo Meuria	Kemendikdasmen
42	<i>Bicer Maen Nep-Nep En</i>	Bicer Bermain Petak Umpet	Kemendikdasmen
43	<i>Arsyila Akak nan Mendei</i>	Arsyila Kakak yang Keren	Kemendikdasmen
44	<i>Abusyiklo Hayeu!</i>	Abusyikku Hebat!	Kemendikdasmen
45	<i>Peue Neutaguen Uroe Nyoe, Mak?</i>	Masak Apa Hari Ini, Bu?	Kemendikdasmen

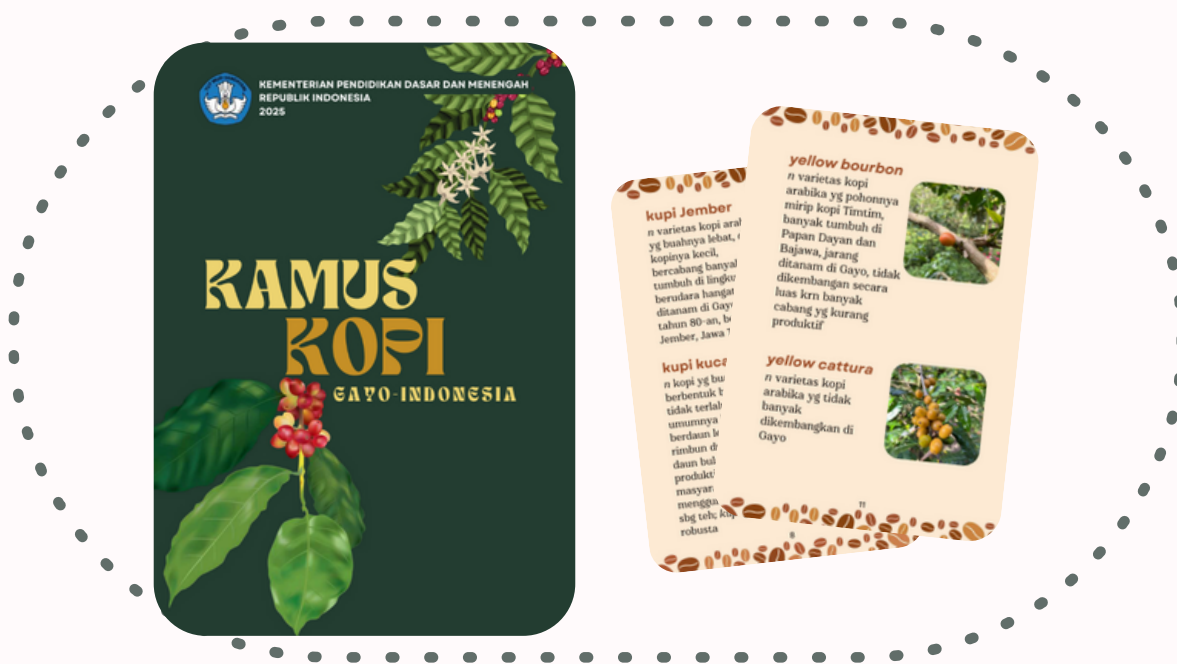


No	Judul Bahasa Sumber	Judul Terjemahan	Penerbit	Tahun
46	<i>Bijeh Pala</i>	Biji Pala	Kemendikdasmen	2025
47	<i>Musnahe Bur Perueren Awan</i>	Musnahnya Bukit Gembala Kakek	Kemendikdasmen	2025
48	<i>Jak Meuen u Lembah Seulawah</i>	Berpetualang ke Lembah Seulawah	Kemendikdasmen	2025
49	<i>Nyoe Seulanga</i>	Ini Seulanga	Kemendikdasmen	2025
50	<i>Lon ngon Paya Sapi</i>	Aku dan Paya Sapi	Kemendikdasmen	2025
51	<i>Miriek ngon Tulo</i>	Burung Gereja dan Burung Manyar	Kemendikdasmen	2025
52	<i>Bada Pisang Sale</i>	Pisang Sale Goreng	Kemendikdasmen	2025
53	<i>Ekspedisi Cilik, Bantang ni Uyem den Atu Berukir Gayo Umang Isaq</i>	Ekspedisi Cilik, Pohon Pinus dan Batu Berukir Gayo Umang Isaq	Kemendikdasmen	2025





No	Judul Kamus	Penyusun	Jumlah Kosakata
1	Kamus Kopi Gayo-Indonesia	Zulfahmirda Matondang, Cut Ida Agustina, Istika Suri	156
2	Kamus Bahasa Daerah Aceh (KBDA) Daring www.kamusbbpa.kemendikdasmen.go.id (Pemutakhiran)	Zulfahmirda Matondang, Istika Suri, Cut Ida Agustina	982
3	Inventarisasi Kosakata Bahasa Gayo untuk Pemerayaan KBBI	Balai Bahasa Provinsi Aceh	608



Kamus Kopi Gayo-Indonesia

Rekapitulasi Lembaga Terfasilitasi Kebahasaan Tahun
2025

No.	Nama Lembaga	Alamat
1	SD IT HUDA WAN NUR	Jl. T.Chik Ditiro, Komplek Bupati, Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh.
2	SD NEGERI 1 LANGSA	Jl. Cut Nyak Dhien, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh.
3	SD NEGERI 1 MATANG SEULIMENG	Jln. Sudirman, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh
4	SD NEGERI 11 LANGSA	Jln. Muhayatsyah No 10, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh.
5	SD NEGERI 5 LANGSA	Jln. T. Chik Thaeb, Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh.
6	SD NEGERI 6 LANGSA	Jl. Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa
7	SD NEGERI LHOK BANIE	Jln. Prof. A. Majid Ibrahim, LHOK BANIE, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh.
8	SDN 1 PB TUNONG	Jl. Cik Di Tiro, Langsa, Aceh,
9	SMA MUHAMMADIYAH LANGSA	JL. W.R. Supratman No.7 , Kamp. Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh.
10	SMA NEGER 5 LANGSA	Jalan Kebun Baru, Geudubang Aceh, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh.
11	SMA NEGERI 1 LANGSA	JL. Jenderal A. Yani, Paya Bujok Seuleumak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh.
12	SMA NEGERI 2 LANGSA	Jl. Medan Banda Aceh Km.4 Langsa, Sungai Lueng, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa, Aceh.
13	SMA NEGERI 3 LANGSA	JL. Cut Nyak Dhien, No. 27, Kamp. Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh.
14	SMA NEGERI 4 LANGSA	Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, Kota Langsa.
15	SMA SWASTA JAYA LANGSA	Jl. Jend. A. Yani, Paya Bujok Seuleumak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh.
16	SMA UNGGUL CUT NYAK DHIEH	JL. Perumnas No. 45, Paya Bujok Seuleumak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh.
17	SMK NEGERI 1 LANGSA	Jl. Syiah Kuala, Lr. Puetua Luwi, Tualang Teungoh, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh.
18	SMK NEGERI 2 LANGSA	Jl. A. Yani, Paya Bujok Seuleumak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh.

No.	Nama Lembaga	Alamat
19	SMK NEGERI 3 LANGSA	JL. R.A. Kartini No. 9 B, Paya Bujok Seuleumak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh.
20	SMK NEGERI 4 LANGSA	Jl. Istiqomah No. 12, Desa Alue Dua Bakaran Batee, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa
21	SMK NEGERI 5 LANGSA	JLI. Perumnas Langsa, Birem Puntong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh.
22	SMK PERBANKAN GRAHA MEDIA	JL. A. Yani NO. 54 Kota Langsa, Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh.
23	SMKN 6 LANGSA	JLI. Perumnas Langsa, Birem Puntong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh.
24	SMP NEGERI 10 LANGSA	Jln. Langsa-medan Km. 8,5, Seuneubok Antara, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa, Aceh.
25	SMP NEGERI 2 LANGSA	Jln. Tgk. Chik Ditiro, Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh.
26	SMP NEGERI 3 LANGSA	Jln. Jend. A. Yani Langsa, Paya Bujok Seuleumak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh.
27	SMP NEGERI 4 LANGSA	JL. Prof. Majid Ibrahim, Matang Seulimeng, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh.
28	SMP NEGERI 5 LANGSA	Jl. Jend A. Yani Gg. Pusri, Teungoh, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh.
29	SMP NEGERI 7 LANGSA	Jln. Asam Peutik, Simpang Wie, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa, Aceh.
30	SMP NEGERI 9 LANGSA	Jl. Panglima Polem No. 34, Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh.
31	SEKDA KOTA LANGSA	Jl. A. Yani No. 1, Langsat, Nanggroe Aceh Darussalam
32	DINAS PENDIDIKAN LANGSA	JL H. Agus Salim, No. 10, Langsa Kota, Tualang Teungoh, Langsa Kota, Kota Langsa
33	CABANG DINAS PENDIDIKAN	Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, Seuriget, Kec. Langsa Baru., Kota Langsa, Aceh
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	Jl. Jend. A Yani No.74, Gampong Jawa, Langsa Kota, Kota Langsa
35	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI	Jl. Panglima Polem kompleks perkantoran No.4, Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota
36	DINAS KOMUNIKASI	Jl. Tualang Teungoh, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa

No.	Nama Lembaga	Alamat
37	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jl. T. Chik Thaib No.7, Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa
38	DINAS PENANAMAN MODAL	Jl. Panglima Polem No.41, Gp. Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa
39	BAPPEDA	Jl. Matang Seulimeng, Kec. Langsa Bar., Kota Langsa
40	BKPSDM	Jl. Sungai Pauh, Kec. Langsa Bar., Kota Langsa
41	KESBANGPOL	Jl. Matang Seulimeng, Kec. Langsa Bar., Kota Langsa
42	CAMAT LANGSA KOTA	Jl. Gampong Teungoh, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa
43	CAMAT LANGSA BARAT	Jl. Seuriget, Kec. Langsa Bar., Kota Langsa, Aceh
44	CAMAT LANGSA TIMUR	Jl. Alue Pineung, Langsa Timur, Alue Pineung, Kec. Langsa Tim., Kota Langsa
45	CAMAT LANGSA LAMA	Jalan Baru No.1 Gp, Sidodadi, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa
46	CAMAT LANGSA BARO	Jl. Geudubang Aceh, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa
47	HOTEL KARTIKA	Jl. Jenderal Ahmad Yani No.214, Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa
48	HOTEL HARMONI	Jalan Jend.A. Yani FXJ4+294 Langsa Kota, Paya Bujok Seuleumak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa5
49	HOTEL CHAMA	Jl. Jenderal Ahmad Yani, Paya Bujok Seuleumak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa
50	VITRA TIRTA RAYA WATERBOOM	Paya Bujok Teungoh, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa



Rekapitulasi Lembaga Terfasilitasi BIPA Tahun 2025

No.	Nama Lembaga	Alamat
1	Kantor Urusan Internasional (Office of International Affairs) Universitas Syiah Kuala	Kota Banda Aceh
2	Pusat Layanan Internasional (Language Development Center) UIN Ar-Raniry	Kota Banda Aceh
3	Pusat BIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe
4	Pusat Pengembangan Kurikulum dan Bahasa Universitas Teuku Umar	Kabupaten Aceh Barat
5	BIPA Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Malikussaleh	Kota Lhokseumawe
6	BIPA FKIP Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kota Banda Aceh
7	BIPA Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Samudra	Kota Langsa
8	Pusat BIPA Institut Seni dan Budaya Indonesia Aceh	Kabupaten Aceh Besar
9	BIPA Universitas Almuslim	Kabupaten Bireuen
10	Pusat BIPA IAIN Langsa	Kota Langsa
11	BIPA Universitas Muhammadiyah Mahakarya	Kabupaten Bireuen
12	BIPA UIN Sultanah Nahrasyah	Kota Lhokseumawe

Rekapitulasi Duta Bahasa Tahun 2025

No.	Nama Peserta	Asal Sekolah/Universitas	No.	Nama Peserta	Asal Sekolah/Universitas
1	Puja Mulya Shifa	Universitas Syiah Kuala	14	M. Rizwan	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2	Rahmi Rizkia	Universitas Malikussaleh	15	Aulia Rahman	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
3	Nurul Safitri	Universitas Bina Bangsa Getsempena	16	Aldira Malini	Universitas Syiah Kuala
4	Nayla Salsabila	IAIN Lhokseumawe	17	Sahlan Uzza	Lulusan – SMA Swasta Jami'ah Al Aziziyah
5	Lisa Selian	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	18	Isna Mauliana	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
6	Zaitun nisa	Universitas islam kebangsaan Indonesia(UNIKI)	19	Silmi Kaffah	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
7	Khairul Umuri	Universitas Bina Bangsa Getsempena	20	Syifa safira	Lulusan SMK Negeri 1 Bireuen
8	Ghufran Indika	Universitas Syiah Kuala	21	Qanun Meukuta Alam Alasyi	Universitas Syiah Kuala
9	Bahtera Khoiruddin Lubis	Universitas Malikussaleh	22	Syadza Valin Feblyoni	Poltekkes Kemenkes Aceh
10	Nurlaila	Universitas Syiah Kuala	23	Risty Anisa	Universitas Syiah Kuala
11	Bahiratu AUFAL Jannah	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	24	Iklima	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
12	Syarifah Azzura Nabila	Lulusan MA Darul Ulum	25	Bilqis Rizki Ilahi	Universitas Syiah Kuala
13	Riza Maghfirah	Politeknik Pariwisata Negeri Medan	26	Muji Budiman	Universitas Malikussaleh

No.	Nama Peserta	Asal Sekolah/Universitas	No.	Nama Peserta	Asal Sekolah/Universitas
27	M. Khannan Al Faraby	Universitas Syiah Kuala	42	Mutia khairunnisa	Universitas Syiah Kuala
28	Rizka Intan Meutuah	Universitas Syiah Kuala	43	Nelsi Khairunnisa	Universitas Syiah Kuala
29	Saskya Tanzilal	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	44	Cut Tiara Maulia	STAIN Teuku Dirundeng Meulaboh
30	Rahmat Al Qausar	Lulusan SMAN 8 Banda Aceh	45	Nasyika anatsa	Universitas Malikussaleh
31	Cut Yuli Irada	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	46	Putri Zahirah	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
32	Najla Nur Salsabila	Universitas Syiah Kuala	47	Gebrina Rizky Muvindra Putri	Poltekkes Kemenkes Aceh
33	Rahadatul 'Aisy	Universitas Syiah Kuala	48	Putri Jamilah	Universitas Syiah Kuala
34	Hizqil Syauqi	Universitas Syiah Kuala	49	Ahmad Hazim Fakhri	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
35	Nurul Maulina	Universitas Syiah Kuala	50	Salma Nadia	IAIN Lhokseumawe
36	Nadya Pratiwi Daniela	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	51	Nora Hanifa	Universitas Malikussaleh
37	Dhiyaa Ulhikmah	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	52	Muzalna Rafli	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
38	Nadia	Universitas Syiah Kuala	53	Syifa Ashoura Al Safa	Universitas Syiah Kuala
39	Muhammad Haykal	Universitas Syiah Kuala	54	Riska	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
40	M. Surya Tanjung	Universitas Teuku Umar	55	Nora Azzuhra Jufni	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry & Universitas Syiah Kuala
41	Naffa Sakinah	Universitas Syiah Kuala	56	Ridha Fitria	Universitas Syiah Kuala

No.	Nama Peserta	Asal Sekolah/Universitas	No.	Nama Peserta	Asal Sekolah/Universitas
57	Mhd. Hafiz Daniel	Universitas Syiah Kuala	69	OKTAVIA FITRI MAHARANI	Lulusan SMA Negeri 1 Labuhan haji barat
58	Nata Aina Rizky	Universitas Syiah Kuala	70	Cut Tara Nazilla	Universitas Malikussaleh
59	Novita Manik	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	71	Putri Mulyana	Universitas Almuslim
60	Ananda Malisya	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	72	Kamiliya Ulfa	Lulusan MAS Yapena Arun
61	Zaky Murtadha	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	73	Syafura La Djuna	Universitas Syiah Kuala
62	Muhammad Hafidh	Lulusan Misbahul Ulum	74	Muhammad Iqbal	Lulusan Da'I MUI Pusat
63	T. Akmal Rizki Phonna	IAIN Lhokseumawe	75	Muhammad Aulia	Universitas Syiah Kuala
64	Muhammad azizi	IAIN Langsa	76	Rizki Al Kausar	Universitas Syiah Kuala
65	Renni Sukma Annisa	Universitas Syiah Kuala	77	Syifa Amalia	Universitas Syiah Kuala
66	Putroe Ulva Ryanda	Universitas Syiah Kuala	78	Fajar Hidayat	Universitas Syiah Kuala
67	Agus hikmadi	Universitas Muhammadiyah Aceh	79	Icha Ananda putri	Universitas Syiah Kuala
68	Rifkatur ramadhani	Lulusan SMAN 1 Teupah	80	Suci Amelia Putri	Universitas Syiah Kuala



Rekapitulasi Komunitas Literasi Tahun 2025

No.	Nama Komunitas	Alamat	No.	Nama Komunitas	Alamat
1	Sigupai Mambaco	Aceh Barat Daya	15	Perpustakaan Desa Padang Hilir	Aceh Barat Daya
2	Perpustakaan Gampong Paya	Aceh Barat Daya	16	Club Baca Seulawah	Aceh Barat Daya
3	Perpustakaan Desa Seunelop	Aceh Barat Daya	17	Perpustakaan Desa Alue Manggota	Aceh Barat Daya
4	Laskar Rencong Sigupai	Aceh Barat Daya	18	Rumah Relawan Remaja	Aceh Barat Daya
5	Perpustakaan Desa Meurandeh	Aceh Barat Daya	19	Ruang Berbagi ilmu (RUBI)	Aceh Barat Daya
6	Perpustakaan Desa Lhok Puntoy	Aceh Barat Daya	20	Muda Literasi	Aceh Barat Daya
7	Forum Aceh Literasi	Aceh Barat Daya	21	Komunitas Keta Buku	Aceh Barat Daya
8	Perpustakaan Desa Seunaloh	Aceh Barat Daya	22	Perpustakaan Pintar Membaca	Aceh Barat Daya
9	Perpustakaan Desa Durian Rampak	Aceh Barat Daya	23	Pustaka Faura	Banda Aceh
10	Perpustakaan Gampong Kuta Jeumpa	Aceh Barat Daya	24	Perpustakaan Suka Damai	Banda Aceh
11	Storyteller Aceh Club Abdya	Aceh Barat Daya	25	TBM Aneuk Meutuah	Banda Aceh
12	Komunitas Tali Baca	Aceh Barat Daya	26	TBM Ramadhani	Banda Aceh
13	Rumah Baca Saleum Cahaya	Aceh Barat Daya	27	TBM Kahfis Aceh	Banda Aceh
14	Perpustakaan Sumber Ilmu	Aceh Barat Daya	28	TBM Seruni	Banda Aceh

No.	Nama Komunitas	Alamat	No.	Nama Komunitas	Alamat
29	Pustaka Kampung Impian	Banda Aceh	43	Pojok Baca Asy Syifa	Banda Aceh
30	TBM Humairah	Banda Aceh	44	TBM Kahfis	Banda Aceh
31	TBM Sophie Salsabila	Banda Aceh	45	PW Forum TBM Aceh	Banda Aceh
32	TBM Seulanga	Banda Aceh	46	TBM Ar Rasyid	Banda Aceh
33	Relima Banda Aceh	Banda Aceh	47	TBM Cahaya	Banda Aceh
34	Komunitas Literasi Kayang	Banda Aceh	48	TBM Lingkar Pena	Banda Aceh
35	Lambheu Membaca	Banda Aceh	49	Kampung Dongeng Aceh	Banda Aceh
36	Akademi warung penulis	Banda Aceh	50	TurunTangan	Banda Aceh
37	Sophie's Sunset Library	Banda Aceh	51	Literasi Teungku Chiek Pante Geulima	Banda Aceh
38	House Creative,	Banda Aceh	52	Ruang Baca	Banda Aceh
39	TPM Tanyoe	Banda Aceh	53	FTBM Aceh	Banda Aceh
40	TBM Rumah Baca Rangkang Pustaka	Banda Aceh	54	TBM Warung Penulis	Banda Aceh
41	TBM Rumah Belajar Assuyuthi	Banda Aceh	55	Cahaya Kepintaran	Banda Aceh
42	TBM Cinta Baca	Banda Aceh			



Rekapitulasi Komunitas Sastra Tahun 2025

No.	Nama Komunitas	Alamat
1	Sanggar Seni Rampai Tamiang	Kampung Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
2	Duta Seumapa Grup	Dusun Utara, Gampong Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen
3	Rumöh Seni Glinyoèng Art	Jalan Bangau, Nomor 21 b. Komplek Perumnas Bireuen Indah, Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.
4	Meurak Jeumpa Institut	Gampong Paloh Raya Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara
5	Sanggar Seni Seueng Samlakoe	Desa Cot Puklat, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Acèh Besar.
6	Sanggar Buraq Lam Tapa	Desa Layung, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat.
7	Sanggar Lampoeh Raya	Desa Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat
8	Sanggar Cahayo Fajar	Desa Pulo Kambing, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan
9	Ratuh	Desa Paya Dapur, kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan
10	Landok Sampot	Desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan.
11	Baloeh Suetia	Gampoeng Ukee. Jalan Tgk. Syik, Trueung Campli, Pidie
12	Group Dikee Aceh "Meualon"	Gampong Kampong Pukat, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie
13	Kopi Sentral Aceh (Komunitas Pelestari Seni dan Tradisi)	Gampong Blang Baroh, Kecamatan Geulumpang Baro, Pidie
14	Group Seuramoe Adat PAMURA	Beureunun Mutiara, Kabupaten Pidie
15	Nanggroe Di Batee	Batee, Kabupaten Pidie

No.	Nama Komunitas	Alamat
15	Nanggroe Di Batee	Batee, Kabupaten Pidie
16	Sanggar Seni Narit Maja	Sekretariat MAA Pidie jaya
17	Rangkang Sastra Bireuen	Gampong Baro, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen
18	Kampung Dongeng Aceh	Lamgapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar
19	Gemasastrin, Universitas Syiah Kuala	Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
20	Forum Lingkar Pena (FLP) Aceh	Kota Banda Aceh
21	Komunitas Kanot Bu	Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh
22	Komunitas Beulangong Tanoh	Mesjid Runtoh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie
23	The Gayo Institute	Takengon, Kabupaten Aceh Tengah
24	Forum Beru Gayo	Takengon, Kabupaten Aceh Tengah
25	Komunitas Sastra Bukit Barisan	Takengon, Kabupaten Aceh Tengah



Rekapitulasi Jumlah yang Terimbas RBD Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Guru Master	Jumlah Guru yang Diimbaskan	Jumlah Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
1	Kota Banda Aceh	50	587	3	50	5172
2	Kabupaten Aceh Besar	77	1260	1	-	9657
3	Kabupaten Pidie	99	1259	0	-	4850
4	Kabupaten Bireuen	50	1036	3	50	4.072
5	Kabupaten Aceh Barat	50	455	3	50	3.606
6	Kabupaten Bener Meriah	48	849	2	48	7356
7	Kabupaten Aceh Tengah	90	411	0	-	2726
8	Kabupaten Gayo Lues	62	336	0	-	2233
Total		526	6193	12	198	39672

No.	Nama Sekolah	Alamat
1	SMA Negeri 1 Meulaboh	Kabupaten Aceh Barat
2	SMA Negeri 3 Meulaboh	Kabupaten Aceh Barat
3	SMA Negeri 4 Wira Bangsa Meulaboh	Kabupaten Aceh Barat
4	SMA Negeri 2 Meulaboh	Kabupaten Aceh Barat
5	SMP Negeri 1 Julok	Kabupaten Aceh Timur
6	SMP Negeri 1 Pante Bidari	Kabupaten Aceh Timur
7	SMP Negeri Rantau Selama	Kabupaten Aceh Timur
8	SMP Negeri 1 Peureulak	Kabupaten Aceh Timur
9	SD Negeri 4 Idi	Kabupaten Aceh Timur
10	SD Negeri 1 Idi	Kabupaten Aceh Timur
11	SD Negeri 3 Bayeu	Kabupaten Aceh Timur
12	SMP Negeri 1 Peudaw	Kabupaten Aceh Timur
13	UKBI SMP Negeri 2 Madat	Kabupaten Aceh Timur
14	SMP Negeri 1 Wih Pesam	Kabupaten Bener Meriah
15	SMP Negeri 2 Timang Gajah	Kabupaten Bener Meriah
16	SMP Negeri 3 Timang Gajah	Kabupaten Bener Meriah
17	SMP Negeri 4 Pintu Rime Gayo	Kabupaten Bener Meriah
18	SMP Negeri 5 Badar	Kabupaten Bener Meriah

